

**PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)
DI SMK N 3 YOGYAKARTA**

TUGAS AKHIR SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh :

Kismanto

NIM. 09504241009

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

PARTISIPAS KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS) DI SMK N 3 YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Kismanto
NIM 09504241009

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dilaksanakan
Ujian Akhir Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Yogyakarta, Agustus 2016

Mengetahui,

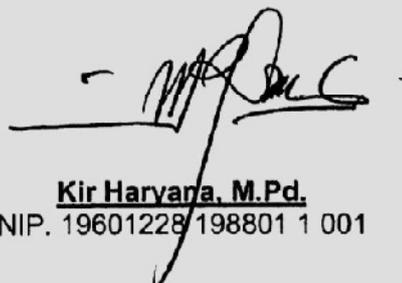
Ketua Program Studi
Pendidikan Teknik Otomotif



Dr. Zainal Arifin, M.T.
NIP. 19690312 200112 1 001

Disetujui,

Pembimbing Skripsi



Kir Haryana, M.Pd.
NIP. 19601228 198801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN
Tugas Akhir Skripsi

**PARTISIPAS KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN
PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)
DI SMK N 3 YOGYAKARTA**

Disusun Oleh:
Kismanto
NIM 09504241009

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi Progam Studi
Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
Pada tanggal Agustus 2016

TIM PENGUJI		
Nama/Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Kir Haryana, M.Pd Ketua Penguji/Pembimbing		30/8 '16
Moch. Solikin, M.Kes Sekretaris		10/10 '16
Dr. Sukoco Penguji		5/10 '16

Yogyakarta, 2016

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Dr. Widarto, M.Pd
NIP. 19631230 198812 1 001

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan dosen penguji yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi ditunda yudisium pada periode berikutnya.

Yogyakarta, Agustus 2016

Yang menyatakan

Kismanto

NIM. 09504241009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Lakukanlah apa yang menjadi pilihanmu. Yakini, dan berdoalah. Pilihanmu adalah yang terbaik untukmu.
2. Setiap pilihan selalu ada tantangan, tinggal bagaimana kita menaklukkannya.
3. Batas seseorang berikhtiar adalah kematian, maka lakukanlah selagi kamu ingin hidup

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku, teman-teman Gang Alamanda 14 dan kelas A angkatan 2009 Pendidikan Teknik Otomotif serta Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta.

**PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN
PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS)
DI SMK N3 YAOGYAKARTA**

**Oleh:
Kismanto
NIM. 09504241009**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai partisipasi komite sekolah dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMK N 3 Yogyakarta yang difokuskan pada peran sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengontrol, serta badan penghubung dari komite sekolah.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan satu variabel yaitu partisipasi komite sekolah. Subjek penelitian ini adalah anggota anggota komite sekolah tetap yang berjumlah 11 orang dan guru yang berjumlah 1 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi angket, wawancara tidak terstruktur, serta dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perhitungan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut hasil angket dengan dibuktikan dari hasil wawancara dan hasil dokumentasi, partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan masuk kategori berhasil(70,00%) kegiatan yang terlaksana diantaranya memberikan pertimbangan dalam pedataan sumber daya sekolah(45,45%), memberikan pertimbangan dalam penyusunan RKAS/RAPBS(86,36%), memberikan pertimbangan terhadap kondisi tenaga pendidikan sekolah (77,27%), memberikan pertimbangan sistem pembelajaran sekolah (68,18%), memberikan pertimbangan terhadap sarana prasarana sekolah (72,73%), partisipasi sebagai badan pendukung masuk kategori kurang berhasil(69,77%) kegiatan yang telah terlaksana diantaranya mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan(71,43%), menggalang dana dalam rangka pembiayaan pendidikan (83,33%), mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam pendidikan (54,55%), partisipasi komite sekolah sebagai badan pengawas masuk kategori kurang berhasil (69,70%), kegiatan yang telah terlaksana memantau pelaksanaan perogram di sekolah(75,76%), memantau hasil belajar siswa(63,64%), partisipasi komite sekolah sebagai badan penghubung masuk kategori berhasil (71,02), kegiatan yang telah terlaksana melakukan kerjasama dengan masyarakat(70,45%), menampung menganalisis aspirasi ide tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat (71,59%).

Kata Kunci: *Partisipasi, Komite Sekolah, MPMBS*

**PARTICIPATION OF SCHOOL COMMITTEES IN THE IMPLEMENTATION OF
SCHOOL-BASED QUALITY IMPROVEMENT MANAGEMENT (SBQIM)
AT SMK N 3 YOGYAKARTA**

**By:
Kismanto
NIM. 09504241009**

ABSTRACT

This study aimed to describe the participation of school committees in the implementation of School-Based Quality Improvement Management at SMK N 3 Yogyakarta which focused on the role as a advisory agent, support agent, control agent, and mediator agent of school committee.

This research is a descriptive study of the variables: the participation of school committees. The subjects were members of the school committee members remain 11 people and teacher 1 people. Data collection techniques used include questionnaires, unstructured interviews, and documentation. Analysis of the data in this study using percentage calculation.

The results showed that, according to the results of questionnaires with proven results from interviews and documentation, participation of school committees advisory agent in the category of managed entities (70.00%) activities implemented include giving consideration in collection school resources (45.45%), give consideration in the preparation of RKAS / RAPBS (86.36%), giving consideration to the labor conditions of school education (77.27%), giving consideration school learning system (68.18%), giving consideration to the school infrastructure (72.73 %), participation as a support agent of the less successful entry category (69.77%) activities that have been implemented include encourages parent and community participation in penididikan (71.43%), to raise funds in order to finance education (83.33%), encouraging growing concern and commitment of the community in education (54.55%), participation of school committee as a control agent in the category of less successful (69.70%), activities that have been implemented to monitor the implementation of perogram in schools (75.76%), watching the results of learning students (63.64%), participation of school committee as a mediator agent in the category of work (71.02), activities have been carried out in cooperation with the public (70.45%), to accommodate the aspirations of the idea of analyzing the demands and needs of the proposed education community (71.59%).

Key word: participation, school committees, School-Based Quality Improvement Management

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir Skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan dengan judul "Partisipasi Komite Sekolah Dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMK N 3 Yogyakarta" dapat disusun sesuai dengan harapan. Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dengan pihak lain. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Kir Haryana, M.Pd. selaku pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah banyak memberikan semangat, dorongan, dan bimbingan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
2. Bapak Moch. Solikin, M.Kes. dan Bapak Martubi, M.Pd. M.T selaku Validator instrument penelitian Tugas Akhir Skripsi yang memberikan saran/masukan perbaikan sehingga penelitian Tugas Akhir Skripsi dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
3. Bapak Kir Haryana, M.Pd, Bapak Moch Solikhin, M.Kes, bapak Dr. Sukoco selaku ketua penguji, sekretaris dan penguji yang memberikan koreksi perbaikan secara komprehensif terhadap Tugas Akhir Skripsi ini.
4. Bapak Dr Zaenal Arifin, M.T. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dan Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif beserta dosen dan staf yang telah memberikan bantuan dan fasilitas selama

proses penyusunan pra proposal sampai dengan selesainya Tugas Akhir Skripsi ini.

5. Bapak Dr. Widarto selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta yang memberikan persetujuan pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi.
6. Bapak Bujang Sabri, selaku Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta yang telah memberi ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
7. Para guru, staf, dan anggota Komite Sekolah Tetap SMK N 3 Yogyakarta yang telah membantu memperlancar pengambilan data selama proses penelitian Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga segala bantuan yang telah diberikan semua pihak di atas menjadi amalan yang bermanfaat dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa dan Tugas Akhir Skripsi ini menjadi informasi bermanfaat bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkannya.

Yogyakarta, Agustus 2016

Penyusun

Kismanto

NIM. 09504241009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Pembatasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. DESKRIPSI TEORI.....	19
1. Komite Sekolah	19
a. Pengertian Komite sekolah.....	19
b. Tujuan Komite Sekolah	21
c. Tugas Komite Sekolah	22
d. Pengorganisasian Komite Sekolah	27
e. Indikator Kinerja Komite Sekolah	29
2. Partisipasi	32
a. Pengertian partisipasi	32
b. Bentuk partisipasi.....	35
3. Mutu Sekolah	39
a. Pengertian Mutu.....	39
b. Prinsip Mutu pendidikan	41
c. Indikator Keberhasilan Mutu	44
4. Manajemen Berbasis Sekolah.....	48
a. Pengertian Manajemen	48
b. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah	51
c. Tujuan MBS	57
d. Karakteristik MBS	58
B. Hasil Penelitian yang Relevan.....	67
C. Kerangka berfikir	69
D. Pertanyaan Penelitian.....	70

BAB III METODE PENELITIAN	72
A. Jenis Penelitian	72
B. Tempat dan Waktu Penelitian	72
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	73
D. Subjek Penelitian	74
E. Teknik Pengumpulan Data	75
F. Instrumen Penelitian	75
1. Kisi-kisi Instrumen	76
2. Uji Instrumen	76
G. Teknik Analisis Data	80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Hasil Penelitian	84
1. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan	87
2. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung	92
3. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol	97
4. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung	100
5. Kendala yang Dihadapi Komite Sekolah	105
B. Pembahasan	108
1. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan	108
2. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung	124
3. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol	138
4. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung	149
BAB V KESIMPULAN	157
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	163

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	70
Gambar 2. Diagram Batang Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan	92
Gambar 3. Diagram Batang Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung	97
Gambar 4. Diagram Batang Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol	100
Gambar 5. Diagram Batang Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pola Perubahan Dimensi Manajemen Pendidikan	52
Tabel 2. Ruang Lingkup Komponen Pendidikan.....	59
Tabel 3. Daftar Responden	75
Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen	77
Tabel 5. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan	87
Tabel 6. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung	93
Tabel 7. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol	97
Tabel 8. Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung	101
Tabel 9. Jumlah Guru Berdasarkan Kelompok Mapel, Pendidikan , Usia dan Kebutuhan.....	115

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Keterangan Validasi	165
Lampiran 2. Angket Penelitian	170
Lampiran 3. Tabulasi Data	183
Lampiran 4. Surat Pernyataan Wawancara	184
Lampiran 5. Hasil Wawancara	187
Lampiran 6. Dokumentasi	200
Lampiran 7. Kartu Bimbingan	232
Lampiran 8. Surat Perijinan Penelitian	234
Lampiran 9. Surat Selesai Penelitian	237

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekolah merupakan sarana bagi masyarakat dalam melakukan proses belajar aktif secara struktural. Sekolah menjamin transfer ilmu antara guru dengan murid dapat berjalan dengan lancar. Sekolah juga merupakan organisasi pendidikan yang berada dan paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, antara sekolah dengan masyarakat semestinya memiliki peran kerjasama untuk bisa memajukan pendidikan di lingkungan dimana sekolah itu berada.

Sekolah sebagai pelaku pendidikan, pada era sebelum otonomi mengalami masalah dalam mengembangkan diri. Sistem yang terpusat di pemerintahan pusat membuat pengembangan sekolah yang tidak merata. Keadaan inilah yang membuat perlu adanya perubahan sistem pendidikan yang bersifat sentralistik menjadi sistem yang bersifat desentralistik.

Berdasarkan UU No.25 tahun 2004 Bab VII tentang pembangunan jangka panjang nasional. Didalamnya mencantumkan tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan yang sesuai dengan proporsi di masyarakat, menurunkan kesenjangan antar tingkat dan kualitas pendidikan antar kelompok atau daerah khususnya antar daerah maju dengan daerah tertinggal. Menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat.

Dari uraian tersebut tantangan pembangunan pendidikan saat ini dipusatkan dalam peningkatan mutu dan pemerataan terhadap daerah tertinggal. Sehingga diperlukan proses desentralisasi pendidikan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerjasama antara sekolah pemerintah dan masyarakat.

Kebijakan desentralisasi akan membawa dampak positif dan negatif terhadap penerapan pendidikan di sekolah tergantung dari pandangan pemerintah daerah, yang dalam hal ini bupati atau walikota. Kebijakan desentralisasi dapat berpengaruh negatif terhadap sistem pendidikan di satuan pendidikan. Apabila pemerintah daerah memandang kebijakan desentralisasi sebagai alih kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah menggunakan kekuasaannya mengendalikan sistem pendidikan di daerah yang menghambat terciptanya otonomi pendidikan. Namun sebaliknya, apabila pemerintah daerah paham mengenai makna desentralisasi dan penerapannya sampai di dunia pendidikan. Maka, akan memperpendek birokrasi antara sekolah dengan pemerintah sehingga proses pembangunan sekolah lebih cepat terlaksana.

Dalam UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 47 menyebutkan bahwa a) sumber pendanaan pendidikan dibentuk berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. b) pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berlaku. Sedangkan pasal 48 menyebutkan bahwa

pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik

Sebagai langkah terciptanya pengelolaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik maka diperlukan sistem manajemen yang baik yang melibatkan Pemerintah, Sekolah, dan masyarakat melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut MBS dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Secara umum MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan parsiatif yang melibatkan secara langsung seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Manajemen Berbasis Sekolah mengedepankan sistem yang otonom, transparan, akuntabel, partisipatif dan kerjasama. Tujuannya adalah untuk membentuk sekolah yang mampu mengembangkan dirinya sendiri dengan caranya sendiri sesuai dengan karakter sekolah namun dapat dipertanggungjawabkan terhadap negara dan masyarakat. Untuk memperoleh kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan kedua pihak, peran sekolah untuk membentuk kepercayaan bahwa masyarakat merupakan bagian dari sekolah dan dengan bantuan masyarakat sekolah akan berkembang lebih baik. Sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat, adalah dengan membentuk sebuah badan yang beranggotakan

masyarakat dan bertugas untuk membantu pengelolaan sekolah yaitu melalui komite sekolah.

Dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 10 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan di Pasal 11 ayat (1) disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dari pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah dalam pendidikan adalah menjamin adanya pelayanan pendidikan yang bermutu, serta menyediakan pendanaan untuk kegiatan pendidikan. Dalam perkembangannya, pemerintah selalu berupaya untuk dapat memfasilitasi kebutuhan sekolah dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya Lomba Kompetensi Siswa, Verifikasi Alat Uji, Kewirausahaan, Bantuan UN, Bantuan Kompetensi, Bantuan JPD dan BOS.

Untuk bantuan operasional Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, memperkirakan dana operasional siswa SMK pertahun saat ini lebih dari Rp 2.000.000,00 (2 Juta Rupiah). Berdasarkan standar biaya operasional dalam

permendiknas no 69 tahun 2009, untuk kota Yogyakarta mencapai Rp 1.900.000,00 pada tahun 2009 dan tentunya akan meningkat nilainya seiring dengan peningkatan harga barang. Menurut Disdikpora Kota Yogyakarta, standar pembiayaan untuk smk adalah Rp 2.225.000,00/siswa/tahun. Untuk meringankan beban siswa, saat ini Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta baru mampu memberikan dana bantuan operasional kepada siswa sebesar Rp 1.600.000,00. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan pembelajaran siswa, pembelian alat dan bahan serta digunakan untuk perbaikan fasilitas KBM. Kekurangan dana operasional selanjutnya ditutup dengan adanya BOS dari dinas Pronvisi yang diambil dari APBD Provinsi dan BOS dari APBN pendidikan serta dari pembayaran SPP bulanan oleh orang tua siswa yang sesuai aturan Dinas Pendidikan Kota DIY mkasimal sebesar Rp 40.000,00 per siswa.

Selain dana operasional, pemerintah daerah juga memberikan bantuan untuk siswa kelas 3 berupa UN bagi SMK sebesar Rp 75.000/ siswa, juga bantuan untuk kegiatan uji kompetensi siswa sebesar Rp 80.000/ siswa. Sedangkan bagi siswa pemegang KMS/JPD ada bantuan khusus dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta sebesar Rp 3.000.000,00 kepada siswa pertahunnya. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa khususnya untuk bantuan UN dan Uji Kompetensi sehingga nilai kelulusan UN dapat meningkat.

Namun demikian, dalam kenyataannya berdasarkan data kelulusan UN SMK tahun 2012-2014 di SMK N 3 Yogyakarta mengalami penurunan nilai

rata-rata kelulusan dan penurunan peringkat SMK di Kota Yogyakarta. berdasarkan data tersebut, selama pada tahun ajaran 2011-2012 dan 2012-2013 SMK 3 berada diperingkat 6 nilai rata-rata kelulusan SMK di Yogyakarta dengan nilai rata-rata total 29,92 dan 30,01. Sedangkan di tahun ajaran 2013-2014 peringkat SMK N 3 Yogyakarta menurun diperingkat 8 dengan nilai rata-rata total sebesar 28,99. Selain itu jumlah siswa tidak lulus di SMK N 3 Yogyakarta meningkat dari tahun kelulusan 2012-2013 hanya sekitar 20an siswa, ditahun kelulusan 2014 meningkat mencapai 86 siswa. Hal ini tentu saja menurunkan akuntabilitas sekolah dimata masyarakat yang merupakan salah satu SMK terbesar di Jogja. Disini peran warga sekolah dan komite sekolah sebagai badan pengontrol dan pertimbangan bagi sekolah perlu ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap SMK N 3 Yogyakarta dapat meningkat. Khususnya dalam pengelolaan dana bantuan dari pemerintah sehingga dapat benar-benar meningkatkan prestasi siswa.

Komite sekolah berperan diantaranya sebagai pendukung kegiatan (*supporting agency*), baik berwujud finansial pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Mediator antar pemerintah dan masyarakat sekitar dan juga pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

SMK N 3 Yogyakarta merupakan salah satu SMK terbesar di Yogyakarta. Dengan jumlah murid dalam 1 angkatan mencapai 700 siswa, hal ini hampir setara dengan 3 angkatan siswa dalam satu SMA. SMK N 3 Yogyakarta menampung 20 kelas setiap tahunnya yang terbagi dalam beberapa program keahlian yang terdiri dari Teknik kendaraan Ringan, Teknik Mesin, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Audio Video, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Multimedia, Teknik Konstruksi Kayu dan Teknik Gambar Bangunan.

Berbagai prestasi telah diraih oleh siswa-siswi SMK N 3 Yogyakarta dalam berbagai lomba di tingkat regional bahkan di tingkat Nasional. Di tingkat Regional misalnya, siswa-siswi untuk tahun 2014 ini saja telah memenangkan berbagai lomba kompetisi diantaranya menjadi juara umum dalam gelaran ROBO VAGANZA 2014 DRAG RACE COMPETITION untuk regional DIY-Jateng dan ROBOTECH regional Se-Jawa yang diperoleh melalui Tim Robotic SMK N 3 Yogyakarta. selain itu melalui perorangan adalah Juara III lomba film Indie tingkat SMA se DIY dan juara I lomba Metrologi dan IT Networking untuk regional DIY-Jateng. Untuk tingkat nasional diperoleh pada tahun 2013 dengan menjadi juara 1 dalam ajang perlombaan Lomba *Robotic Maze Solving Line Follower* dan *Vocational Computer Festival*.

Terlepas dari prestasi di berbagai perlombaan, tidak dibarengi dengan prestasi di Lomba Kompetensi Sekolah(LKS) yang merupakan lomba dari Dinas Pendidikan di tingkat daerah sampai nasional dalam rangka untuk mengasah kemampuan siswa dalam penguasaan di bidang keahlian masing-masing. Secara rata-rata terjadi penurunan prestasi dalam LKS antara tahun

2012-2014. Pada tahun 2012 SMK N 3 Yogyakarta meraih 3 juara peringkat pertama di kategori *CNC Milling, Automotive technology*, dan mesin Produksi, Juara 2 *PLC/Industrial control*, serta 3 Juara di peringkat ketiga kategori *electronic application, joinery* dan *cabinet making* untuk tingkat DIY. Sedangkan di tahun 2013 untuk LKS di tingkat DIY SMK N 3 Yogyakarta tidak satupun memperoleh juara I. Meskipun ada peningkatan peringkat di bidang *cabinet making*, dan *electronic application* dengan menjadi juara II. Juga bidang teknologi informasi aplikasi, dan mobil robotic di peringkat 2 disusul bidang *commercial wiring* di peringkat 3. Namun ada penurunan peringkat dari juara 1 menjadi juara 3 di bidang *automotive technology*. Di tingkat nasional SMK N 3 Yogyakarta berhasil meraih juara 2 dan 3 di bidang *pattern making* dan mesin produksi pada tahun 2013, di tahun 2014 memperoleh juaran harapan II di bidang *mold making*.

Penurunan prestasi tersebut tentunya disebabkan oleh berbagai hal yang saling terkait. Selain dari segi pribadi siswa, hal yang menunjang prestasi siswa adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk belajar dengan baik dan sesuai dengan perkembangan di masyarakat saat ini. Untuk menunjang kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan siswa tentunya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sekolah selalu berupaya agar kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi demi peningkatan prestasi siswa agar kepercayaan dan prestasi sekolah juga meningkat.

Setiap tahunnya sekolah telah merencanakan anggaran kegiatan sekolah yang tentunya tidak sedikit. Untuk tahun 2014 sekolah merencanakan

anggaran sebesar 6,838 miliar untuk kegiatan sekolah yang terdiri dari kurikulum (1,860 miliar), sarpras (2,206 miliar), kesiswaan (1,376 miliar), humas (1, 005 miliar) serta untuk SDM dan peningkatan mutu (0,392 miliar). Besarnya anggaran ini tentunya perlu pengawasan serta pertimbangan yang baik dari komite sekolah dalam penggunaan anggaran tersebut.

Anggaran tersebut akan maksimal apabila dalam penggunaannya telah ada sebelumnya sehingga sekolah dapat langsung menggunakan sesuai dengan rencana kegiatan sekolah. Namun dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi kemunduran realisasi kegiatan sekolah.

Hal ini disebabkan kurangnya dana atau terlambatnya dana yang masuk. Dalam anggaran kegiatan sekolah, salah satu sumber dana adalah adanya uang investasi dari orang tua wali murid bagi siswa baru yang masuk. Untuk SMK N 3 Yogyakarta besarnya uang investasi dari orang tua siswa sebesar Rp 3.000.000,00 (3 Juta rupiah)/ orang tua siswa yang dibayarkan setelah siswa diterima di SMK N 3 Yogyakarta. Sistem pembayarannya dilakukan satu kali. Namun kenyataannya, pembayarannya sering kali mundur, bahkan sampai siswa lulus ada yang belum melakukan pelunasan uang investasi karena dianggap memberatkan kalau dibayar sekali. jika dikumulasi, uang investasi orang tua murid bisa mencapai 2,1 miliar setiap tahunnya jika pendaftar memenuhi seluruh kuota sebanyak 720 siswa/angkatan (20 kelas). Dana sebesar itu hampir sepertiga kebutuhan dana tahunan di SMK N 3 Yogyakarta. Dalam hal ini peran komite untuk menjembatani antara sekolah dan orang tua murid sangat dibutuhkan

sehingga kesadaran orang tua murid untuk membayar uang investasi sekolah.

Kebutuhan anggaran yang besar salah satunya untuk sarana praktek siswa. Berdasarkan Permendiknas No.39 tahun 2009 mengenai beban kerja bagi guru, bahwa setiap guru paling sedikit mengajar dengan beban minimal 24 jam tatap muka/ minggu. Padahal selama ini, guru bidang produktif program TKR selama ini hanya mengajar teori sehingga kurang dari 24 jam tatap muka. Untuk mengatasi hal tersebut maka guru diharuskan untuk mengajar teori dan praktek. Padahal selama ini praktek sekolah khususnya jurusan Teknik Kendaraan Ringan ada di Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT). Sehingga, mulai tahun 2013 pelaksanaan praktek siswa dipindah ke SMK N 3 Yogyakarta. Untuk menjamin prestasi siswa, maka kebutuhan sarana prasarana praktek di upayakan melalui pengadaan alat. Untuk kebutuhan ideal sarana praktek di jurusan TKR mencapai 6,253 milliar rupiah. Pengadaannya dilakukan secara bertahap, dengan pengajuan dana sekitar 300 juta/tahunnya.

Dalam pelaksanaan pengadaan alat praktek ternyata sering kali menemui kendala. Diantaranya waktu pengadaan tidak sesuai jadwal, pengadaan alat tidak sampai 100%, keterlambatan dana dan kurangnya dana untuk pengadaan. Sebagian dana untuk sarana praktek berasal dari uang investasi orang tua murid. Padahal selama ini, seringkali uang investasi dari orang tua murid banyak ditemui keterlambatan dalam pembayarannya.

Kebutuhan sarana khususnya untuk praktek di kelas, sangat dibutuhkan untuk menunjang prestasi siswa khususnya prestasi di bidang kompetensi masing-masing. Oleh karena itu warga sekolah dan masyarakat harus dapat saling bekerja sama untuk mewujudkannya. Komite sekolah sebagai agen penghubung antara sekolah dengan masyarakat harus dapat menjembatani dan membuka kerja sama terutama dalam memperoleh sumbangan sarana-prasarana bagi sekolah. Dengan adanya kerjasama yang baik diharapkan tercipta *link and match* yang baik antara sekolah dan masyarakat. Sehingga akuntabilitas dan sustainabilitas sekolah dimata masyarakat akan tetap terjaga.

Dengan masih belum maksimalnya pengelolaan bantuan dari pemerintah, kekurangan dan keterlambatan pengadaan alat dan bahan praktik, sampai kesadaran orang tua murid dalam membantu pembangunan sekolah melalui uang investasi sekolah. Diperlukan peran komite sekolah yang baik, terutama dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana, memberikan pertimbangan program bagi sekolah. Selain itu juga komite sekolah perlu berperan dalam menjembatani antara sekolah dan orang tua murid terutama kesadaran orang tua murid untuk mendukung kegiatan sekolah. Selain itu juga, komite sekolah perlu menjaring dukungan kepada masyarakat agar masalah pendanaan sekolah dapat teratasi.

Berdasarkan uraian terakhir, tergambar bahwa peran komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta saat ini belum maksimal terutama dalam hal

pengawasan dan mediator di sekolah untuk mencapai mutu sekolah yang baik. Menjaga akuntabilitas dan sustaintabilitas sekolah di mata masyarakat.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa temuan masalah yang terkait dengan peran pemerintah sampai dengan kebutuhan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.

1. Berdasarkan observasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Bantuan pemerintah pusat dan daerah belum mampu mengcover kebutuhan sekolah. Meskipun setiap tahun bantuan sekolah mengalami kenaikan pada tahun 2013 sekitar 1,2 Juta/siswa/tahun dan di tahun 2014 menjadi 1,6 juta/siswa/tahun (Bantuan operasional Dinas Pendidikan Kota) belum mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penarikan uang SPP sebesar Rp 40.000,00/bulan dan uang investasi sekolah dari orang tua murid sebesar 3 juta rupiah.
2. Perlu pengawasan terhadap penggunaan dana opsional UN dan Uji Kompetensi. Hasil observasi di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, bahwa dana Operasional UN siswa SMK sebesar Rp 75.000,00/siswa dan dana operasional Uji Kompetensi sebesar Rp 80.000,00/siswa. Dana tersebut seharusnya bisa dikelola untuk peningkatan prestasi dalam ujian kompetensi dan Ujian Akhir Nasional(UAN). Namun hasil UN dan Uji Kompetensi selama 2011-2014 di SMK N 3 Yogyakarta, belum

menunjukkan peningkatan. Nilai rata-rata UN selama 3 Tahun cenderung mengalami penurunan .

3. Hasil observasi di SMK N 3 Yogyakarta didapati bahwa prestasi yang diraih siswa siswi SMK N 3 Yogyakarta tidak dibarengi dengan prestasi hasil Ujian Nasional dan Lomba Kompetensi Sekolah. Pada tahun ajaran 2011-2012 dan 2012-2013 SMK N 3 Yogyakarta berada diperingkat 6 nilai rata-rata kelulusan SMK di Yogyakarta dengan nilai rata-rata total 29,92 dan 30,01. Sedangkan di tahun ajaran 2013-2014 peringkat SMK N 3 Yogyakarta menurun diperingkat 8 dengan nilai rata-rata total sebesar 28,99. Selain itu jumlah siswa tidak lulus di SMK N 3 Yogyakarta meningkat dari tahun kelulusan 2012-2013 hanya sekitar 20an siswa, ditahun kelulusan 2014 meningkat mencapai 86 siswa.
4. Adanya keterlambatan pembayaran uang investasi dari orang tua murid sebesar Rp 3.000.000,00/orangtua siswa. Kebijakan sekolah dalam proses pembayaran uang investasi yang dilakukan hanya satu kali dirasa memberatkan.
5. Perlu adanya pertimbangan dalam prioritas pengadaan sarana dan prasarana praktik. Dari hasil observasi mengenai sarana prasarana di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan(TKR) didapatkan hasil bahwa masih terjadi kekurangan sarana kegiatan kelas di Jurusan TKR. Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, yang sejak tahun 2013 melakukan kegiatan praktik di sekolah induk SMK N 3 Yogyakarta. Untuk mencukupi kebutuhan alat dan bahan praktik telah direncanakan pengadaan alat

dan bahan oleh Kepala Program TKR sebesar 6,253 miliar dengan pengadaan secara bertahap. Kurangnya dana dan keterlambatan dana yang masuk mengakibatkan pengadaan sering kali terlambat dari jadwal dan tidak memenuhi rencana. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap praktik siswa.

6. Dengan kebutuhan dana yang besar, ditambah adanya penurunan prestasi sekolah akan menurunkan akuntabilitas sekolah di mata masyarakat. Jika hal ini terus berlanjut akan berdampak pada sustainabilitas sekolah. Terutama dalam hal kerja sama dan penyaluran bantuan dari masyarakat.
7. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam mengatasi keterlambatan dan kekurangan dana sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah belum maksimal. Salah satunya pengadaan peralatan praktik di bengkel otomotif.
8. Peran komite sebagai badan penghubung dalam mengkoordinasikan dana dari masyarakat khususnya orang tua murid belum tercapai maksimal. Penanganan terhadap ketelambatan pembayaran dana sekolah dari orang tua murid belum mampu diatasi.
9. Kurangnya sarana prasarana dan pendanaan sekolah membuat prestasi sekolah tidak meningkat secara signifikan. Pengelolaan dana operasional dari dinas yang belum maksimal. Ditambah kurangnya kesadaran orang tua murid dalam melakukan pembayaran uang investasi,

menggambarkan perlu peran komite sekolah dalam pengawasan, pemberi pertimbangan dan mediator.

C. BATASAN MASALAH

Memperhatikan dari identifikasi masalah tersebut diatas dan mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini dibatasi berdasarkan.

1. Lingkup penelitian mengenai partisipasi Komite Sekolah dalam peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis sekolah yang diteliti pada peran Komite Sekolah sebagai badan Pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas, dan badan penghubung.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari batasan masalah diatas, masalah yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
2. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
3. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?

4. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan penghubung dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
5. Apakah ada kendala partisipasi komite sekolah dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran dilapangan khususnya di SMK N 3 Yogyakarta mengenai partisipasi masyarakat dalam Manajemen Berbasis Sekolah. Secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui besarnya partisipasi komite sekolah dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.
2. Mengetahui bentuk-bentuk partisipasi komite sekolah dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.
3. Mengetahui sejauh mana peran komite sekolah dalam implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.
4. Mengetahui kendala yang ada di komite sekolah dalam berpartisipasi untuk meningkatkan mutu sekolah.

Dari tujuan penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan hasil yang baik. Dapat mengukur secara lebih mendetil mengenai partisipasi dan upaya anggota komite sekolah dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan mutu pelayanan sekolah. Selain itu juga memberikan masukan kepada sekolah untuk menentukan dan mengembangkan kebijakan sekolah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis

- a. Diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi mengenai tugas komite sekolah.
- b. Sebagai bahan untuk meningkatkan pemahaman konsep peran komite sekolah sesuai dengan pedoman. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam manajemen pendidikan khususnya terkait dengan peran komite sekolah.
- c. Memberikan referensi dan sumbangan positif terhadap pengembangan ilmu dibidang pendidikan

2. Praktik

- a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang manajemen sekolah salah satunya mengenai peran komite sekolah dalam lingkup manajemen sekolah. selain itu

untuk menambah koleksi perpustakaan yang diharapkan menjadi referensi atau bacaan bagi mahasiswa dan pihak yang berkepentingan.

b. Bagi SMK N 3 Yogyakarta

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi SMK N 3 Yogyakarta dalam meningkatkan peran komite sekolah.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai implementasi studi di Universitas Negeri Yogyakarta , dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Komite sekolah
 - a. Pengertian

Pendidikan di sekolah seringkali menghadapi persoalan yang kompleks. Untuk melaksanakan program sekolah dengan baik maka perlu ada partisipasi aktif antara sekolah, orang tua murid, masyarakat, dan industri. Agar partisipasi dapat terkoordinasi dengan baik, maka dikordinasikan dalam satu wadah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Menurut Kepmendiknas No.44 tahun 2002 tentang dewan pendidikan dan komite sekolah menjelaskan bahwa, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Djam'an Satori yang menyebutkan bahwa komite Sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah (Mulyono,2008:258). komite sekolah bekerja secara mandiri tanpa ada hubungan hirarki dari pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama dan mandiri dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

"Komite Sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. Nama Komite Sekolah merupakan nama generik, artinya nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Majelis Madrasah, Komite Madrasah, Komite TK, atau nama lainnya yang disepakati. Dengan demikian, organisasi yang ada sebelumnya seperti BP3, dapat memperluas peran, fungsi, dan keanggotaannya atau melebur menjadi organisasi baru yang bernama Komite Sekolah. M Misbah(2009:3)"

Dalam undang-undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 disebutkan Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat berkoordinasi dengan sekolah. Sehingga penyaluran aspirasi dari masyarakat, dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk di setiap satuan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan sekolah dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Komite sekolah secara langsung tidak berhubungan dengan pemerintah, karena dibentuk sebagai representasi unsur masyarakat yang berperan dalam sekolah.

b. Tujuan

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun di manapun adanya harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi pada pengguna (*client model*) dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (*customer*) berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. M. Misbah (2009:3)

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah N0.17 tahun 2010 pasal 196 ayat 1 bahwa komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasasn pendidikan pada tingakt satuan pendidikan.

Dalam Kepmendiknas No.44 tahun 2002, dijelaskan Komite Sekolah dibentuk bertujuan untuk:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan komite sekolah didirikan untuk meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Peningkatan mutu tersebut didapat melalui kerjasama antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat dengan menciptakan kondisi kerja yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

c. Tugas Komite Sekolah

Depdiknas(2001:17) dalam bukunya Partisipasi Masyarakat, menguraikan tujuh peran Komite Sekolah terhadap penyelenggaraan sekolah, yakni:

- 1) Membantu meningkatkan kelancaran penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di sekolah baik sarana, prasarana maupun teknis pendidikan.
- 2) Melakukan pembinaan sikap dan perilaku siswa. Membantu usaha pemantapan sekolah dalam mewujudkan pembinaan dan pengembangan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

pendidikan demokrasi sejak dini (kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan pendahuluan bela negara, kewarganegaraan, berorganisasi, dan kepemimpinan), keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran jasmani dan berolah raga, daya kreasi dan cipta, serta apresiasi seni dan budaya.

- 3) Mencari sumber pendanaan untuk membantu siswa yang tidak mampu.
- 4) Melakukan penilaian sekolah untuk pengembangan pelaksanaan kurikulum, baik intra maupun ekstrakurikuler dan pelaksanaan manajemen sekolah, kepala/wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan karyawan.
- 5) Memberikan penghargaan atas keberhasilan manajemen sekolah.
- 6) Melakukan pembahasan tentang usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- 7) Meminta sekolah agar mengadakan pertemuan untuk kepentingan tertentu (Depdiknas, 2001:17).

Dalam Kepmendiknas No.44 tahun 2002 disebutkan ada empat peran yang harus dilakukan komite sekolah dalam mengembangkan sekolah:

- 1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan
- 2) Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan

3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan

4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Secara lebih terperinci, tugas komite sekolah juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 pasal 196 ayat 2 dan 3. Bahwa komite sekolah harus dapat menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional. Kemudian komite sekolah diharapkan dapat memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Djam'an satori (dalam Mulyono, 2009:258) menjelaskan tugas-tugas komite sekolah diantaranya:

1)Menyusun perencanaan strategi sekolah yaitu strategi pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang. Diantaranya visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, kajian isu-isu strategi sekolah perumusan program-program, perumusan strategi pelaksanaan program, cara pengendalian dan evaluasinya.

2)Menyusun perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi sekolah. Dalam perencanaan tahunan ini yang dibahas adalah program-program operasional yang merupakan implementasi program prioritas yang

dirumuskan dalam perencanaan strategi sekolah yang disertai perencanaan anggarannya.

- 3) Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi kepedulian para *stakeholder* sekolah terhadap berbagai aspek kehidupan sekolah yang ditujukan pada upaya-upaya perbaikan, kemajuan dan pengembangan sekolah.
- 4) Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengedaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi *stakeholder* sekolah. Perhatian terhadap masalah ini dimaksudkan agar sekolah setidaknya memenuhi standar pelayanan minimum.
- 5) Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (*school self-assessment*) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.
- 6) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*quality assurance*) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi siswa (*basic minimum competency*) seperti yang diatur dalam PP No.25 Tahun 2000.

7) Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan komite sekolah. Laporan tahunan sekolah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota. Review sekolah merupakan kegiatan penting untuk mengetahui keunggulan suatu sekolah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya, atau sebaliknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sekolah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. Review sekolah merupakan media untuk saling mengisi pengalaman sekaligus saling belajar antar sekolah dalam upaya meningkatkan kinerjanya masing-masing.

8) Memantau kinerja sekolah, yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun ekstrakurikuler.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat dan peraturan mengenai tugas-tugas komite sekolah, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Komite sekolah secara umum bertugas sebagai dewan pertimbangan, pendukung, pengawas, dan penghubung bagi satuan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

d. Pengorganisasian

1) Keanggotaan komite sekolah

a) Keanggotaan komite sekolah terdiri atas:

(1) Unsur masyarakat yang terdiri dari:

- (a) Orang tua/wali peserta didik
- (b) Tokoh masyarakat
- (c) Tokoh pendidikan
- (d) Dunia usaha/dunia industri
- (e) Organisasi profesi tenaga kependidikan
- (f) Wakil alumni
- (g) Wakil peserta didik

(2) Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan Badan Pertimbangan Desa dapat pula dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah (maksimal 3 orang)

b) Anggota komite sekolah sekurang-kurangnya berjumlah 9 orang dan jumlahnya gasal.

Keanggotaan komite sekolah juga diatur dalam PP no 17 tahun 2010 pasal 197

a) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 15(lima belas) orang, terdiri atas unsur : orang tua murid(maks :50%), tokoh masyarakat(maks :30%), dan pakar pendidikan(mask :30%)

b) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

c) Susunan anggota komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.

- d) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua peserta didik satuan pendidikan.
 - e) Ketua komite dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota secara mufakat atau pemungutan suara.
 - f) Ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan oleh kepala sekolah.
- 2) Kepengurusan komite sekolah
- a) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - (1) Ketua
 - (2) Sekretaris
 - (3) Bendahara
 - b) Pengurus dipilih oleh anggota
 - c) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan
- 3) Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga(ART)
- a) Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART
 - b) Anggaran Dasar setidaknya-tidaknya memuat:
 - (1) Nama dan tempat kedudukan
 - (2) Dasar, tujuan dan kegiatan
 - (3) Keanggotaan dan kepengurusan
 - (4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus
 - (5) Keuangan
 - (6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat
 - (7) Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi
 - c) Pendanaan komite sekolah/ madrasah dapat bersumber dari(PP No.17 Tahun 2010 pasal 196 ayat 7) :

- (1) Pemerintah
- (2) Pemerintah daerah
- (3) Masyarakat
- (4) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
- (5) Sumber lain yang sah.

e. Indikator Kinerja Komite sekolah

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengembangkan sekolah. Potensi yang masih dapat terus dikembangkan dari masing-masing individu dapat meningkatkan peluang pengembangan sekolah. Melalui komite sekolah, masyarakat dituntut agar dapat bekerjasama dengan sesama elemen masyarakat dan sekolah sehingga dapat melakukan peningkatan mutu sekolah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Untuk mencapai fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh komite sekolah. Dalam Kepmendiknas No.44 tahun 2002, dijelaskan beberapa fungsi yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan komite sekolah antara lain :

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a) Kebijakan dan program pendidikan;
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
 - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan;
 - d) Kriteria tenaga kependidikan;
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 6) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
- 7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Menurut Sugiaryo(2005), komite sekolah merupakan wadah pemberdayaan peran msyarakat dalam MBS sebagai bentuk pelayanan pendidikan yang nyata. Untuk itulah peran pokok komite sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, pengontrol dan mediator harus dicapai agar pelayanan masyarakat benar-benar mendjadi nyata. Lebih lanjut sugiaryo juga mnejelaskan mengenai indikator kinerja peran komite sekolah dan fungsi manajemennya:

- 1) Komite Sekolah berperan memberikan Pertimbangan dalam;
 - a) Perencanaan sekolah
 - b) Pelaksanaan Program meliputi, kurikulum, PBM, Penilaian
 - c) Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana, dan anggaran
- 2) Komite Sekolah berperan memberikan dukungan dalam ;
 - a) Pengelolaan sumberdaya
 - b) Pengelolaan sarana dan Prasarana
 - c) Pengelolaan anggaran
- 3) Komite Sekolah berperan melakukan pengontrolan dalam ;
 - a) Perencanaan pendidikan di sekolah
 - b) Pelaksanaan Program di sekolah
 - c) Memantau output pendidikan
- 4) Komite Sekolah berperan memberikan mediasi dalam ;
 - a) Perencanaan sekolah
 - b) Pelaksanaan Program meliputi, kurikulum, PBM, Penilaian
 - c) Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana, dan anggaran

Lebih lanjut kegiatan terkait dengan fungsi manajemen tertuang dalam Dokumentasi 24(Lihat : Lampiran Dokumentasi)

Agar fungsi masyarakat dalam membantu sekolah dapat berjalan baik, maka indikator kinerja komite perlu dilakukan sesuai dengan pedoman yang ada. Peran komite sekolah dalam menjalankan fungsi manajemen dijabarkan dalam buku pemberdayaan dewan pendidikan dan komite sekolah (Depdiknas:2007 :18), dijelaskan mengenai indikator dewan dan komite sekolah yang telah berfungsi dengan baik adalah sebagai berikut :

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- 2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (institusi terkait)
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan dari masyarakat
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah dan sekolah tentang: kebijakan dan program pendidikan, kriteria kinerja daerah dan sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan hal-hal yang terkait dengan pendidikan
- 5) Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Selanjutnya Kegiatan operasional komite sekolah dalam rangka menjalankan fungsi manajemen telah diatur dalam buku indikator kinerja komite sekolah (Depdiknas : 2003, 20-22) mengenai kegiatan operasional komite sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya (Lihat Lampiran : Dokumentasi 25)

2. Partisipasi

b. Pengertian partisipasi

Partisipasi sering diartikan sebagai besarnya tenaga, dana atau barang yang disediakan dalam rangka mensukseskan suatu program.

Partisipasi merupakan bentuk kegiatan bagi seseorang dalam sebuah organisasi. Dalam kamus bahasa Inggris, partisipasi berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan yang berasal dari bahasa Inggris "*participation*" (John M. Echols dan Hasan Shadily. 2000:419).

Secara etimologi kata partisipasi, menurut Sukanto (2004:425) adalah dari bahasa Latin *parti cipatio* yang merupakan bagian dari dua kata *parti* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil. Kata *participatio* itu sendiri merupakan perkembangan dari *parti pare* yang kemudian dibedakan menjadi *participelo* yang berarti mengambil bagian atau ikut serta.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), partisipasi berarti keterlibatan kelompok atau masyarakat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

Menurut Sundari (2001:17), terdapat beberapa unsur penting yang tercakup dalam pengertian partisipasi, diantaranya: *Pertama*, dalam partisipasi yang ditelaah bukan hanya keikutsertaan secara fisik tetapi juga pikiran dan perasaan (mental dan emosional). *Kedua*, partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya kepada situasi kelompok sehingga daya kemampuan berfikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan kepada tujuan-tujuan kelompok. *Ketiga*, dalam partisipasi

mengandung pengertian orang untuk ikut serta dan bertanggungjawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu dengan tugas yang diberikan kepadanya, semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut. Beberapa hal yang berhubungan dengan partisipasi orang tua dan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan satu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Masyarakat akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki program tersebut.
- 3) Partisipasi merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Dari penjelasan diatas partisipasi berbeda dengan membantu, dan bekerja sama. Dalam membantu ada unsur hanya memberi tetapi secara emosional dan fisik orang tersebut tidak memberikan perannya. Sedangkan bekerja sama berarti ada unsur timbal balik untuk mencapai keuntungan masing-masing pihak jadi orang yang bekerja sama dia bekerja untuk tujuannya sendiri tidak berperan dalam mencapai tujuan kegiatan.

Sebagai sebuah komunitas konsumen pendidikan, masyarakat hendaknya perlu berperan dalam pendidikan terutama untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

menurut Sri Sundari(2001:13) ada beberapa peran masyarakat dalam pendidikan yaitu:

- 1) Menentukan tujuan dan aspirasi pendidikan
- 2) Menentukan kebijakan dan rencana-rencana sekolah
- 3) Menyediakan sumber-sumber yang diperlukan pendidikan
- 4) Mengorganisasi partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan seseorang secara fisik dan emosionalnya dengan dilandasi rasa tanggung jawab. Dengan adanya partisipasi diharapkan mampu mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat di dalam sekolah berarti keikutsertaan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi sekolah untuk mendukung kegiatan sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah.

c. Bentuk partisipasi

Partisipasi dalam dunia pendidikan, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan. Secara umum ada lima bentuk kegiatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk partisipasi:

- 1) Partisipasi uang
- 2) Partisipasi harta benda
- 3) Partisipasi tenaga
- 4) Partisipasi ketrampilan
- 5) Partisipasi Sosial (Sri Sundari, 2001: 18)

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka diperlukan ketelibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, peserta didik juga harus dapat merespon dan berkresasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

Sri Sundari(2001: 19) lebih lanjut mengelompokkan partisipasi dapat ditinjau dari tujuan, pengelolaan, frekuensi, langsung dan tidak langsung, serta kelembagaan sebagai berikut:

1) Partisipasi ditinjau dari segi tujuan, meliputi:

- a) Partisipasi berupa probilisasi, yaitu partisipasi yang bertujuan hanya untuk mendukung kebijaksanaan yang telah ditetapkan dari atas.
- b) Partisipasi saling menunjang, yakni partisipasi yang bertujuan tidak hanya mendukung kebijaksanaan yang telah ditetapkan akan tetapi juga mengoreksi serta mengisi kekurangan kebijakan tersebut.

2) Partisipasi ditinjau dari segi pengelolaan, meliputi:

- a) Partisipasi pada tahap perencanaan
- b) Partisipasi pada tahap pelaksanaan
- c) Partisipasi pada tahap evaluasi

3) Partisipasi ditinjau dari segi frekuensinya, meliputi:

- a) Partisipasi yang hanya dapat dilakukan secara periodik
- b) Partisipasi yang dilakukan tidak secara periodik.

4) Partisipasi ditinjau dari segi langsung tidak langsung, meliputi:

- a) Partisipasi langsung yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan.
- b) Partisipasi tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan dua cara: Pertama, orang atau warga masyarakat membentuk suatu kelompok, kemudian didalam kelompok tersebut orang atau warga masyarakat mengungkapkan partisipasinya. Kedua, orang-orang atau kelompok tertentu mengungkapkan masalah, kemudian kelompok mengolahnya.

5) Partisipasi ditinjau dari kelembagaan, meliputi:

- a) Partisipasi yang disampaikan secara perorangan tanpa adanya lembaga
- b) Partisipasi massa
- c) Partisipasi teratur melalui lembaga penengah yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan wakil-wakil diberbagai golongan masyarakat.

Menurut Cohen dan Uphoff (Siti Irene Astuti D, 2011: 61) menjelaskan bahwa partisipasi dibedakan terbagi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan gagasan dan ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut

untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan, administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai secara kuantitas dan kualitas. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini terkait dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian yang telah direncanakan sebelumnya.

Lebih konkret dijelaskan Depdiknas (2001), bahwa bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

- a) Pengawasan terhadap anak-anak.
- b) Tenaga yaitu sebagai sumber atau tenaga sukarela untuk membantu mensukseskan wajib belajar dan pelaksanaan KBM, serta memperbaiki sarana-prasarana baik secara individu maupun gotongroyong.
- c) Dana untuk membantu pendanaan operasional sekolah, memberikan bea siswa, menjadi orang tua asuh, menjadi sponsor dalam kegiatan sekolah dan sebagainya.
- d) Pemikiran yaitu memberikan masukan berupa pendapat, pemikiran dalam rangka menjaring anak-anak usia sekolah, menanggulangi anak-anak putus sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa Partisipasi uang, Partisipasi harta benda, Partisipasi tenaga, Partisipasi ketrampilan, Partisipasi Sosial. Sedangkan bentuk partisipasi tersebut dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.

3. Mutu sekolah

a. Pengertian

Manajemen sekolah dibuat agar pengelolaan sekolah untuk mencapai tujuan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Manajemen berbasis Sekolah sendiri dibuat dengan tujuan agar mutu sekolah terus berkembang, tidak hanya dimata pemerintah tetapi juga di mata masyarakat dan sekolah lain. Berdasarkan harapan itulah maka Sanusi(2010:14) mengemukakan, bahwa dalam konsep MBS aspek-aspek yang berpengaruh terhadap mutu sekolah perlu dikendalikan seccara komperhensif (menyeluruh) yaitu; (1) karakteristik mutu pendidikan, baik input, output, proses dan output, (2)pembiayaan, (3)metode penyampaian mata pelajaran, (4) pelayanan kepada siswa dan orangtua murid.

Secara umum mutu adalah gambaran karakteristik secara menyeluruh mengenai barang dan jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memeuaskan kebutuhan yang dharapkan. prinsip mencakup input, proses dan output pendidikan (Depdiknas:2001, 25). Menurut Jerry H.Makawimbang(2011:46) mutu merupakan hasil

terbaik yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap apa yang dilakukan sehingga mampu memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan tidak menerima keluhan dari pelanggan.

Edward Sallis(2010:49-50) mengemukakan bahwa ada dua konsep tentang mutu:

1) Konsep Absolut

Dalam pengertian absolut, mutu atau kualitas identik dengan sifat kebaikan, keindahan, kebenaran, yakni sesuatu yang ideal dalam pengertian ini, sesuatu yang berkualitas adalah sesuatu yang memenuhi standar tertinggi yang tidak ada bandingnya.

2) Konsep Relatif

Menurut konsep ini mutu bukan suatu atribut sesuatu dalam produk atau jasa. Tetapi apa yang dipersyaratkan terhadap sesuatu, sesuatu dianggap bermutu apabila memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ada dua aspek dalam penilaian definisi relatif. Pertama menentukan spesifikasi/ persyaratan yang dibutuhkan. Kedua, cocok dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa, mutu adalah kualitas yang dihasilkan dari sebuah produk dengan mencapai sebuah standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan dengan penilaian dari input, proses dan output. Dalam tingkat satuan pendidikan produk disini adalah siswa, dimana siswa yang memiliki mutu berarti telah mencapai kompetensi sesuai standar yang telah ditentukan.

b. Prinsip mutu pendidikan

Untuk mencapai peningkatan mutu pendidikan. Maka setiap dimensi mutu dalam sekolah harus tercapai terlebih dahulu. Aspin(1993) mengemukakan adanya empat dimensi mutu yang harus tercapai:

- 1) *Equity* (keadilan) yaitu setiap orang: siswa tenaga pendidikan dan karyawan mendapat kesempatan sama untuk mengembangkan kapasitas dan kualitas diri secara optimal.
- 2) *Excellene* (keunggulan) sekolah dan sistemnya selalu berusaha mengidentifikasi potensi anak didik dan menyediakan sumber-sumber yang lebih banyak baik waktu, energi, dan uang untuk mencapai kemampuan maksimal.
- 3) *Democracy* yaitu sekolah mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada seluruh komponen pendidikan baik guru, siswa maupun karyawan

Nilai demokrasi yang harus dikembangkan:

- a) Kebijakan tindakan yang diambil sekolah didasarkan pada keputusan musyawarah.
- b) Keputusan diambil berdasarkan "*rational discourse*"
- c) Setiap anggota memiliki kebebasan atau kesempatan memberikan suara, masukan, dan kritik.
- d) Menghormati keputusan sebagai cermin dari kehendak mayoritas.
- e) Menghormati hak-hak minoritas.
- f) Ada "*check and balance*"

4) *Justice*

Agar peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan/ sekolah dapat tercapai maka, setiap sekolah harus memiliki prinsip dalam tahapan peningkatan mutu. Dalam upaya menanamkan budaya mutu kepada dunia pendidikan Dr. W. Edward Deming mengembangkan konsep melalui butir-butir perkara yang dibutuhkan untuk mengembangkan budaya mutu. Butir-butir tersebut dinamakan 'hakikat mutu dalam pendidikan" yaitu:

- 1) Menciptakan konsistensi tujuan. Konsistensi tujuan berguna untuk memperbaiki layanan dan sisea diaksudkan untuk menjadikan sekolah yang kompetitif dan berkelas dunia.
- 2) Mengadopsi filosofi mutu total. Sistem sekolah mesti menyambut baik tantangan untuk berkomptesisi dalam seuah perokonomian global. Setiap anggota sistem sekolah mesti belajar ketrampilan baru untuk mendukung revolusi mutu. Berusaha menerima tantangan mutu, melakukan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap mutu produk dan jasa serta menjalankannya secara efisien dan produktif.
- 3) Mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan pengujiandan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kenerja siswa yang bermutu.

- 4) Menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Menilai bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Bekerjasama dengan orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu siswa menjadi bagian dalam sistem pengelolaan sekolah.
- 5) Memperbaiki mutu produktivitas serta mengurangi biaya. Dengan melembagakan proses "rencanakan/periksa/ubah". Mengidentifikasi mata rantai kostumer, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan, menerapkan perubahan, melakukan penilaian dan mengukur hasilnya. Kemudian menerapkan standar dari hasil pengukuran sehingga akan mencapai standar yang lebih tinggi pada proses berikutnya.
- 6) Belajar sepanjang hayat. Mutu dapat diraih dengan latihan. Merubah mutu berarti merubah perangkat yang digunakan dalam latihan. Pelatihan akan menghasilkan proses kerja baru atau memperbaiki proses kerja yang lama.
- 7) Kepemimpinan dalam pendidikan. Manajer dalam pendidikan mesti mengembangkan visi dan misi untuk wilayah, sekolah dan jurusan. Visi misi harus diketahui dan didukung oleh guru, staf, siswa, orangtua, dan komunitas. Mutu harus terintegrasi dalam pernyataan visi dan misi.
- 8) Mengeliminasi rasa takut. Melenyapkan rasa takut karena dari wilayah, sekolah atau jurusan, akan membuat orang bekerja secara efektif untuk memperbaiki sekolah. Menciptakan

lingkungan yang demokratis dalam rangka menciptakan perbaikan dari dalam.

- 9) Mengeliminasi hambatan keberhasilan. Manajemen bertanggung jawab menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam tugasnya. Membentuk sistem kerja yang dinamakan tim. Dan membuat strategi gerakan untuk memecahkan masalah.
- 10) Menciptakan budaya mutu. Menciptakan budaya mutu yang mengembangkan tanggung jawab bukan pada tim, tetapi pada setiap orang.
- 11) Perbaikan proses. Mencari solusi dalam masalah bukan mencari kesalahan orang. Menghargai orang yang mendorong terjadinya perbaikan.
- 12) Membantu siswa berhasil. Selalu berupaya mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas dengan kualitas yang baik.
- 13) Komitmen. Manajemen mesti memiliki komitmen untuk mendukung memperkenalkan cara baru dalam sistem pendidikan. Manajemen mendukung dengan selalu berupaya memberikan sarana untuk mencapai tujuan.
- 14) Tanggung jawab. Biarkanlah setia orang bekerja menyelesaikan transformasi mutu. Transformasi merupakan tugas setiap orang.

c. Indikator Keberhasilan mutu

Melalui penerapan prinsip-prinsip mutu diatas, diharapkan akan menjadikan kualitas sekolah menjadi lebih baik. Dalam sebuah

penerapan program sekolah, keberhasilan yang dicapai ditandai dengan terwujudnya tujuan dan visi misi sekolah. Terwujudnya visi misi dan tujuan sekolah menunjukkan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah. Pelayanan dan prestasi yang lebih baik di sekolah menjadi indikasi adanya perbaikan mutu di sekolah.

Menurut Nurkolis(2003: 271-282) dijelaskan beberapa indikator keberhasilan mutu dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah. *Pertama*, apabila jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat. Terutama dalam pemecahan masalah ekonomi bagi calon siswa dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. *Kedua*, kualitas layanan pendidikan menjadi lebih baik. Baik layanan dalam layanan akademik dan non-akademik. *Ketiga*, tingkat tinggal kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik dalam arti rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dan jumlah siswa yang lulus meningkat.

Keempat, adanya perbaikan relevansi penyelenggaraan pendidikan disekolah karena prgram-program sekolah dibuat bersama antar sekolah dengan masyarakat. *kelima*, adanya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara pukul rata, tetapi berdasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga siswa. *Keenam*, meningkatnya peran serta masyarakat terutama dalam pengambilan keputusan menyangkut keputusan instruksional maupun organisasional.

Ketujuh, adanya perbaikan iklim dan budaya kerja dalam sekolah. Sehingga warga sekolah yang ada didalamnya akan merasa aman dan nyaman dalam menjalankan kegiatan atau tugasnya. *Kedelapan*, kesejahteraan guru dan staf sekolah menbaik antara lain karena sumbangan pemikiran, tenaga dan dukungan dana dari masyarakat luas. *Kesembilan*, apabila indikator-indikator tersebut telah tercapai, maka akan tercipta demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Demokratisasi ini merupakan sasaran jangka panjang dalam penyelenggaraan sekolah.

Menurut Townsend dan Butterworth(1992) yang dikutip Jerry H.Makawimbang(2011:51) dikemukakan bahwa, ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni :

- a) Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah.
- b) Partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf.
- c) Proses belajar-mengajar yang efektif.
- d) Pengembangan staf yang terprogram
- e) Kurikulum yang relevan.
- f) Memiliki visi dan misi yang jelas.
- g) Iklim sekolah yang kondusif.
- h) Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan.
- i) Komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal.
- j) Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intristik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang memiliki tingkatan mutu telah ditentukan melalui standar mutu. Sekolah yang

bermutu berarti telah memberikan jaminan mutu dengan satandar yang telah diatur. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, standar mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Reepublik Indonesia No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan, ada 8 aspek yang diukur yaitu :

1) Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendikbud No.54 tahun 2013

2) Standar Isi

Standar isi diatur dalam Permendikbud No.64 Tahun 2013.

3) Standar Proses

Standar Proses diatur dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses.

4) Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam beberapa peraturan menteri. Diantaranya adalah Permendiknas No. 13 Tahun 2007 mengenai standar Kepala Sekolah. Kualifikasi minimal Pengawas sekolah/madrasah diatur dalam Permendiknas No.12 Tahun 2007. Standar guru diatur dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007.

5) Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan diatur dalam PP No.17 Tahun 2010.

6) Standar Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana SMK diatur dalam Permendiknas No. 40 Tahun 2008.

7) Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No.69 Tahun 2009.

8) Standar Penilaian Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan diatur dalam Permendikbud No.66 Tahun 2013.

Berdasarkan pendapat ahli dan peraturan mengenai standar pendidikan, dapat ditarik kesimpulan mengenai indikator keberhasilan mutu dalam sekolah adalah telah tercapainya kualifikasi komponen-komponen di dalam sekolah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dengan kerjasama dan saling support dari masing-masing komponen sekolah.

4. Manajemen berbasis sekolah

a. Pengertian Manajemen

Dalam upaya mencapai mutu layanan yang ingin dicapai, setiap sekolah diharapkan mampu mengelola sebuah sistem yang memberikan kemudahan baik bagi sekolah maupun masyarakat. sistem yang dirancang dengan sebuah pengaturan tertentu biasanya disebut dengan manajemen. Dengan menerapkan sistem tertentu maka kegiatan yang ada didalamnya merupakan bagian dari manajemen yang diterapkan disana. Dalam dunia pendidikan, manajemen erat kaitannya dengan pengaturan pelayanan

pendidikan. Maka istilah manajemen biasanya sering disebut juga dengan pengelolaan, atau pengaturan.

Dari wikipedia menjelaskan kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti "seni melaksanakan dan mengatur. Itu berarti manajemen digunakan dengan menggunakan cara tertentu dalam melaksanakan dan mengatur kegiatan yang ada.

Engkoswara dan komariah(2011:85) menyatakan bahwa terdapat 3 fokus untuk mengartikan manajemen:

- 1) Manajemen sebagai kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada ketrampilan dan kemampuan manajerial yang dikualifikasikan menjadi kemampuan/keterampilan teknis manusiawi dan konseptual.
- 2) Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen.
- 3) Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (*style*) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.

Menurut Suharsimi Arikunto(2008), manajemen adalah rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Suharsimi juga menjelaskan bahwa dalam manajemen terdapat 3 unsur yaitu gerak, orang dan arah kegiatan. Jadi, manajemen

tersebut merupakan kerja yang terjadi dalam sebuah organisasi bukan merupakan kerja tunggal yang dilakukan oleh individu.

Lebih lanjut Suharno(2008:1) menegaskan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi keutuhan. Manajemen merupakan proses sedangkan manajer dikaitkan dengan aspek organisasi dan bagaimana mengatur sehingga tercapai tujuannya.

Pendidikan sendiri, dalam Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Lebih lanjut Achmad Sanusi(2007:7) mengartikan bahwa manajemen pendidikan merupakan kegiatan mengelola berbagai sumber daya pendidikan untuk mewujudkan fungsi dan peran lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu berarti bahwa setiap komponen pendidikan akan bekerja untuk mencapai tujuan berdasarkan fungsi masing-masing demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Menurut Engkoswara dan komariah(2011:87) manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan

mendayagunakan segala sumber efisien untuk mencapai tujuan secara efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sistem yang mengatur dan mengelola komponen-komponen didalamnya untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan. Setiap komponen dituntut untuk terlibat/ berpartisipasi dalam bentuk apapun untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan sistem yang mengatur dan mengelola komponen-komponen pendidikan untuk dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan.

b. Pengertian MBS

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Seperti diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 31 'setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan'. Sebagai perwujudan dari undang-undang tersebut maka lahirlah istilah wajar 9 tahun, atau wajar 12 tahun. Selain memperoleh pendidikan, setiap warga juga berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan, sering kita dengar istilah mengenai manajemen. Dengan menerapkan sistem tertentu maka kegiatan yang ada didalamnya merupakan bagian dari manajemen yang diterapkan disana. Dalam dunia pendidikan, manajemen erat kaitannya dengan pengaturan pelayanan pendidikan. Maka istilah manajemen biasanya sering disebut juga dengan pengelolaan, atau pengaturan.

Manajemen Berbasis sekolah pertama kali bergulir sejak terjadi adanya kebijakan otonomi pada masa reformasi. Sebagai perwujudan bentuk otonomi maka, sistem pelayanan yang dulunya bersifat makro dialihkan menjadi bersifat mikro. Sistem manajerial yang bersifat mikro ini lebih efektif untuk diterapkan dan memudahkan pengawasan. Dimensi-dimensi pengelolaan manajemen akan berubah sebagai perwujudan otonomi pendidikan nasional. Seperti diterangkan dalam buku 1 manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah

Tabel 1. Dimensi-dimensi perubahan pola manajemen pendidikan

Pola lama	Menuju	Pola baru
Subordinasi	=>	Otonomi
Pengambilan keputusan terpusat	=>	Pengambilan keputusan partisipatif
Ruang gerak kaku	=>	Ruang gerak luwes
Pendekatan birokratik	=>	Pendekatan profesional
Sentralistik	=>	Desentralistik
Diatur	=>	Motivasi diri
Overregulasi	=>	Deregulasi
Mengontrol	=>	Mempengaruhi
Mengarahkan	=>	Memfasilitasi
Menghindari resiko	=>	Mengelola resiko
Gunakan uang semuanya	=>	Gunakan uang seefisien mungkin
Individual yang cerdas	=>	Teamwork yang cerdas
Informasi terpribadi	=>	Informasi terbagi
Pendelegasian	=>	Pemberdayaan
Organisasi herarkis	=>	Organisasi datar

Sumber :Depdiknas(2000).

Secara leksikal, Nurkolis(2003) menjelaskan bahwa, Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) berasal dari 3 kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran.

Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

Selanjutnya Nurkolis (2003) juga merumuskan bahwa MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut maka peran sekolah akan meningkat. Bukan hanya sebagai penanggung jawab, teknik dan cara sekolah yang diterapkan untuk melaksanakan program sekolah akan menentukan perkembangan sekolah.

Dalam buku manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (depdiknas,2000:3)diterangkan mengenai pengertian MPMBS.

"Secara umum manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah(MPMBS) dapat diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah(stake holders) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Dari pengertian ini terlihat baha

sekolah memiliki kewenangan lebih besar dari sebelumnya untuk mengelola sekolahnya dan pengambilan keputusan partisipatif merupakan esensi MPMBS.”

Suharno(2008:39) menjelaskan bahwa secara umum MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orangtua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan nasional. Pemberian otonomi akan berguna untuk mengembangkan program secara mandiri dengan prioritas yang lebih pasti sehingga sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Sejalan dengan alasan tersebut, manajemen berbasis sekolah perlu dikelola dengan baik dengan berdasarkan pada prinsip yang kuat. Menurut Nurkholis(2003:52-55), ada 4 prinsip yang diterapkan dalam mengelola Manajemen berbasis Sekolah diantaranya:

1) Prinsip ekuifinalitas

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern dimana tujuan organisasi dapat dicapai dengan cara yang berbeda-beda. Manajemen Berbasis Sekolah menekankan fleksibilitas yang membuat sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi masing-masing. Kompleksnya perbedaan masalah antar sekolah menjadikan struktur pengelolaan standar tidak dapat dijaankan di seluruh kota, provinsi apalagi negara. Pengelola sekolah dituntut untuk dapat fleksibel dalam menangani berbagai

masalah yang timbul. Sekolah harus dapat menyelesaikan masalah dengan tepat sesuai dengan caranya sendiri.

2) Prinsip desentralisasi

Prinsip desentralisasi didasarkan pada teori bahwa pengelolaan sekolah dan aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari berbagai kesulitan dan permasalahan. Prinsip ekuifinalitas mendorong adanya desentralisasi kekuasaan dengan mempersilakan sekolah untuk memecahkan masalah dengan caranya sendiri. Tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam memecahkan masalah. Karena itu sekolah yang menerapkan MBS harus dapat menemukan masalah, dan memecahkannya secepat mungkin agar dapat memberikan waktu yang lebih banyak terhadap efektivitas dalam pengajaran dan pembelajaran.

3) Prinsip pengelolaan mandiri

Melalui prinsip pengelolaan mandiri, sekolah diberikan kewenangan untuk menangani masalah secara mandiri, dengan sistem pengelolaan mandiri dan dibawah kebijakan sendiri. Teori ini didasarkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dengan cara yang berbeda-beda. Dengan adanya pengelolaan mandiri sekolah lebih memiliki inisiatif dan tanggung jawab terhadap sekolah.

4) Prinsip inisiatif manusia

Sejalan dengan peningkatan ilmu perilaku dan manajemen moden, maka faktor yang memiliki pengaruh penting dalam efektivitas organisasi adalah faktor manusia. Perspektif SDM menekankan bahwa sumber daya berharga dalam organisasi sehingga pin manajemen SDM adalah mengembangkan manusia yang inisiatif. Manusia merupakan sumber daya yang dinamis sehingga potensi dalam sumber daya manusia harus terus digali, ditemukan dan dikembangkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengkoordinasian dan pengelolaan sumberdaya sekolah yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara mandiri oleh sekolah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dengan prinsip tertentu untuk meningkatkan mutu sekolah.

Melalui prinsip itulah dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan yang baik harus didukung oleh sumberdaya yang baik pula. SDM sebagai sumberdaya yang dapat dikembangkan memberikan peluang bagi sekolah untuk dapat mengembangkan program sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek SDM. Demikian juga dengan masyarakat dalam sekolah, potensi masyarakat yang ikut berperan dalam MBS dapat terus digali dan dikembangkan untuk perkembangan sekolah.

c. Tujuan

Sejalan dengan pengembangan otonomi daerah, ada beberapa tujuan yang ingin diraih melalui penerapan MPMBS(nurkholis, 2003:27),:

- 1) Sekolah mengetahui kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah. Dengan demikian sekolah dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan melakukan kegiatan yang dapat menguatkan posisi sekolah.
- 2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Input pendidikan yang perlu dikembangkan dan digunakan kepada peserta didik berbeda-beda di tiap sekolah. Sehingga program yang menjadi prioritas harus didahulukan.
- 3) Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua dan masyarakat. Sekolah peran sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutunya. Agar pelaksanaan dapat maksimal, maka partisipasi dan perencanaan peningkatan mutu perlu dioptimalkan.
- 4) Sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya partisipasi masyarakat sekolah dapat berupaya membangun sekolah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik yang berbeda dengan sekolah lain. Selain itu sekolah juga mempunyai program unggulan yang berbeda dengan sekolah lain.

Menurut Suharno(2008:40), ada 8 point yang menjadi alasan mengapa Manajemen berbasis Sekolah diterapkan.

- 1) Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolah.
- 2) Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaga, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan diadanya gunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
- 3) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah karena pihak yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
- 4) Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat.
- 5) Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi sehat.
- 6) Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan.

- 7) Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.
- 8) Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah cepat.

d. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah

Secara operasional Manajemen berbasis sekolah didefinisikan sebagai pelaksanaan fungsi manajemen terhadap semua komponen pendidikan di sekolah (Heri Suderajat:2005). Oleh karena itu ruang lingkup MBS dapat digambarkan seperti dalam matriks pada bagan berikut:

Tabel 2. Ruang lingkup komponen pendidikan terhadap fungsi manajemen

Fungsi manajemen Komp. Pendidikan	Perencanaan (A)	Pengorganisasian (B)	Penggerakan (C)	Pengawasan (D)	Evaluasi (E)
1. Kurikulum	A.1	B.1	C.1	D.1	E.1
2. personalia	A.2	B.2	C.2	D.2	E.2
3. kesiswaan	A.3	B.3	C.3	D.3	E.3
4. sarana prasarana	A.4	B.4	C.4	D.4	E.4
5. keuangan	A.5	B.5	C.5	D.5	E.5
6. lingkungan	A.6	B.6	C.6	D.6	E.6

Menurut Ali Imron(2011), ruang lingkup dalam manajemen berbasis sekolah dibagi dalam manajemen yang lebih kecil. Manajemen berbasis sekolah meliputi manajemen pembelajaran berbasis sekolah, Manajemen peserta didik berbasis sekolah, manajemen tenaga kependidikan berbasis sekolah, manajemen

keuangan berbasis sekolah, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, manajemen layanan khusus pendidikan berbasis sekolah.

Depdiknas(2001:11-20) menjelaskan, bahwa dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, sekolah harus paham mengenai isi dari manajemen yang diterapkan tersebut. Ruang lingkup merupakan pembagian isi manajemen yang bila dilaksanakan dengan tepat akan menjadikan sekolah yang efektif (*effective school*). Agar isi tercapai dengan baik sekolah perlu memahami karakteristik MPMBS. Karakteristik MPMBS memuat secara inklusif elemen-elemen yang menjadikan sekolah efektif. Untuk mengurai karakteristik MPMBS maka dilakukan dengan pendekatan sistem input-proses dan output. Mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, baru proses dan input, maka uraian dimulai dari tingkat output.

1) Output yang diharapkan

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah restasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen disekolah. Output sekolah diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu output prestasi akademik dan output prestasi non akademik prestasi akademik. misalnya, NEM, omba karya ilmiah remaja, lomba bahasa inggris, matematika, fisika, cara-cara berfikir(kritis, divergen, nalar, rasional, induktif, deduktif, dan ilmiah). Prestasi non akademik misalnya rasa ingin

tahu yang tinggi, kejujuran, harga diri, kerjasama, kasih sayang, solidaritas, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olahraga, kesenian, pramuka.

2) Proses

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik proses sebagai berikut:

a) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi

Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Ini ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. PBM bukan sekedar memorisasi dan recall, bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengeahuan tentang apa yang diajarkan(logos), akan tetapi apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati(ethos) serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik(pathos). PBM yang efektif menekankan pada belajar mengetahui, belajar mengerjakan, belajar bekerjasama dan belajar menjadi diri sendiri.

b) Kepemimpinan sekolah yang kuat

Pada sekolah yang menerapkan MPMBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyasikan semua sumberdaya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor yang mendorong sekolah untuk mewujudkan

visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Kepala sekolah yang tangguh memiliki kemampuan mobilisasi sumberdaya sekolah terutama sumberdaya manusia, untuk mencapai tujuan sekolah.

c) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib

Sekolah memiliki lingkungan belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga PBM dapat berlangsung dengan nyaman.

d) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif

Dalam MPMBS, pengelolaan tenaga kependidikan secara terus menerus agar mendapatkan peningkatan terutama mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengelolaan meliputi analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, hingga imbal jasa.

e) Sekolah memiliki budaya mutu

Sekolah yang memiliki budaya mutu harus memiliki elemen mutu sebagai berikut (a) informasi kualitas digunakan untuk perbaikan, (b) kewenangan sebatas tanggung jawab, (c) hasil harus diikuti penghargaan atau sanksi, (d) kolaborasi dan sinergi menjadi basis kerjasama, (e) warga sekolah yang aman, (f) keadilan harus ditanamkan, (g) imbal jasa sepadan dengan nilai kerja, (h) warga sekolah memiliki sekolah.

f) Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis

Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan individual. Karena itu, kerjasama antar fungsi dan antar warga dalam sekolah harus menjadi kebiasaan sehari-hari.

g) Sekolah memiliki kewenangan(kemandirian)

Sekolah punya kewenangan melakukan yang terbaik bagi sekolah. Untuk membentuk sekolah yang mandiri harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas.

h) Partisipasi tinggi dari warga sekolah dan masyarakat

Partisipasi warga sekolah dan masyarakat menjadi bagian kehidupan sekolah hal ini dilandasi keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa memiliki makin besar rasa tanggung jawab, makin besar tanggung jawabnya makin besar pula dedikasinya untuk sekolah.

i) Sekolah memiliki keterbukaan(transparansi)

Keterbukaan sekolah dapat diwujudkan melalui pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya dengan cara melibatkan pihak-pihak terkait alat kontrol.

j) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah (psikologi dan fisik)

Perubahan merupakan 'sesuatu yang menyenangkan' bagi warga sekolah. Perubahan yang bersifat fisik maupun psikologis dimana setiap perubahan yang terjadi akan memberikan hasil yang lebih baik terutama dalam meningkatkan mutu.

k) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Evaluasi belajar yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses mengajar di sekolah. Karena itu fungsi evaluasi penting untuk meningkatkan mutu peserta didik dan sekolah. Untuk melakukan perbaikan secara terus menerus harus ada sistem mutu yang baku sebagai acuan. Diantaranya struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu.

l) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan

Sekolah selalu tanggap terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Selain itu sekolah harus dapat mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi. Menjemput bola adalah padanan kata yang tepat bagi istilah antisipatif.

m) Komunikasi yang baik

Sekolah yang efektif memiliki komunikasi yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. dengan cara ini ketepaduan semua kegiatan sekolah diupayakan mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah dipatok. Komunikasi yang baik akan membentuk *teamwork* yang kuat, kompak, dan cerdas, sehingga kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah.

n) Sekolah memiliki akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan sekolah kepada pemerintah, orang tua murid dan masyarakat tentang keberhasilan program. Dengan hasil yang dilaporkan, pemerintah dapat menilai ketercapaian program sudah sesuai atau belum. Demikian juga dengan orang tua murid, mereka akan tahu seberapa besar keberhasilan program terhadap peningkatan prestasi anaknya. Dengan cara seperti ini sekolah tidak akan main-main dalam melaksanakan program.

o) Sekolah memiliki sustainabilitas

Sekolah harus memiliki sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya agar tetap hidup (buka). Kebanyakan sekolah tutup karena tidak sanggup mempertahankan sustainabilitasnya. Sekolah yang tidak sustainabilitas karena ketiadaan sumberdaya yang memadai untuk hidup terus. Contohnya: sekolah akan tutup kalau proyek yang membiayainya habis. Sekolah yang tidak sustainabilitas lama-kelamaan akan ditinggalkan *stakeholder*-nya. Akhirnya sekolah tersebut akan tutup.

3) Input pendidikan

a) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas

Secara formal sekolah menyatakan tentang kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah berkaitan dengan mutu yang dinyatakan oleh kepala sekolah. Kemudian disosialisasikan kepada warga sekolah sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan,

hingga kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah. Dengan begitu warga sekolah memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan kebijakan sekolah.

b) Sumberdaya tersedia dan siap

Sumberdaya dibutuhkan sebagai input dalam proses pendidikan. Dalam MPMBS sumberdaya yang akan digunakan harus siap baik sumberdaya manusia maupun sumber daya selebihnya. Sumberdaya yang ada harus siap untuk digunakan, tidak harus mahal tatapai mampu digunakan untuk mencapai sasaran dan mampu memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar.

c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi

Bagi sekolah yang menginginkan efektifitas tinggi dalam sekolah, maka staf yang ada merupakan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap sekolah.

d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi

Setiap warga sekolah harus memiliki motivasi untuk meraih prestasi. Kepala sekolah harus dapat berkomitmen untuk memberikan motivasi dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Guru memiliki komitmen dan motivasi untuk membawa anak didiknya meraih prestasi maksimal. Peserta didik memiliki motivasi untuk meningkatkan diri sesuai bakat dan kemampuan.

e) Fokus pada pelanggan (khususnya siswa)

Tujuan semua input dan proses adalah untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Menciptakan iklim pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Konsekuensinya, sekolah harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang dapat mewujudkan peningkatan mutu dan kepuasan siswa.

f) Input manajemen

Kepala sekolah mengatur kegiatan dengan sejumlah input manajemen. Input manajemen akan membantu kepala sekolah mengelola dengan efektif. Input manajemen meliputi: tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis, program yang mendukung, ketentuan (aturan main). Dengan sistem pengendalian yang baik akan meyakinkan warga sekolah dalam mencapai sasaran.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Junaedi(2011) dengan judul KONTRIBUSI "PERAN KOMITE SEKOLAH TERHADAP MUTU LAYANAN PENDIDIKAN DI SMK N 1 DEPOK". Diperoleh hasil bahwa kontribusi peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu layanan sekolah seperti ditunjukkan dalam hasil koefisien determinan, diperoleh hasil sebesar 28,73%. Hasil tersebut merupakan prosentase peran komite sekolah. Sedangkan peningkatan mutu layanan sebesar 71,27% dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil tersebut, diketahui bahwa peran komite sudah cukup besar. Perlu ada perhatian khusus dari seluruh warga sekolah atau satuan pendidikan

Dalam jurnal ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan yang dilakukan oleh Atus Sundari dan Rahayu Sulistiowati dengan judul DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH (Studi Pada Pendidikan Berbasis Sekolah di SMK N 1 Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat) didapatkan hasil mengenai penerapan MBS di SMK N 1 Pesisir Tengah. Bahwa pelaksanaan MBS di SMK tersebut belum berjalan dengan baik karena beberapa hal. *Pertama*, perencanaan evaluasi belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. *kedua*, pengelolaan kurikulum dan proses belajar mengajar belum berjalan baik karena tidak didukung fasilitas yang memadai. *Ketiga*, kemandirian sekolah belum tercapai karena masih bergantung pada anggaran pemerintah dan masyarakat, padahal memiliki potensi yang besar dilingkungannya. *Keempat*, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat belum berjalan dengan baik khususnya masyarakat dunia industri. *Kelima*, peran serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan belum berjalan optimal.

Berdasarkan uraian diatas tergambar bahwa pelaksanaan penerapan MBS di SMK N 1 Pesisir Tengah belum optimal. Partisipasi masyarakat belum nampak dalam pengelolaan kurikulum, kbm, kemandirian sampai dengan evaluasi. Peran serta masyarakat disini kurang maksimal karena faktor sosial di masyarakat. selain itu juga peran keterwakilan masyarakat dalam komite sekolah juga belum maksimal.

C. Kerangka Berpikir

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berperan langsung dalam rangka mencerdaskan bangsa. Agar pelayanan sekolah dapat terlaksana

dengan baik maka dibutuhkan pengelolaan sekolah yang baik. Salah satu pengelolaan yang diterapkan adalah Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan di satuan pendidikan/ sekolah dengan harapan sekolah dapat mengembangkan fungsi manajerial dalam sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan dengan cara sekolah itu sendiri.

Untuk meningkatkan perkembangan dan mutu sekolah, maka diperlukan peran banyak pihak dalam membantu mempercepat pengembangan mutu sekolah. Salah satu upaya sekolah adalah dengan cara mengoptimalkan peran masyarakat. Sebagai konsumen pendidikan, masyarakat perlu dilibatkan dalam manajemen sekolah agar masyarakat sadar terhadap pendidikan sehingga masyarakat tidak sungkan untuk membantu sekolah. Sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan, maka dibentuk komite sekolah.

Komite sekolah dibentuk untuk membantu sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Untuk mempermudah bentuk kerja dari komite sekolah, ada beberapa peran komite sekolah yang dapat dilakukan yaitu peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan(*advisory agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung(*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pengontrol(*controlling agency*) dan peran komite sebagai badan penghubung(*mediator agency*). Dengan mengoptimalkan peran komite sekolah, diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah terutama dalam mutu

pelayanan dan output sekolah. Secara skematis kerangka berpikir dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1.
Kerangka Berpikir Penelitian
(Sumber:Penulis)

D. Pertanyaan Penelitian

1. a. Berapa besar partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan(*Advisory Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta ?
- b. apa saja partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan(*Advisory Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta ?

2. a. Berapa besar partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung (*Support Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
b. Apa saja bentuk partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung (*Support Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
3. a. Berapa besar partisipasi komite sekolah sebagai badan pengawas(*Control Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
b. Apa saja bentuk partisipasi komite sekolah sebagai badan pengawas (*Control Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
4. a. Berapa besar partisipasi komite sekolah sebagai badan penghubung (*Mediator Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
b. Apa saja bentuk partisipasi komite sekolah sebagai badan penghubung (*Mediator Agent*) dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?
5. Apa saja kendala partisipasi komite sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah di SMK N 3 Yogyakarta?

BAB III

METODDE PENELITIAN

A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala dan keadaan (Suharsimi Arikunto, 1995:310). Untuk keabsahan data digunakan logika "triangulasi" dimana temuan dari satu jenis studi dicek pada temuan yang diperoleh melalui studi yang lain. Dengan tujuan memperkuat kesahihan temuan-temuan(Alan Bryman dalam Julia Brannen, 2005:84). Data kuantitatif diperoleh melalui angket. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Metode Triangulasi yang digunakan merupakan triangulasi antar-metode dimana beberapa metode yang berbeda digunakan dalam kaitan dengan objek studi yang sama, masalah substansif yang sama dan lain-lain(Julia Brannen, 2005:20). Dalam penelitian yang telah dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam hal ini komite sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMK N 3 Yogyakarta. Waktu pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan dari awal sampai akhir

penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2015- bulan Oktober 2015.

C. VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Variabel Penelitian

Dalam melakukan penelitian, variabel penelitian perlu ditentukan dahulu. Menurut Sugiyono(2010:60) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini variabel yang diambil adalah partisipasi komite sekolah, sedangkan sub variabel meliputi peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, peran komite sekolah sebagai badan pendukung, peran komite sekolah sebagai badan pengontrol dan peran komite sekolah sebagai badan penghubung. Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa besar peran komite sekolah khususnya dalam peningkatan mutu manajemen sekolah, sesuai dengan peran yang harus dijalankan menurut teori yang ada.

2. Definisi Operasional

Partisipasi komite sekolah merupakan bentuk ambil bagian atau keikutsertaan anggota komite sebagai perwakilan masyarakat dalam meningkatkan mutu manajemen berbasis sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.44 tahun 2002 mengenai Dewan Pendidikan. Bentuk partisipasi komite sekolah dalam hal ini mencakup peran komite sebagai badan pertimbangan (*advisory*)

sekolah, badan pendukung, badan pengawas, dan badan penghubung (*mediator*) antara sekolah dengan masyarakat lain. Peran tersebut disesuaikan dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

D. SUBYEK PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian populasi. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan (Margono, 2003:118). Penelitian populasi dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan karakteristik yang diukur. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Subjek dalam penelitian ini melibatkan pengurus komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh anggota tetap dalam pengurus harian komite sekolah SMK N 3 Yogyakarta periode 2013-2016 yang berjumlah 11 orang. . Selain itu ada responden wawancara yang bersifat purposif yang dipilih oleh peneliti karena dianggap mengetahui masalah yang sedang dikaji yaitu Ketua Komite, sekretaris komite, dan ketua program keahlian Teknik Kendaraan Ringan SMK N 3 Yogyakarta. Responden ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan selama pengumpulan data.

Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan mengenai subjek penelitian dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Responden

NO.	UNSUR KEANGGOTAAN	JUMLAH
Subjek angket		
1	Praktisi pendidikan	2 Orang
2	Unsur Sekolah	4 Orang
3	Orang Tua	4 Orang
4	DU/DI	1 Orang
Subjek wawancara		
5	Ketua komite	1 Orang
6	Sekretaris komite	1 Orang
7	Kepala Program Keahlian	1 Orang

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

1. Angket atau Kuesioner

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Angket atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner terbuka (kuesioner tidak terstruktur). Angket atau kuesioner yang disajikan disusun dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden dapat memilih salah satu jawaban dengan memberikan tandan *checklist*. Setelah itu responden diminta memberikan pernyataan atas jawaban yang telah dipilih.

Penyebaran angket digunakan untuk mengetahui peran serta komite sekolah dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Menurut Sugiyono (2010:139) untuk mendapatkan

jawaban yang tegas terhadap suatu masalah yang ditanyakan maka skala yang digunakan adalah skala guttman. Pilihan jawaban yang digunakan adalah "pernah-tidak pernah".

Angket ini diberikan kepada kepala Komite dan seluruh anggota komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta. Angket ini digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data partisipasi komite sekolah dalam peningkatan mutu Manajemen Berbasis Sekolah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa buku, dokumen, foto, dan data relevan lainnya. Pengambilan data dokumentasi dilakukan untuk mengambil data yang bisa menguatkan angket dari responden. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga peneliti menyusun pedoman dokumentasi secara sistematis sesuai dengan angket.

Menurut Moleong (2011 : 217) dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan juga untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Dalam penelitian ini dokumen sebagai penguji dan penguat data dari kuesioner. Dengan penyusunan sistematis dari kuesioner, data kuesioner akan didukung dengan data dokumentasi.

3. Wawancara

Wawancara(*interview*) adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara

lisan juga(Margono, 2003 :165). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai peran komite sekolah menurut pandangan responden. Selain itu, untuk memperoleh penjelasan dari indikator yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan setelah ada kesepakatan waktu wawancara sehingga tidak mengganggu responden.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, dan keyakinan subyek, atau tentang keterangan lain(Margono, 2003:167). Wawancara ini untuk mengungkap pandangan seseorang terhadap peran komite sekolah dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Penyusunan instrumen dilakukan atas dasar teori yang telah ditulis. Teori merupakan landasan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Instrumen penelitian disusun sesuai dengan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah ditulis.

Berikut ini diuraikan mengenai kisi-kisi instrumen penelitian, uji instrumen dan naskah instrumen yang digunakan dalam penelitian :

1. Kisi-Kisi Instrumen

Tabel 4. Kisi-Kisi Instrumen

NO	INDIKATOR	ASPEK INDIKATOR	JENIS INSTRUMEN	Jumlah Butir
1	Badan Petimbangan Sekolah	Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : (1)	- Kuesioner - Dokumentasi	12 butir

		kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) Kriteria kinerja satuan, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria Fasilitas Pendidikan, dan (6) hal-hal terkait pendidikan		
2	Badan Pendukung Sekolah	Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	- Kuesioner - Dokumentasi	7 butir
		Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	- Kuesioner - Dokumentasi	6 butir
		Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	- Kuesioner - Dokumentasi	7 butir
3	Badan Pengontrol Sekolah	Melakukan evaluasi dan pengawasan kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	- Kuesioner - Dokumentasi	7 butir
4	Badan Penghubung Sekolah	Melakukan kerjasama dengan Masyarakat	- Kuesioner - Dokumentasi	4 butir
		Menampung dan menganalisis masukan dari masyarakat	- Kuesioner - Dokumentasi	8 butir
	Total		-	52 butir

Sumber (Depdiknas : 2003)

2. Uji Instrumen

Instrumen penelitian yang baik akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data penelitian yang valid, akurat dan dapat dipercaya (*trusted*). Data hasil penelitian yang baik merupakan bentuk penggambaran variabel yang sedang diteliti. Data penelitian yang baik akan menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, instrumen disusun sebaik mungkin untuk memperoleh hasil penelitian yang

sesuai dengan gambaran yang ada. Syarat minimal yang harus dipenuhi instrumen penelitian ada dua macam yaitu valid dan reliabel.

Menurut Sugiyono(2010:173), valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen tersebut mampu mengukur apa yang diinginkan dan mampu mengungkap data dari variabel yang sedang diteliti secara tepat. Ukuran kevalidan data yang dapat ditunjukkan disebut validitas. Untuk memperoleh instrumen yang valid dilakukan pengujian melalui Uji Validitas.

Uji validitas dilakukan secara dua tahap, yaitu dengan validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*). Validitas isi dilakukan pada instrumen yang berbentuk tes. Sedangkan validitas konstruk dilakukan untuk instrumen yang berbentuk *non-tes*. Validitas konstruk menunjuk kepada asumsi, bahwa alat ukur yang dipakai mengandung satu definisi operasional yang tepat, dari suatu konsep teoritis. Karena itu, validitas konstruk hampir sama dengan konsep. Dimana, keduanya merupakan abstraksi dan generalisasi yang perlu diberi definisi sedemikian rupa sehingga dapat diamati dan diukur(Margono, 2003: 187).

Karena menunjuk pada sebuah asumsi, dalam menguji validitas konstruk dapat digunakan pendapat dari ahli (*expert judgement*). Menurut Sugiyono (2010: 177) setelah instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori

tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan kepada ahli. Para ahli dapat memberikan pendapat dan memberikan keputusan instrumen dapat digunakan langsung atau dengan perbaikan.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mentabulasi, dan menyajikan data dari variabel yang diteliti. Data disusun agar dapat ditafsirkan sehingga lebih mudah untuk dimengerti orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sebagai penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Dalam analisis deskriptif ini proses pencarian jawaban atas pertanyaan penelitian dengan menggunakan presentase dan jawab responden. Statistik sederhana dalam penelitian deskriptif berupa pencarian nilai frekuensi.(Deni Darmawan, 2013 : 69). Kemudian lebih lanjut analisis deskriptif digunakan berkenaan dengan bagaimana data dapat digambarkan (dideskripsikan) atau disimpulkan. Baik secara numerik(menghitung rata-rata dan deviasi standar) atau grafik (dalam bentuk tabel atau grafik), untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan bermakna. (Deni Darmawan, 2013 : 174)

Data-data hasil penelitian ini adalah data primer, yang terdiri dari :

1. Angket, data yang dihasilkan adalah data interval. Angket disini digunakan untuk menanyakan kepada subyek penelitian dalam hasil ini adalah anggota komite sekolah tentang hal-hal yang berkaitan dengan kinerja komite sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah terhadap peningkatan mutu di SMK N 3 Yogyakarta. untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian, dan
2. Dokumentasi, data berupa dokumen sebagai pembuktian dari jawaban angket/ kuesioner. Dokumentasi digunakan untuk menguatkan jawaban dari subyek penelitian agar diperoleh data yang valid. Dokumen dapat berupa surat, foto, sertifikat, dan dokumen-dokumen lain.

Berdasarkan uraian diatas maka langkah analisis yang digunakan adalah :

1. Melakukan tabulasi data dari hasil pengisian angket yang diberikan kepada anggota komite sekolah (terlampir)
2. Melakukan perhitungan indeks pencapaian komite :

Dalam buku acuan operasional kegiatan dan indikator kinerja komite sekolah (depdiknas, 2003:27), indeks pencapaian nilai komite sekolah diperoleh dengan rumus :

$$\text{indeks} = \frac{\sum SR}{\sum SI} \times 100$$

Keterangan :

- SR = Skor Riil
 SI = Skor Ideal

3. Membuat tabel indeks pencapaian komite sekolah dan menghitung rata-rata pencapaian dari setiap indikator kerja. Menghitung Mean (syofian siregar, 2012 : 20)

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Dimana :

$\sum X_i$ = nilai tiap data

\bar{X} = Mean

N = Jumlah data

4. Membuat histogram atau diagram batang berdasarkan hasil data pada tabel
5. Menentukan kategori pencapaian

Pada kenyataannya, keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Komite Sekolah dapat diukur mulai dari peringkat yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Ukuran tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Depdiknas, 2001:24):

- a. Sangat berhasil (nilai antara 90,00 – 100)
- b. Berhasil (nilai antara 70,00 – 89,99)
- c. Kurang berhasil (50,00 – 69,99)
- d. Tidak berhasil (0 – 49,99)

Berdasarkan penyajian data tersebut, data angket merupakan deskripsi dari subjek. Kemudian untuk memperkuat atau menentukan kesahihan data angket yang telah diperoleh, kemudian dilakukan triangulasi atau pengecekan

dengan data hasil penelitian dengan metode lain. Data metode lain dilakukan melalui angket terbuka, wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dari dokumentasi hasil temuan di sekolah dan dokumentasi melalui literatur atau buku, undang-undang dan peraturan serta hasil penelitian orang lain, terkait peran komite sekolah. Kebenaran isi angket yang dapat dicapai apabila ada kesesuaian terhadap hasil wawancara dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan campuran kuantitatif-kualitatif, data yang diperoleh dari subyek penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan diagram kemudian dianalisis dan di cek kesusaianya dengan data lain. Subyek penelitian ini meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota tetap komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta yang terdiri wakil kepala sekolah, guru, staff, pakar pendidikan, tokoh masyarakat dan orang murid yang berjumlah 12 orang.

Penelitian ini, merupakan penelitian dengan menggunakan variabel tunggal, yaitu Partisipasi Komite Sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan partisipasi komite sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta. Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah sesuai dengan perannya, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi komite sekolah dalam menjalankan tugas-tugasnya, serta upaya peningkatan kinerja komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta.

Variabel pada penelitian ini adalah 1) partisipasi Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan di SMK N 3 Yogyakarta, 2) partisipasi Komite Sekolah sebagai badan pendukung di SMK N 3 Yogyakarta, 3) partisipasi Komite

Sekolah sebagai badan pengontrol di SMK N 3 Yogyakarta, dan 4) partisipasi Komite Sekolah sebagai badan penghubung di SMK N 3 Yogyakarta.

Bentuk partisipasi Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan di sekolah meliputi kegiatan komite sekolah dalam memberikan pertimbangan mengenai pembuatan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah, melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi peserta didik dan memberikan pertimbangan terhadap sumberdaya sekolah, memberikan pertimbangan terhadap tenaga kependidikan di Sekolah, memberikan pertimbangan terhadap fasilitas sekolah, memberikan pertimbangan terhadap program dan kebijakan sekolah.

Partisipasi Komite Sekolah sebagai badan Pendukung bagi sekolah diantaranya untuk mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, serta mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Upaya mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan diwujudkan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sekolah. mencari bantuan dana melalui dunia usaha dan industri. Masyarakat juga didorong untuk terlibat langsung menjadi nara sumber atau memberi dukungan dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Partisipasi komite sekolah sebagai badan pengontrol adalah untuk mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan program sekolah, penyelenggaraan pendidikan, serta keluaran pendidikan. Kegiatan yang terwujud dalam rangka mengawasi kegiatan sekolah diantaranya kunjungan

yang dilakukan oleh komite sekolah baik secara bersama-sama(pada saat rapat) ataupun pribadi baik dari ketua komite sekolah maupun wakilnya. Selain itu juga komite sekolah senantiasa memantau hasil belajar siswa agar dapat menjadi masukan bagi sekolah. kemudian juga memantau lulusan sekolah untuk menjalin kerjasama yang lebih luas.

Terakhir, komite sekolah memiliki peran sebagai badan penghubung antara masyarakat dan sekolah. sebagai badan penghubung komite sekolah memiliki peran untuk 1) melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat, 2) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. kerjasama dengan masyarakat diwujudkan dengan terbinanya hubungan baik antara sekolah dengan dunia usaha dan industri. Kemudian ada juga kerjasama atau MOU antara sekolah dan dunia industri khususnya dalam pemberian lapangan kerja. Kemudian dalam rangka menampung aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan diwujudkan dengan adanya fasilitas bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan sekolah. komite sekolah juga menyusun laporan kegiatan yang juga disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab komite sekolah selaku wakil dari masyarakat dalam membantu peningkatan mutu sekolah.

Berdasarkan penjabaran mengenai peran komite sekolah tersebut, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data yang dapat dideskripsikan sebagai berikut

1. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan

Ada lima (5) indikator kinerja yang harus dilakukan oleh anggota komite sekolah yaitu (1) Memberikan pertimbangan dalam penyusunan RKAS/RAPBS, (2) Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pembelajaran, (3) Memberikan pertimbangan dalam pengelolaan pendidikan, (4) Memberikan pertimbangan mengenai tenaga pendidik, (5) Memberikan pertimbangan dalam pengadaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada anggota komite sekolah, diperoleh hasil mengenai partisipasi anggota komite sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai berikut.

Tabel 5. Peran Komite Sekolah sebagai badan Pertimbangan

NO	Indikator	Prosentase	Kategori
1	Memberikan Pertimbangan dalam Penyusunan RKAS/RAPBS	86,36%	Berhasil
2	Memberikan Pertimbangan dalam Pendataan Sumber daya Sekolah	45,45%	Tidak Berhasil
3	Memberikan Pertimbangan Terhadap tenaga Pendidikan di Sekolah	77,27%	Berhasil
4	Memberikan Pertimbangan dalam Sistem Pembelajaran di Sekolah	68,18%	Kurang Berhasil
5	Memberikan Pertimbangan Sarana dan Prasarana Sekolah	72,73%	Berhasil
Rata-Rata		70,00%	Berhasil

- a. Tingkat partisipasi anggota Komite sekolah dalam memberikan pertimbangan pada saat penyusunan RKAS di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh prosentase 86,36% dan masuk kategori berhasil. Kegiatan berkaitan dengan penyusunan RKAS diantaranya adalah ikut dalam rapat penyusunan RKAS dan memberikan saran/usulan pada saat

rapat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak SR, selaku Ketua Komite Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh keterangan

“Untuk komite sekolah yang telah dibentuk terdiri dari unsur sekolah, orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa yang masih aktif. Untuk komite sekolah dari unsur sekolah secara langsung dilibatkan sejak awal. Sedangkan komite sekolah dari unsur luar sekolah dilibatkan dalam waktu-waktu tertentu yang sekiranya membutuhkan pertimbangan dan persetujuan dengan anggota komite. Sebab dalam sistem kerja yang digunakan, asalkan dapat dikerjakan oleh komite disekolah maka dapat langsung dikerjakan. Selama tujuan yang digunakan sama”.(W/SR/24/09/15)

- b. Tingkat Partisipasi anggota komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pendataan Sumber Daya Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh hasil 45,45% atau masuk kategori tidak berhasil. Kegiatan pendataan berkaitan dengan sumberdaya dari masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi orang tua murid dan memberikan masukan atau rekomendasi bagi orang tua murid. Serta kemungkinan bantuan atau masukan yang menjamin keamanan dan kenyamanan belajar dan mengajar di Sekolah. berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AS, selaku sekretaris komite sekolah diperoleh keterangan,

“Untuk Pendataan sumberdaya di sekitar sekolah kita menyerap masukan dari anggota komite sekolah yang tidak tetap. Karena sebagian besar merupakan perwakilan orangtua kelas 1,2, dan 3 meskipun sebagian lagi bukan dari orang tua. Terkait dengan potensi sumberdaya khususnya sumber dana yang mungkin ada orangtua yang memiliki keterbatasan ekonomi kurang mampu, sekolah akan terbuka dalam menyerap informasi-informasi tersebut”. (W/05/09/15)

- c. Tingkat partisipasi anggota Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan terhadap tenaga kependidikan di SMK N 3 Yogyakarta

diperoleh prosentase 77,27% dengan kategori berhasil. Kegiatan yang terkait dengan kondisi tenaga kependidikan di SMK N 3 Yogyakarta adalah memantau serta melakukan pendataan formasi dan jumlah tenaga pendidikan di sekolah, memberikan masukan apabila ada laporan terhadap kinerja guru, dan memberikan masukan untuk gaji GTT dan PTT sesuai dengan beban kerja. Berdasarkan wawancara kepada Bapak AS selaku Sekertaris Komite.

“Sebetulnya berkaitan dengan sumber daya manusia entah itu baik dari kebutuhan personilnya dari segi kualifikasinya dan peran komite sekolah ini tidak langsung. Sebab kompetensi guru telah disusun dalam PP, Permendiknas, dan ada Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2008 tentang Guru. Minimal Tenaga pendidik S1, sudah memiliki sertifikat kompetensi dan latar belakang pendidikan. Disini tugas komite sekolah adalah menginventarisasi guru-guru tersebut berdasarkan kompetensi, baik untuk guru mapel adaptif, normatif dan produktif atau kejuruan. Dalam hal ini pengurus inti cukup tahu, komposisi SDM khususnya pendidik. Karena komite sekolah tidak punya hak intervensi mengenai penambahan guru. Selain itu, komite sekolah berhak untuk memberikan masukan apa bila ada laporan atau keluhan dari peserta didik terhadap guru yang mengajar yang ditindak lanjuti.” (W/AS/05/09/15)

- d. Tingkat partisipasi anggota Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan terhadap sistem pembelajaran sekolah di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh hasil 68,18% dengan kategori pencapaian kurang berhasil. Kegiatan yang terkait dengan pemberian pertimbangan antara lain memberikan masukan terhadap kurikulum yang diterapkan dan memberikan masukan sistem pembelajaran yang diterapkan secara umum. Berdasarkan keterangan dari bapak AS mengenai sistem pembelajaran di sekolah,

"Harapannya dari potensi yang ada di sekolah dan pembelajaran sehari-hari komite sekolah dapat memantau. Namun karena keterbatasan maka pemantauannya melalui siswa atau media-media di sekolah." (W/AS/05/09/15)

Kemudian terkait dengan pengembangan pelajaran dalam kurikulum, bapak AS mengungkapkan

"Dalam pengelolaan kurikulum, komite sekolah memiliki satu unsur dari komite tetap yang memiliki tugas khusus dalam pengembangan pembelajaran, yang terdiri dari perwakilan orang tua, yang salah satu tugasnya adalah menganalisis kebutuhan sekolah, pembiayaan sarana prasarana, dan masukan-masukan kebutuhan secara langsung dan tidak langsung dilihat dari kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi memang ada beberapa seksi yang dibentuk. Namun untuk seksi pengembangan tugasnya seperti itu. Dan karena kurikulum sudah ada pengembangan sendiri, jadi komite sekolah tidak dapat mengintervensi secara langsung terbatas pada pemberian masukan." (W/AS/05/09/15)

Sama halnya seperti diungkapkan oleh bapak SR, selaku Ketua Komite Sekolah dari hasil wawancara diperoleh keterangan,

"Selama ini karena itu telah menjadi ranah dan tanggungjawab dari komite sekolah, secara tidak langsung kami berkomunikasi dengan waka kurikulum untuk kemajuan dan perlu diberikan untuk kemajuan kurikulum. Jadi secara formal tidak dilakukan tetapi secara informal sering dilakukan, karena bagi saya tidak perlu selalu formal bertemu. Melalui pertemuan non formal tersebut karena disampaikan kepada wakil bidang kurikulum maka bisa disampaikan dalam rapat resmi di sekolah. Jadi masukan disampaikan melalui rapat karena sekolah mengadakan rapat rutin satu (1) bulan sekali di sekolah." (W/SR/24/09/15)

- e. Tingkat partisipasi Komite Sekolah dalam memberikan Pertimbangan terhadap Sarana dan Prasarana Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta di peroleh hasil 72,73% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang terkait dengan sarana dan prasarana sekolah antara lain memberikan pertimbangan rencana pengadaan

sarana-prasarana sekolah dan memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SR, diperoleh keterangan,

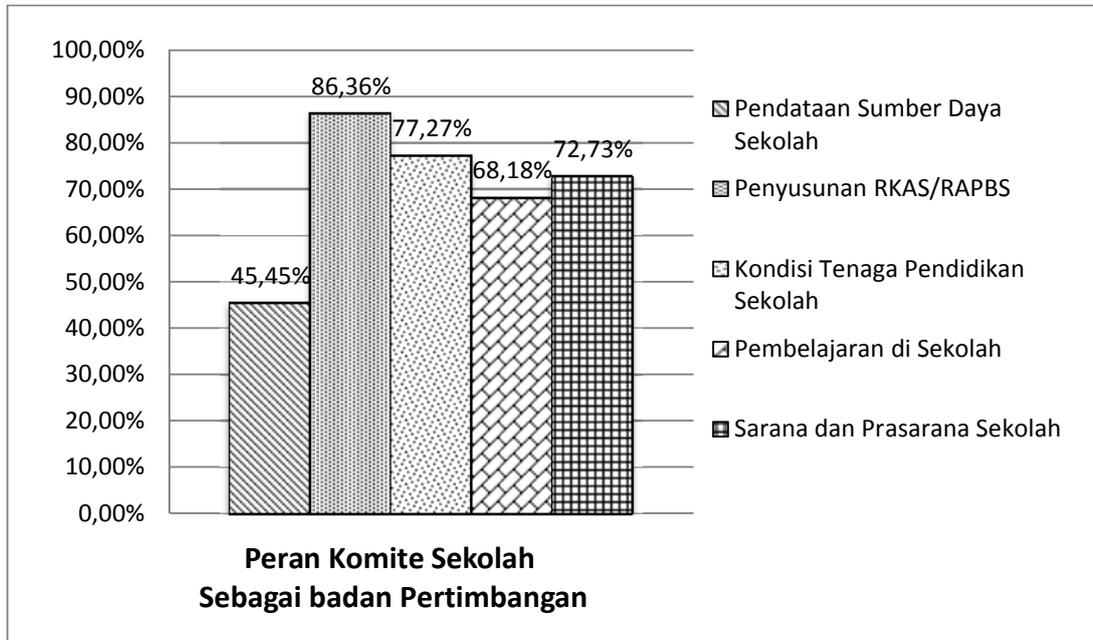
"Kalau sarana dan prasarana sangat penting dibutuhkan bagi sekolah. Sarana dan prasarana di *cover* oleh Waka. Kalau masalah perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, wakil kepala sekolah selalu berkomunikasi dengan komite sekolah. Karena komite bukan hanya ketua, semua punya hak untuk memajukan sekolah. Selain itu juga Waka Sarana dan prasarana perlu berkomunikasi dengan kepala program apabila ada perubahan pengadaan sarana dan prasarana." (W/SR/24/09/15)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak AS dalam wawancaranya mengenai sarana prasarana sekolah,

"Kalau untuk sarana komite sekolah agak detil, sebab komite sekolah di SMK 3 ini sebagian personilnya adalah orang-orang yang dulu pernah di SMK 3 misalnya guru, alumni atau orang tua siswa. Sehingga yang berkaitan dengan sarana dan prasarana mereka tahu khususnya untuk alat-alat praktek. Kalau untuk normatif adaptif tidak terlalu pelik. Kalau untuk kegiatan praktik, komite sekolah banyak memberikan saran dan solusi karena untuk pengadaan bahan dan alat praktik. Kalau untuk bahan sendiri dari pemerintah, meskipun mestinya untuk peralatan juga dari pemerintah. Sampai tahun ajaran 2015, melalui komite sekolah masih boleh menyiapkan anggaran untuk penyediaan alat praktik di mesin, otomotif, dan lain-lain. Jadi peranannya masih tinggi dalam pengembangan. Buktinya kami masih punya anggaran persiswanya selama belajar di SMK N 3 Yogyakarta antara 3-3,5 yang di upayakan komite sekolah dan di setujui pemerintah kota." (W/AS/05/09/15)

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, secara rata-rata peran Komite sekolah sebagai badan pertimbangan sekolah diperoleh hasil 70,00% dengan kategori pencapaian berhasil. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi anggota komite sekolah dalam melakukan tugas-tugasnya telah telaksana dengan baik. Secara kuantitas dari jumlah anggota yang berpartisipasi lebih dari setengah

jumlah anggota ikut berpartisipasi, juga dari segi kualitas dari hasil pencapaian masing-masing indikator telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu sekolah. Secara rinci hasil tersebut lihat pada gambar dua(2).



Gambar 2. Diagram Batang Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan

2. PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENDUKUNG

Sebagai badan pendukung, tingkat partisipasi anggota komite sekolah diukur melalui bentuk kegiatan yang diikuti oleh anggota komite sekolah. Indikator peran Komite Sekolah sebagai badan pendukung sekolah diantaranya; (1) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, (2) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembuatan dan penyelenggaraan pendidikan, (3) Mendorong tumbuhnya perhatian dan kmitemen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan angket yang dibagikan kepada anggota komite sekolah diperoleh hasil tingkat partisipasi anggota komite sekolah dapat dilihat pada tabel delapan.

Tabel 6. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung

NO	Indikator	Prosentase	Kategori
1	Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	71,43%	Berhasil
2	Menggalang dana dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	83,33%	Berhasil
3	Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan	54,55%	Kurang Berhasil
Rata-Rata		69,77%	Kurang Berhasil

- a. Tingkat partisipasi anggota komite sekolah dalam rangka mendorong orang tua dan masyarakat untuk berperan dalam pendidikan mencapai 71,43% masuk kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang meliputi indikator tersebut adalah rapat insidental dengan orang tua murid, mencari dana bantuan dari DU/DI, mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan mendorong masyarakat untuk ikut membantu, mendukung dalam hal pemeriksaan kesehatan siswa, mendukung kegiatan pembrantasan narkoba. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah dukungan dalam kegiatan ekstrakurikuler, mendukung kegiatan pencegahan dan pembrantasan narkoba, serta pemeriksaan kesehatan bagi siswa melalui UKS. Kegiatan yang belum terlaksana adalah partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, komite hanya memberikan himbauan kepada masyarakat tetapi belum ada respon dari masyarakat. Berdasarkan angket terbuka yang diberikan

kepada responden, deiperoleh keterangan. Untuk komite sekolah sendiri dalam membantu kegiatan ekstrklikuler sebatas pengawasan dan dan pemberian saran. Untuk orang tua sendiri hanya bersifat himbauan kepada orangtua untuk senantiasa mengawasi dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa. Wujud nyata yang diberikan komite sekolah berupa pemenuhan sarana ekstrkulikuler yang diajukan lewat dana komite sekolah.

Kegiatan lain yang belum terlaksana adalah adanya bantuan dana dari Dunia Usaha dan Dunia Industri. Kerjasama dengan DU/DI sebatas kerjasama berupa kegiatan pendidikan bagi siswa berupa Praktik Industri dan juga kerjasama dalam penerimaan lulusan. Berdasarkan keterangan dari Bapak SR dalam wawancara mengenai dana dari DU/DI diperoleh keterangan,

“mengenai masalah bantuan dari pihak luar, untuk sekolah swasta banyak sekali bantuan dari pihak luar. Sedangkan dari sekolah negeri sering kali terbentur pertanggungjawaban terutama terkit dengan RAPBS, sebab uang keluar masuk harus sesuai dengan RAPBS, sehingga bila ada uang tambahan yang masuk akan menjadi temuan dari bidang audit.”
(W/SR/24/09/15)

- b. Tingkat partisipasi anggota komite sekolah dalam rangka mendukung penggalangan dana masyarakat untuk pembiayaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh hasil, 83,33% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang termasuk dalam indikator tersebut adalah memverifikasi RAPBS yang di susun oleh sekolah, bersama-sama kepala sekolah mengesahkan RAPBS dan menetapkan menjadi APBS, memotivasi

masyarakat dalam rangka meningkatkan komitmen untuk peningkatan mutu sekolah dan melakukan penggalangan dana abadi bagi sekolah. Kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik adalah memverifikasi RAPBS yang diajukan sekolah, melakukan pengesahan RAPBS melalui rapat pleno komite sekolah, Kegiatan dalam rangka menggalang dana masyarakat diwujudkan melalui dana investasi dan iuran wajib bagi orangtua murid. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih menemui kendala. Seperti diungkapkan oleh Ketua Komite Sekolah bapak SR, dalam wawancara dengan beliau mengatakan,

“Intinya kalau masalah dana investasi sekolah mengharapkan tertib agar digunakan sesuai jadwal. Tetapi kebanyakan tidak tertib. Bahkan sampai lulus ada yang belum membayar. Sehingga dana yang seharusnya digunakan sesuai jadwal kadang tidak sesuai. Bahkan kumpulan akumulasi seluruh siswa yang belum melunasi mencapai 1 Miliar rupiah. Padahal sekolah membutuhkan biaya setiap hari sehingga menjadi kendala bagi sekolah. Padahal sudah disepakati dan pembayarannya dapat diangsur sebanyak 3 kali selama satu tahun. Sekolah sebenarnya ingin memajukan mutu sekolah tetapi terkendala dana dari orang tua, sebab bila mengandalkan dana dari dinas dan pemerintah tidak akan mencukupi. Jadi pemerintah itu menuntut sekolah meningkatkan mutu tetapi tidak dibarengi dengan dukungan yang sesuai. Sehingga tahun ini, salah satu usulan sebagai solusi masalah investasi dari komite sekolah diangsur 9 kali, harapannya agar cicilan tidak terlalu tinggi.”
(W/SR/24/09/15)

Berdasarkan keterangan tersebut membuktikan juga bahwa komitmen masyarakat untuk peningkatan mutu sekolah masih perlu diperbaiki.

- c. Partisipasi komite sekolah dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan

dapat diwujudkan melalui pelaksanaan konsep subsidi silang dari penarikan iuran, mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat. kegiatan komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta dalam melaksanakan indikator tersebut diperoleh hasil 54,55% dengan kategori kurang berhasil.

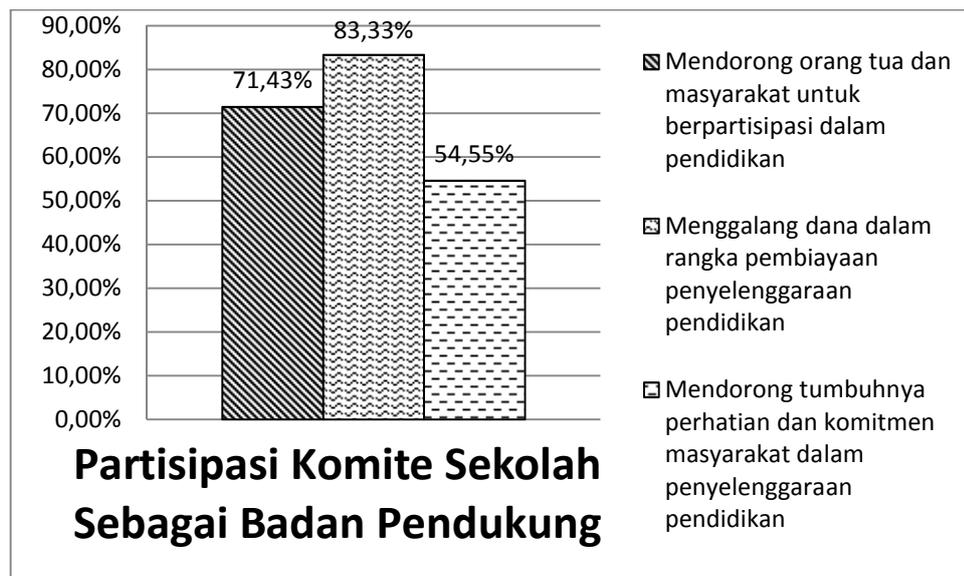
Konsep subsidi silang saat ini tidak lagi dijalankan karena mengikuti aturan yang ada. Untuk saat ini bagi siswa yang kurang mampu dapat diberikan subsidi dana investasi dari orang tua murid. Saat ini siswa yang mengajukan permohonan subsidi.

Kegiatan inovatif bagi masyarakat, saat ini belum ada. Hanya bersifat himbauan kepada anggota komite sekolah tidak tetap, serta melakukan panggilan kepada wali siswa yang bermasalah. Seperti diungkapkan oleh bapak AS dalam wawancaranya:

"Kalau program khusus, komite sekolah mengikuti program dari sekolah, artinya komite sekolah tidak memiliki program khusus dalam waktu-waktu tertentu mensosialisasikan kepada masyarakat. tetapi, karena komite sekolah punya perwakilan di masing masing kelas kelas X,XI,dan XII. Untuk kelas X ini berperan aktif dan ditiap-tiap kelas ada. Otomatis komite sekolah tidak tetap ini menjadi agen promosi dan informasi sekolah baik lewat siswanya maupun orang tuanya. Kemudian ditindak lanjuti dengan sekolah lewat WKS Humas. Ada komite sekolah yang diberi tugas sebagai humas, tetapi programnya dikoordinasikan dengan WKS 4, kemudian memanfaatkan alumni yang telah sukses. Komite sekolah ini dalam prgramnya adalah berkoordinasi dengan alumni. Khususnya dalam penanganan program atau sistem kesiswaaan, sarpras."(W/AS/05/09/15)

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dicapai oleh komite sekolah, secara rata-rata partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh hasil 69,77% dengan

kategori pencapaian kurang berhasil. Hal tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi komite sekolah dari segi keterlibatan anggota serta kegiatan yang dilakukan sebagai badan pendukung belum terlaksana dengan baik. Meskipun pada beberapa kegiatan telah dijalankan dengan sangat baik, namun kebanyakan indikator belum terlaksana dengan baik dan masih menemui kendala. Namun demikian peran komite yang masuk kategori kurang berhasil berada pada skor yang mendekati skor indikator berhasil, sehingga kekurangan yang ada tidak terlalu banyak untuk setiap indikator kerja. Secara rinci pencapaian partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung, dapat dilihat pada gambar tiga(3).



Gambar 3. Diagram Batang Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung

3. PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENGONTROL

Komite Sekolah sebagai badan pengontrol sekolah memiliki tugas mengontrol kualitas dari pelaksanaan pendidikan di sekolah. Untuk

mengukur tingkat partisipasi dari anggota komite sekolah sebagai badan pengontrol sekolah memiliki indikator pengontrolan melalui; (1) Memantau kegiatan dan pelaksanaan program sekolah, dan (2) memantau serta menindaklanjuti hasil belajar siswa.

Berdasarkan angket yang dibagikan kepada anggota komite sekolah terhadap perannya sebagai badan pengontrol diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 7. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol

NO	Indikator	Prosentase	Kategori
1	Memantau pelaksanaan program di sekolah	75,76%	Berhasil
2	Memantau hasil Belajar Siswa	63,64%	Kurang Berhasil
Rata-rata		69,70%	Kurang Berhasil

a. Tingkat partisipasi anggota komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam memantau pelaksanaan program di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh hasil 75,76% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang bersifat pemantauan kegiatan diantaranya mengadakan rapat rutin antara komite, sekolah dan dewan pendidikan, pemberian apresiasi dan masukan terhadap program sekolah, silaturahmi ke sekolah. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Komite Sekolah mengenai pengawasan pembelajaran beliau menuturkan,

“Untuk berkaitan dengan fungsi pengawasan, secara langsung bisa tetapi intensitasnya tidak bisa maksimal karena pengurus komite orang sibuk semua. Sehingga kalau di kontrol secara langsung akan mengganggu aktivitasnya. Namun secara tidak langsung komite sekolah akan menyerap masukan atau laporan dari lain. Kemudian disampaikan baik secara insidental maupun

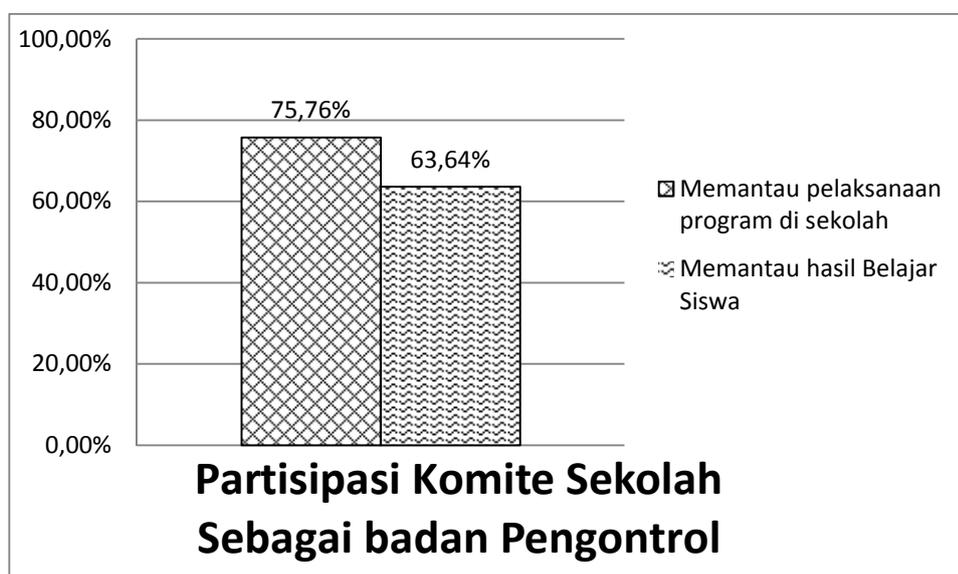
rutin, terutama kepada ketua atau sekretarisnya terutama yang berasal dari unsur luar sekolah. Mungkin satu bulan atau dua minggu sekali ini bertemu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru guru kemudian dari hasil kunjungan itu diberikan masukan kira-kira yang perlu dikembangkan. Meskipun realisasinya tidak spti yang diharapkan, namun diagendakan dalam rapat rutin tiga bulan sekali atau enam bulan sekali itu ada laporan dari keuangan, sarana prasarana, dan prestasi pembelajaran.” (W/AS/05/09/15)

- b. Tingkat partisipasi anggota komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam memantau hasil belajar siswa di SMK N 3 Yogyakarta diperoleh hasil 63,74% dengan kategori kurang berhasil. Kegiatan yang termasuk dalam indikator ini adalah meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa, bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni. Kegiatan dalam yang telah berjalan selama ini, komite sebatas memberikan masukan untuk perbaikan terhadap hasil belajar siswa. Diperlukan komunikasi dan pemantauan yang baik oleh anggota komite dengan sekolah. Seperti disampaikan bapak SR dari hasil wawancara dengan beliau.

“Evaluasi hasil belajar, kalau itu ranahnya termasuk ranah sekolah. Komite Sekolah hanya berperan dengan masukan secara non formal. Sebab waktu komite sekolah sendiri sedikit. Hanya saja komite selalu fokus untuk memperjuangkan hak-hak yang diperoleh anak didik. Dan hubungan sekolah dengan komite terjadi sangat bagus, karena diharapkan semua guru kenal dengan peran dan anggota komite. Dengan komunikasi yang baik ini, komite sekolah memperoleh informasi penting dari sekolah sehingga dapat memberikan masukan. Hanya saja kembali ke personal masing-masing karena tidak semua anggota punya waktu untuk datang ke sekolah.” (W/SR/24/09/15)

Berdasarkan indikator-indikator yang telah tercapai mengenai peran anggota komite sekolah sebagai badan pengontrol sekolah di

SMK N 3 Yogyakarta secara rata-rata di peroleh hasil 69,70% dengan kategory pencapaian kurang berhasil. Hal itu berarti bahwa peran komite sekolah sebagai badan pengontrol sebenarnya telah dilaksanakan dengan baik, karena selisih dengan kategori berhasil hanya 0,3%. Hanya saja, perlu keterlibatan yang lebih dari semua anggota komite. Secara rinci, partisipasi komite sekolah sebagai badan pengontrol dapat dilihat pada gambar empat(4).



Gambar 4. Diagram Batang Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol

4. PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH SEBAGAI BADAN PENGHUBUNG

Komite sekolah sebagai badan penghubung memiliki tugas untuk menjembatani antara sekolah dengan masyarakat. Untuk mengetahui keterlaksanaan peran komite sekolah sebagai badan penghubung, ada dua (2) indikator yang harus dilaksanakan diantaranya; (1) melakukan kerjasama dengan masyarakat, (2)

Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Bedasarkan angket yang dibagikan kepada anggota komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta mengenai perannya sebagai badan penghubung sekolah diperoleh hasil seabgai berikut :

Tabel 8. Peran Komite Sekolah sebagai Badan Penghubung

NO	Indikator	Presentase	Kategori
1	Melakukan kerjasama dengan masyarakat	70,45%	Berhasil
2	Menampung menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat	71,59%	Berhasil
	Rata-rata	71,02%	Berhasil

a. Tingkat partisipasi anggota Komite Sekolah sebagai badan penghubung dalam rangka melakukan kerjasama dengan masyarakat mencapai 70,45% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rapat, dan memberikan himbauan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. melakukan kerjasama dan menghasilkan MOU atau kontrak kerjasama antara sekolah dengan DU/DI.

Dalam upaya melibatkan masyarakat dan *stake holder* kegiatan diwujudkan dengan mengundang orang tua murid, DU/DI untuk hadir dalam pertemuan komite sekolah, melibatkan DU/DI dalam kegiatan dan organisasi komite sekolah. Berdasarkan angket terbuka yang diberikan kepada responden dari anggota komite sekolah, diperoleh hasil untuk keterlibatan masyarakat dan *stake holder*. Khususnya untuk masyarakat dari orang tua yang

tergabung dalam komite tidak tetap dilibatkan untuk menentukan besarnya uang investasi yang disesuaikan dengan perencanaan dan kurikulum. Untuk dewan pendidikan sendiri belum pernah diundang dalam rapat. Hanya saja komite sekolah selalu menyampaikan hasil pemantauan di sekolah kepada dewan pendidikan.

Untuk Kegiatan kerjasama dengan DU/DI selama ini telah ada khususnya dalam kegiatan praktik. Dari keterangan yang dihimpun saat wawancara dengan bapak AS selaku sekretaris Komite Sekolah diperoleh hasil,

“Kerjasama dengan DU/DI terbatas pada pembelajaran praktik. Mungkin perkembangannya kedepan dari DU/DI ini ada perkembangan. Kontribusi khusus thd sarana belum ada, baru sebatas kerjasama yang membuahkan MOU, terutama dari kegiatan prakerin. Bantuan seperti ini tidak ternilai karena membantu siswa saat diterjunkan ke industri, otomatis menggunakan peralatan bengkel. Dengan bantuan praktik langsung membantu mematangkan siswa untuk siap terjun ke dunia industri. Selain itu dibebberapa perusahaan ada pesangon. Itu sangat membantu sekolah karena perusahaan tersebut berjumlah sekitar 60an. Selain itu ada beberapa perusahaan yang inten mengadakan rekrutmen khusus di smk 3 yang rata-rata telah memiliki MOU prakerin atau kunjungan industri. Kalau hubungannya dalam menyumbang alat masih belum.”
(W/AS/05/09/15)

- b. Partisipasi Komite Sekolah sebagai badan Penghubung dalam rangka menampung menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat mencapai 71,59% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut diantaranya menyediakan fasilitas untuk menampung masukan dari masyarakat, menyediakan fasilitas

penyelur bantuan, menampung dan mensosialisasikan hasil musyawarah, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. kegiatan yang telah terlaksana dengan baik yaitu menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat. seperti diungkapkan oleh bapak SR dalam wawancaranya,

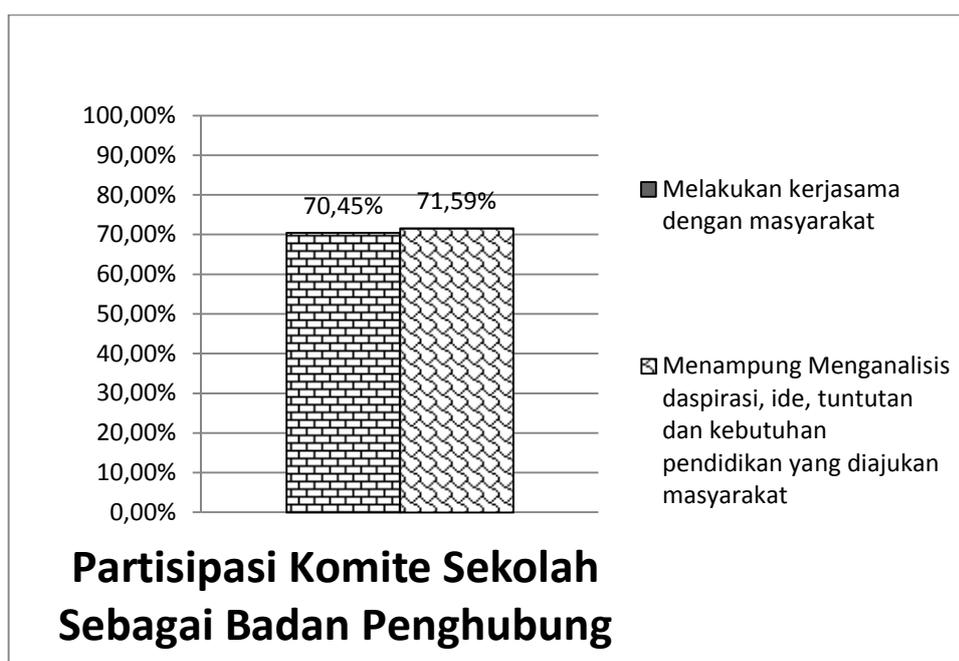
“Kebanyakan orang tua siswa yang tidak kenal dengan komite sekolah akan melakukan pengaduan melalui sekolah. tetapi bila mengenal anggota komite sekolah maka akan mengadu melalui komite sekolah. kebanyakan aduan bukan untuk mengadu masalah sekolah tetapi masyarakat ingin memberikan suport meskipun hanya lewat kata-kata, sebab anaknya sekolah di SMK. Jadi kalau yang tidak kenal lewat sekolah kalau yang kenal melalui komite.”(W/SR/24/09/15)

Untuk fasilitas penyalur bantuan, selama ini komite sekolah belum menyediakan, mengingat minimnya bantuan sarana-prasarana dari masyarakat, baik masyarakat umum maupun DU/DI. Untuk sosialisasi dan laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan. Sosialisasi dapat berupa surat edaran dan pemberitahuan. Sedangkan laporan pertanggungjawaban dibuat pada akhir masa jabatan berdasarkan laporan sekolah. seperti dikutip dalam wawancara dengan bapak SR selaku Ketua Komite Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta,

“Laporan pertanggungjawaban dibuat pada masa pergantian jabatan. Dengan capaian yang sudah tertuang di laporan sekolah. Kemudian anggota komite sekolah yang dari diundang untuk mengemukakan apa yang telah ditemui dan dilakukan selama masa jabatan. Laporan disusun menjadi satu dimana telah merangkul tugas-tugas anggota.”(W/SR/24/09/15)

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dilaksanakan komite sekolah sebagai badan penghubung di SMK N 3 Yogyakarta

diperoleh hasil rata-rata 71,02% dengan kategori pencapaian berhasil. Hasil tersebut telah sesuai mengingat dari tingkat partisipasi serta kegiatan yang dilakukan telah sesuai. Namun hasilnya belum begitu signifikan khususnya dalam penerimaan aspirasi dan laporan komite sekolah. Selain itu, yang menjadi kekurangan dalam indikator komite sekolah sebagai badan penghubung dalam penyediaan sarana penyaluran bantuan kepada sekolah saat ini memang belum tersedia karena sarana yang diperbantukan masih minim. Secara rinci, partisipasi Komite Sekolah sebagai badan penghubung dapat dilihat pada gambar lima(5).



Gambar 5. Diagram Batang
Peran Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung

5. KENDALA YANG DIHADAPI KOMITE SEKOLAH

a. Kurangnya Waktu dari Anggota Komite Sekolah

Waktu menjadi kendala utama bagi anggota komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Dari angket terbuka yang diberikan kepada anggota komite sekolah, responden AS dan BSP punya pandangan yang hampir sama terkait masalah waktu. Sebab masing-masing anggota memiliki pekerjaan, tugas dan kesibukan masing-masing. Tidak semua anggota dapat hadir dalam rapat komite karena kesibukan masing-masing. Untuk kegiatan anggota komite di luar unsur sekolah ada yang menjadi guru, pengusaha, pemerintah desa, dan pensiunan. Karena kegiatan yang berbeda-beda sehingga waktunya tidak dapat di sesuaikan. Hanya saja perlu bagi anggota komite sekolah untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam memberikan masukan terutama jika terkait dengan pengawasan dan pengambilan keputusan. Seperti diungkapkan oleh bapak AS dalam wawancaranya,

“Untuk berkaitan dengan fungsi pengawasan, secara langsung bisa tetapi intensitasnya tidak bisa maksimal karena pengurus komite orang sibuk semua. Sehingga kalau di kontrol secara langsung akan mengganggu aktivitasnya. Namun secara tidak langsung komite sekolah akan menyerap masukan atau laporan dari lain. Kemudian disampaikan baik secara insidental maupun rutin, terutama kepada ketua atau sekretarisnya terutama yang berasal dari unsur luar sekolah. Mungkin satu bulan atau 2 minggu sekali ini bertemu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru guru kemudian dari hasil kunjungan itu diberikan masukan kira-kira yang perlu dikembangkan. Meskipun realisasinya tidak spti yagn diharapkan, namun diagendakan dalam rapat rutin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu ada laporan dari keuangan, sarana prasarana, dan prestasi pembelajaran.”(W/AS/05/09/15)

b. Terbatasnya Bantuan dan Perhatian dari Pemerintah

Komite Sekolah dibentuk untuk membantu meningkatkan kualitas dan mutu sekolah, menjembatani antara sekolah dengan masyarakat. meskipun tidak secara langsung, tetapi komite sekolah memberikan andil dalam peningkatan mutu tersebut. Namun selama ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah. Keterbatasan komite sekolah saat ini karena tidak ada anggaran khusus bagi komite sekolah. Untuk meningkatkan kinerja tentunya dibutuhkan mobilisasi yang lebih dari anggota untuk dapat berkoordinasi. Tidak adanya anggaran membuat ketua komite tidak berani untuk mengambil waktu yang banyak dari anggota sehingga rentang rapat sangat lama. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan Pasal 52 ayat 1 poin (j) bahwa pungutan dalam rangka memenuhi tanggung jawab orangtua/wali murid maka "tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan." Ini artinya tidak ada anggaran baik dari pemerintah maupun dari masyarakat/orang tua murid bagi anggota komite. Hal ini juga menyulitkan komite sekolah untuk berkembang khususnya mengembangkan potensi dari anggota.

c. Kurangnya Komitmen Masyarakat dalam Pembayaran Uang

Sekolah

Komite sekolah berperan untuk menjembatani antara sekolah dan masyarakat khususnya orangtua murid. Dalam hal ini komite sekolah khususnya menjembatani dalam penarikan dana investasi sekolah. komite sekolah memastikan orangtua murid tidak keberatan dalam pembayaran uang investasi sekolah, juga mendorong dan menghimbau masyarakat untuk konsekuen dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Dalam kejadian di lapangan banyak ditemui orang tua murid yang tidak melunasi pembayaran uang investasi sekolah. Padahal dalam APBS uang investasi merupakan dana yang digunakan pada tahun itu juga untuk memenuhi sarana dan prasarana sekolah. akibatnya program pengadaannya seringkali terlambat. Seperti diungkapkan bapak SR dalam wawancaranya terkait dana investasi sekolah,

“Dalam rapat-rapat antara dinas pendidikan, kepala sekolah, dan ketua komite pernah disampaikan masalah penarikan tunggakan, tetapi dari dinas tidak diperbolehkan karena beresifat memaksa. Padahal itu merupakan kewajiban orang tua untuk membayar dan sekolah untuk mejalankan. Sebenarnya komite itu memihak masyarakat agar hak anak dapat terpenuhi melalui kerjasama dan kewajiban orang tua murid. Namun seringkali orang tua murid yang menjadi kendala karena tidak sesuai kesepakatan. Dan dari infromasi dari sekolah mereka yang belum membayar adalah golongan yang mampu. Sebab kejadian belum lama ini ada siswa yang lulus dan kuliah tetapi belum melunasi pembayaran, sehingga ironis karena ada orang tua itu tidak mendukung sekolah yang telah mendidik anak-anaknya.”(W/SR/24/09/15)

Menurut Dinas Pendidikan sekolah tidak boleh menahan ijasah siswa yang telah lulus, meskipun belum melunasi pembayaran uang investasi dan iuran bulanan hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 49 ayat 1 di sebutkan, "Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan." Padahal dalam lampiran Peraturan Gubernur No25 Tahun 2014 tentang penetapan RPABS, pada poin 5.c. dijelaskan, "sebelum APBS mendapat pengesahan dari kepala dinas, sekolah dapat menerima pungutan biaya pendidikan sesuai kesepakatan dengan orangtua peserta didik melalui rapat komite dengan syarat tidak melebihi pungutan tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi dilema sebab pembayaran iuran bulanan dan uang investasi merupakan sudah disetujui antara sekolah, komite sekolah dan erwakilan orangtua murid. Hal tersebut tentunya menjadi pertentangan dengan tugas komite untuk mendorong dan menghimbau masyarakat dalam berkomitmen meningkatkan mutu sekolah.

B. Pembahasan

1. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan

Peran Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan meliputi pemberian pertimbangan dalam penyusunan RAPBS, pemberian pertimbangan

terhadap kondisi sosial dan sumber daya sekolah, pemberian pertimbangan dalam hal tenaga kependidikan di sekolah, pemberian pertimbangan dalam perencanaan pembelajaran, dan pemberian pertimbangan dalam hal sarana dan prasarana sekolah.

a. Memberikan pertimbangan dalam penyusunan RKAS dan RAPBS

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah merupakan bentuk rinci dan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan rencana kegiatan operasional sekolah selama satu tahun ajaran, yang terdiri atas pendapatan dan belanja (pengeluaran). Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola sekolah.

Dalam lampiran permendiknas No.19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan pendidikan, pada poin rencana kerja sekolah disebutkan, "rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah. Rencana kerja menengah dan tahunan, disetujui melalui rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh dinas pendidikan kota. Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan sekolah /madarassah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas. Rencana kerja memuat ketentuan mengenai : kesiswaan, kurikulum

dan kegiatan pembelajaran, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, pembiayaan, lingkungan, peran masyarakat, dan rencana lain dalam rangka meningkatkan mutu.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan RAPBS diperoleh hasil 86,36% atau masuk kategori berhasil. Peran komite sekolah diwujudkan dengan memberikan pertimbangan atau masukan terkait dengan anggaran sekolah dan menetapkan RAPBS. Komite sekolah tetap khususnya yang berasal dari unsur sekolah dilibatkan sejak awal pembuatan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Setelah RKAS tersusun ketua komite beserta anggota komite tetap dan tidak tetap mengadakan rapat pleno komite sekolah untuk membahas RKAS yang telah disusun oleh sekolah. Selanjutnya komite sekolah menetapkan RKAS yang telah disusun menjadi RAPBS untuk 1 tahun kedepan dengan ditandatanganinya berita acara penetapan RAPBS oleh ketua komite sekolah (Lihat : Dokumentasi 3). Selain menetapkan RAPBS, komite sekolah juga memberikan masukan terhadap penyusunan RAPBS terutama untuk menghindari temuan ketika ada audit anggaran RAPBS(Lihat : Dokumentasi 9).

Hal tersebut sesuai dengan penyampaian Sekretaris komite sekolah dalam wawancaranya beliau menuturkan,

“Untuk penyusunan RAPBS ini, antara komite tetap dan tidak tetap sudah ada porsinya masing-masing. Tentunya untuk komite sekolah punya porsi yang lebih banyak.karena komite tetap ikut dari perencanaan sedangkan untuk komite tidak tetap membahas mengenai persetujuan anggaran yang telah disusun. Khusus komite tetap ini membantu dalam penyusunan

RKAS kelas X, XI dan XII. Kemudian komite tidak tetap hanya membantu dalam penyusunan RKAS kelas X karena anggotanya dari wali murid kelas X.”(W/AS/05/09/15)

Dari hasil penelitian Manshur Riadli (2013: 80) partisipasi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam penyusunan RKAS di SMA se Kabupaten Sleman tergolong tinggi, dengan perolehan skor rata-rata 2,79 dari skor ideal 4. Dimana indikator yang dilakukan oleh komite sekolah adalah memberikan pertimbangan dalam pengumpulan data, memberikan pertimbangan dalam proses penyusunan dan sosialisasi RKAS.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, ditinjau berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku, dan penelitian yang relevan terkait dengan peran komite sekolah dalam penyusunan RAPBS, maka peran komite sekolah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Peran komite dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan RAPBS bila dipandang dari segi karakteristik MPMBS telah sesuai. Dalam kegiatan tersebut sudah ada partisipasi baik dari komite dan masyarakat. ada keterbukaan(transparansi) kepada masyarakat untuk tahu informasi dalam rangka perencanaan pendidikan di sekolah. Yang terakhir, dengan disetujuinya RAPBS ada tanggungjawab bersama(akuntabel) antara sekolah dan komite sekolah dalam menyusun RKAS.

b. Memberikan pertimbangan dalam pendataan kondisi sosial dan sumberdaya sekolah

Sesuai dengan karakteristik MPMBS dari segi input pendidikan, sekolah harus memiliki sumberdaya yang tersedia dan siap . Dalam MPMBS sumberdaya yang akan digunakan harus siap baik sumberdaya manusia maupun sumber daya selebihnya. Sumberdaya yang ada harus siap untuk digunakan, tidak harus mahal tatapai mampu digunakan untuk mencapai sasaran dan mampu memanfaatkan sumber daya lingkungan sekitar.

Menurut Rahmania Utari dalam modul penyusunan RKAS disebutkan dalam penyusunan RKAS perlu ada analisis lingkungan dan operasional sekolah. Bagian ini pada prinsipnya sama dengan analisis lingkungan strategis pada Renstra atau RKS. Perbedaannya adalah untuk analisis ini lebih menitik beratkan kepada lingkungan sekolah saja yang cakupannya lebih sempit dan berpengaruh langsung kepada operasional sekolah. Proses-proses ini termasuk menganalisis kebutuhan masyarakat/daerah setempat, potensi daerah, potensi sekolah, potensi masyarakat sekitar, potensi geografis sekitar sekolah, potensi ekonomi masyarakat sekitar sekolah, dan potensi lainnya. Termasuk di dalamnya juga tentang regulasi atau kebijakan daerah dan peta perpolitikan daerah setempat. Hasil kajian ini (baik yang bersifat kuantitas maupun kualitas) dapat dipergunakan untuk membantu melakukan analisis pendidikan yang ada di sekolah saat sekarang dan perencanaan satu tahun ke depan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terkait dengan kondisi sosial dan

sumberdaya sekolah tercapai 45,45% dan masuk kategori tidak berhasil. Dalam kegiatan pendataan sepenuhnya diserahkan kepada sekolah. Karena pendataan sumberdaya merupakan bagian dari penyusunan RKAS, maka sejak awal pendataan dilakukan oleh sekolah. Komite Sekolah dalam hal ini hanya mendapatkan laporan dan data dari sekolah. Untuk selanjutnya agar komite sekolah bersama sekolah menganalisis potensi yang dapat dikembangkan di sekolah. Selain itu juga memberikan masukan terhadap kebijakan yang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi orangtua murid misalnya dalam penetapan besaran uang investasi sekolah. Seperti terangkum dalam notulen RAPBS komite sekolah (lihat: Lampiran 9), berdasarkan keterangan dari sekolah, dana investasi dari Dinas dipatok sampai lima juta rupiah. Idealnya nilai tersebut untuk menutup kekurangan program. Tetapi mengingat pada sekolah-sekolah di sekitar dana investasi ditetapkan kurang dari lima juta maka untuk SMK N 3 ditetapkan tiga setengah juta rupiah, dan komite sekolah lebih menekankan pada pengelolaan anggaran.

Menurut penelitian Windi Retno Bintari (2014:53) terkait dengan pelaksanaan pendataan potensi sekolah, hal tersebut tidak dilaksanakan secara langsung oleh komite sekolah, akan tetapi diserahkan kepada pihak sekolah setelah ada koordinasi dari kedua pihak. Komite sekolah meminta laporan hasil pendataan yang dilakukan oleh sekolah untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Hasil analisis data potensi sekolah yang meliputi berbagai bidang seperti

tenaga kependidikan, siswa dan sarana prasarana yang dijadikan usulan dalam alokasi dana RAPBS.

Berdasarkan paparan diatas peran komite sekolah dalam melakukan pendataan kondisi sosial dan sumber daya sekolah saat ini belum sesuai dengan indikator kinerja komite sekolah. Namun demikian, komite sekolah berupaya lain dengan memberikan masukan terkait sumberdaya sekolah melalui laporan mengenai pendataan dari sekolah. Jadi, meskipun tidak terlibat namun komite sekolah dapat memberikan masukan terhadap kebijakan untuk masyarakat.

c. Memberikan pertimbangan terhadap kondisi tenaga kependidikan sekolah

Dalam karakteristik MPMBS, ada dua hal yang menjadi fokus pengelolaan tenaga kependidikan sekolah. Pertama, dari segi proses perlu adanya pengelolaan tenaga kependidikan yang berkelanjutan, meliputi pengelolaan kebutuhan, pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja dan imbal jasa. Kedua, dari segi input sekolah harus memiliki staf yang kompeten. Dalam peraturan pemerintah No.17 Tahun 2010, Pasal 188 ayat 2 poin (a) dan (f) disebutkan "Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk: penyediaan sumber pendidikan, pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya." Ini artinya bahwa komite sekolah dapat berperan dalam memberikan

pertimbangan terkait penyediaan sumber daya pendidikan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan tenaga kependidikan sekolah di SMK N 3 Yogyakarta mencapai 77,27% atau kategori Berhasil. Kegiatan yang dilakukan adalah memantau kebutuhan tenaga pendidikan di sekolah, memantau kinerja guru, dan memberikan masukan terkait sistem pengajaran yang dipakai, dan memberikan pertimbangan terhadap gaji GTT dan PTT. Komite sekolah tidak ikut menentukan dalam penambahan tenaga pendidik di sekolah. tetapi memantau kualifikasi tenaga pendidik yang telah ada dan tenaga pendidik yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai Permendiknas No.16 Tahun 2007 dimana kualifikasi minimum untuk menjadi guru adalah lulusan S1/D4 di perguruan tinggi terakreditasi dan sesuai dengan kompetensi yang diambil. Selain itu juga diatur kompetensi bagi guru yaitu kompetensi pedagogik, kepribadianl, sosial, dna profesional. Komite sekolah memantau kebutuhan dari profil sekolah yang ada. Berdasarkan hasil dokumentasi kualifikasi tenaga pendidik di SMK N 3 telah sesuai standar, yang dapat dilihat pada tabel empat belas(14).

Tabel 9. Jumlah Guru Berdasarkan Kelompok Mapel, Pendidikan, Usia Dan Kebutuhan

No	Kelompok Mapel	Pendidikan			Usia			L/p		Guru Tetap	Guru Tidak Tetap	Kebutuhan Guru	Total guru
		Dip	S1	S2	<35	35-50	>51	L	P				

1	Normatif		41	1	13	10	19	21	21	30	12	42	42
2	Adaptif		54	4	11	41	6	21	37	39	19	60	58
3	Produktif	5	65	12	10	45	27	77	5	68	14	90	82
Jumlah		5	160	17	34	96	52	119	63	137	45	192	182

Kemudian terkait dengan kinerja guru, komite sekolah memberikan pertimbangan dan masukan pada rapat komite sekolah apabila ada laporan dari siswa dan guru lain. Hal ini sebagai proses evaluasi berkelanjutan bagi tenaga pendidik.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 pasal 16 dan 17 mengatur mengenai tunjangan atau gaji bagi pegawai dan guru tidak tetap yang di bukan menjadi tanggungan pemerintah. Ini berarti sekolah harus menanggung biaya gaji GTT dan PTT di sekolah dengan pertimbangan dari komite sekolah. seperti diungkapkan oleh bapak SR,

“Untuk perannya, Peran utama komite sekolah adalah bertanggung jawab dengan orang tua siswa. Sedangkan tugas-tugasnya adalah untuk mengembangkan sekolah dan mengontrol kinerja sekolah, serta memberikan suport yang baik dan tidak memihak. Khususnya dalam pengelolaan dana sekolah kebutuhan sekolah benar-benar dihitung sehingga menghasilkan dana investasi sekolah yang harus dibayarkan oleh orangtua siswa. Selain untuk kebutuhan sarana dan prasarana dana dari komite sekolah juga digunakan untuk membiayai tenaga pendidik yang bersifat GTT/PTT. Dimana untuk tahun ini komite sekolah mengusulkan untuk menaikkan anggaran bagi GTT/PTT dari 1,2 Juta rupiah menjadi 1,5 juta rupiah perbulan.” (W/SR/24/09/15)

Untuk realisasi gaji sendiri ditentukan oleh sekolah sesuai dengan jam kerja yang telah ditempuh masing-masing GTT/PTT (Lihat :

Dokumentasi 14), komite sekolah disini berperan memberikan pertimbangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utami Dewi (2012 : 67) bahwa untuk tenaga pendidikan komite sekolah tidak pernah memantau dan memberikan pertimbangan terhadap tenaga kependidikan di sekolah. Komite sekolah mengetahui kondisi tenaga kependidikan melalui laporan tahunan dari sekolah. biasanya dilaporkan saat rapat pleno. Dan selama ini tidak ada keluhan mengenai kondisi tenaga pendidikan di SMA N 1 Temon.

Berdasarkan paparan diatas, hasil penelitian yang diperoleh jika ditinjau, peraturan yang ada , hasil penelitian, dan kaitannya dengan peningkatan mutu tenaga kependidikan di SMK N 3 Yogyakarta, maka peran Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan terkait kondisi tenaga kependidikan di SMK N 3 Yogyakarta telah sesuai. Hasil yang dicapai juga masuk kategori berhasil. Ini berarti peran komite sekolah telah sesuai dengan panduan kinerja. Dengan penerapan saat ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu tenaga pendidik di SMK N 3 Yogyakarta.

d. Memberikan Pertimbangan dalam Sistem Pembelajaran di Sekolah

Sesuai dengan karakteristik MPMBS dalam proses belajar mengajar perlu ada efektifitas tinggi. Sekolah yang menerapkan MPMBS memiliki efektivitas proses belajar mengajar yang tinggi. Ini

ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada peberdayaan peserta didik. PBM bukan sekedar memorisasi dan recall, bukan sekedar penekanan pada penguasaan pengeahuan tentang apa yang diajarkan(logos), akan tetapi apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati(ethos) serta dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik(pathos). PBM yang efektif menekankan pada belajar mengetahui, belajar mengerjakan, belajar bekerjasama dan belajar menjadi diri sendiri.

Dalam perencanaan sistem pembelajaran di sekolah, kegiatan yang tercakup didalamnya meliputi penyusunan kurikulum, dan program pembelajaran. Kedua terangkum dalam Permendiknas No.19 Tahun 2007 mengenai standar pengeleloaan pembelajaran. Dalam lampiran Permendiknas No.19 Tahun 2007 ponit B.5 mengenai kurikulum dan kegiatan pembelajaran disampaikan bahwa kurikulum disusun dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan, standar isi, dan peraturan pelaksanaan. Setiap guru bertanggung jawab atas penyusunan silabus.

Lebih lanjut juga disampaikan mengenai program pembelajaran. Program pembelajaran disusun berdasarkan dengan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Untuk menjamin tercapainya kompetensi siswa, guru juga dituntut untuk mengembangkan sistem pembelajaran di kelas dengan metode yang sesuai. Dalam perencanaan dan pengelolaan pembelajaran,

keseluruhan proses dilaksanakan oleh sekolah. Dalam penyusunan Kurikulum dan proses pembelajaran, Komite Sekolah hanya menerima laporan hasil belajar sebagai acuan untuk memberikan pertimbangan.

Berdasarkan hasil penelitian, peran komite sekolah dalam perencanaan kurikulum dan pengelolaan pembelajaran 68,18% dengan kategori pencapaian kurang berhasil. Dari hasil yang diperoleh, responden yang menjawab "Ya" atau ikut berpartisipasi kebanyakan merupakan responden dari unsur sekolah. Hal ini dikarenakan ranah dan tanggung jawab dalam penyusunan kurikulum dan program pembelajaran adalah milik sekolah. Komite sekolah hanya memberikan pertimbangan, itupun berdasarkan laporan dari sekolah melalui hasil belajar siswa. Selain itu, komite sekolah juga memberikan pertimbangan berdasarkan laporan dari siswa. Komite sekolah melakukan komunikasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam penyesuaian kurikulum. Dalam petikan wawancara kepada bapak SR, selaku ketua komite sekolah disampaikan,

"Kurikulum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Waka Kurikulum dan staffnya. Dari komite sekolah sendiri terkait dengan kurikulum sekolah sendiri setidaknya harus tahu, hanya saja tidak berhubungan dengan maksimal hanya memberikan dorongan, sebab kurikulum sudah ada Undang-undangnya."(W/SR/25/09/15)

Karena kurikulum disusun atas dasar peraturan, yang menganut standar dari yang Permendiknas dan undang-undang, maka peran komite sekolah terbatas pada pemberian masukan. Masukan sendiri

terbatas perbaikan kegiatan belajar mengajar untuk guru. Masukan tersebut diberikan apabila sebelumnya ada laporan dari orang tua atau guru terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Ketua komite sekolah memberikan masukan melalui kunjungan dan berkomunikasi secara informal dengan waka kurikulum. Sedangkan masukan secara formal hanya pada saat rapat komite sekolah (1 Tahun 2 kali).

Menurut Andi Sujatmiko (2012 : 89) peran komite sekolah belum optimal terutama dalam memberikan masukan terhadap proses pengelolaan pendidikan dan pembelajaran kepada guru. Peran yang telah dilaksanakan oleh komite sekolah SD N 1 Wates adalah memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan program/kebijakan dan penetapan RAPBS. Dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran kmite sekolah SDN 1 Wates memberikan pertimbangan terkait dengan penyusunan kurikulum, dan tentang bagaimana prses pembelajaran dilakukan oleh guru.

Berdasarkan hasil angket, hasil wawancara, dan penelitian yang relevan jika disesuaikan dengan peraturan yang ada, kegiatan komite sekolah yang dilakukan dalam rangka memberikan pertimbangan dalam sistem pembelajaran di sekolah sudah sesuai. Hal ini karena peran komite sekolah terbatas, sebab ranah perencanaan pembelajaran dalam penyusunan kurikulum menjadi tugas sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah memberikan pertimbangan dan masukan dalam kegiatan belajar dan mengajar di sekolah yang

berdasarkan hasil pemantauan, laporan dari siswa atau masyarakat, laporan hasil belajar dan laporan dari guru.

e. Memberikan pertimbangan terhadap sarana dan prasarana sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah merupakan komponen pendidikan dalam pelaksanaan fungsi manajemen. Dalam karakteristik MPMBS ketersediaan sarana dan prasarana merupakan sikap atas kemauan sekolah untuk berubah (secara fisik), dan bentuk respon dan antisipasi dari sekolah. Kemauan untuk berubah harus dipandang "sebagai sesuatu yang menyenangkan". Perubahan fisik maupun psikologis merupakan perubahan yang terjadi untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam meningkatkan mutu. Sedangkan sikap responsif dan antisipatif dari sekolah merupakan sikap tanggap dari berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran Komite Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta mencapai 72,73% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite SMK N 3 adalah memantau kondisi sarana prasarana sekolah, memberikan masukan dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah dan mengesahkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah dalam APBS. Dalam kegiatan memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah dilakukan melalui daftar inventaris sekolah. Bila memang ada temuan dalam hal kekurangan sarana atau perlu

perbaikan, komite sekolah akan mengkomunikasikan atau mengusulkan kepada sekolah. Seperti tergambar dalam lampiran Notulen rapat komite sekolah(Lihat :Lampiran 9). Dalam usulan dari anggota komite sekolah adalah pengadaan *Generator Set(genset)* untuk mengantisipasi pemadaman listrik dari PLN sehingga komite sekolah mengusulkan untuk diprioritaskan dalam pengadaan.

Selain mengusulkan sarana, komite sekolah juga memantau perencanaan pengadaan alat dalam APBS yang sumberdananya merupakan sumbangan uang investasi dari orangtua murid (Lihat : Dokumentasi 11). Daftar pengadaan sarana merupakan kebutuhan yang bersifat aset dan masuk inventaris sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2008 Pasal 47 disebutkan orangtua/ wali peserta didik punya tanggung jawab untuk memenuhi kekurangan pendanaan atau meningkatkan mutu sekolah terkait dengan biaya investasi selain lahan, biaya personalia, biaya non personalia, dan biaya investasi tambahan untuk pengembangan sekolah. Dalam investasi selain lahan diharapkan dapat memenuhi kekurangan untuk kebutuhan sarana prasarana sekolah seperti insfrastruktur dan alat.

Diluar biaya personalia, Pemerintah sendiri bertanggung jawab atas biaya lahan dan sarana sekolah yang diatur dalam pendanaan Biaya Operasional Sekolah (BOS). Dalam buku Petunjuk Teknis BOS SMK (2015: 7) peruntukan BOS adalah untuk pembelian peralatan pendidikan yang tidak termasuk kategori aset, dan pembelian bahan

praktek/bahan habis pakai. Ini berarti peralatan yang bersifat aset menjadi tanggung jawab sekolah. Untuk realisasi alat, dari hasil pengamatan di Program Keahlian Kendaraan Ringan di SMK N 3 Yogyakarta, komite sekolah selama ini telah membantu pemenuhan sarana seperti *toolbox*, *engine stand*, dan ada juga mobil praktik seperti telampir dalam dokumentasi (Lihat : Dokumentasi 23).

Menurut utami Dewi (2012 : 67) terkait dengan pemberian pertimbangan sarana dan prasarana sekolah, Komite sekolah di SMA N 1 Temon hanya mengesahkan dan memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarna apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah, bukan yang diinginkan oleh sekolah. pemberian pertimbangan mengacu pada nilai kebutuhan bukan nilai keinginan. Nilai kebutuhan tersebut dilihat dari kebutuhan apa saja oleh siswa sehingga dapat menciptakan siswa yang pintar, trampil dan berbudi mulia.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jika dipandang dari peraturan yang ada dan hasil penelitian yang relevan terkait dengan peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan sarana dan prasarana sekolah, dapat disimpulkan bahwa peran Komite Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta telah sesuai dan masuk dalam kategori berhasil dalam meningkatkan mutu sarana sekolah. Usulan yang diberikan juga sesuai dan bersifat antisipatif terhadap kemungkinan yang terjadi Hal ini ditunjukkan dengan persetujuan mengenai pengadaan *generator set*, dan juga realisasi pengadaan alat di Jurusan Teknik Kendaraan Ringan.

Berdasarkan hasil angket pada sub indicator diatas bila ditinjau dari hasil wawancara, dokumentasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan mencapai 70,00% atau dalam kategori berhasil. Partisipasi komite sekolah menunjukkan adanya perbaikan karakteristik mutu di sekolah diantaranya adanya akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat melalui penyusunan RAPBS. Membantu meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui pemberian pertimbangan terhadap tenaga pengajar dan gaji pegawai. Membantu meningkatkan efektifitas belajar mengajar melalui pemberian masukan terhadap proses belajar dan pelaksanaan kurikulum. Membantu peningkatan perbaikan fisik sekolah melalui pemberian pertimbangan terhadap sarana prasarana sekolah. Kegiatan yang belum terlaksana dengan baik yaitu dalam memberikan pertimbangan terkait dengan sumber daya sekolah.

2. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung

a. Mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan

Untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, dalam pengelolaan MPMBS sekolah diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik. Dalam karakteristik MPMBS sekolah yang efektif memiliki komunikasi yang baik antar warga sekolah dan masyarakat. dengan cara ini ketepaduan semua kegiatan sekolah diupayakan mencapai tujuan dan sasaran sekolah yang telah dipatok. Komunikasi yang baik akan membentuk *teamwork* yang kuat, kompak, dan cerdas,

sehingga kegiatan sekolah dapat dilakukan secara merata oleh warga sekolah.

Menurut Depdiknas(2001:20) kegiatan operasional komite sekolah dalam mendorong partisipasi masyarakat diantaranya mengadakan rapat bersama dengan orang tua murid, mendukung kegiatan ekstrakurikuler siswa, mendukung kegiatan kesehatan dan pembrantasan narkoba, dan mencari dana dari Dunia Usaha dan Industri. Dari hasil angket, peran komite sekolah dalam mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan mencapai 71,43%. Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya dengan mengundang masyarakat/ orang tua murid dalam rapat komite sekolah. Dalam hal ini khususnya anggota komite sekolah tidak tetap yang merupakan perwakilan dari orangtua/wali siswa. Seperti dibuktikan melalui notulen penyusunan RAPBS orangtua murid telah dilibatkan dan ikut memberikan masukan dalam penyusunan RAPBS (Lihat : Dokumentasi 10). Melalui rapat dengan orangtua murid tersebut komite sekolah juga menghimbau agar senantiasa mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh putra putrinya. Sedangkan untuk kegiatan pembrantasan narkoba sifatnya koordinasi. Artinya komite sekolah berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terutama apabila ada masalah-masalah terkait dengan kenakalan siswa dan narkoba.

Menurut Made Pidarta(2004:185) komunikasi dan kerjasama yang baik akan membuat pandangan masyarakat yang keliru menjadi

benar. Bahwa guru tidak hanya mengajar dan mementingkan gaji tetapi mengabdikan demi kepentingan yang dididik dan diajar. Dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan merasa diperhatikan sehingga timbul rasa ingin berpartisipasi dengan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, apa yang dilakukan komite sekolah untuk mengajak dan mengundang orangtua murid dalam rapat telah sesuai dalam mendukung peningkatan partisipasi masyarakat.

Kegiatan lain dalam mendorong partisipasi masyarakat adalah menyerap dan menerima dana bantuan dari dunia usaha/dunia industri. Hanya saja, untuk saat ini komite sekolah belum melaksanakannya. Hal ini mengingat bahwa dalam manajemen pembiayaan sekolah telah diatur dalam APBS setiap tahunnya. Setiap pengeluaran dan pendapatan harus sama (Lihat : Dokumentasi 5-7). Sehingga bantuan yang berupa dana atau uang anggaran diluar APBS bisa menjadi temuan dan pelanggaran oleh badan audit. Walaupun ada harus dipersiapkan sebelumnya dan masuk RAPBS. Karenanya bantuan berupa dana dari DU/DI jarang masuk ke sekolah negeri.

Hal tersebut dipertegas oleh Matin (2014:77) dalam prosedur perencanaan anggaran pendidikan tingkat sekolah sekolah harus memiliki RAPBS. RAPBS memuat jenis dan besarnya pendapatan serta jenis dan besarnya pengeluaran sekolah. Besarnya pengeluaran harus berdasarkan kepada besarnya pendapatan. Artinya

pengeluaran tidak boleh lebih besar dari penerimaan (asas anggaran berimbang).

Berdasarkan penelitian Nico Setiawan (2012 : 79) peran komite sekolah dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler tergolong cukup tinggi dengan pencapaian 52,83% menurut kepala sekolah dan 56,02% menurut komite sekolah. kegiatan yang mendukung berupa pengadaan rapat rutin bersama dengan orang tua murid dan pemberian sarana prasarana untuk kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan menurut Utami Dewi (2012:78) peran komite sekolah di SMA N 1 Temon sebagai badan pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan meliputi: komite sekolah memantau kondisi sarana dan prasarana sekolah. Namun komite sekolah tidak memantau tenaga pendidikan di sekolah dan komite sekolah belum mampu menggalang dana dari masyarakat seperti dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan sumber dana untuk pelaksanaan pendidikan masih berasal dari bantuan orang tua siswa.

Dari hasil penelitian angket, wawancara, dan dokumentasi jika pandang dari panduan kegiatan operasional, referensi yang ada dan penelitian yang relevan, peran komite sekolah mendukung masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan telah sesuai dengan kategori berhasil. Dari karakteristik MPMBS yang diterapkan kegiatan mengundang orangtua murid dalam rapat di sekolah akan menciptakan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan sekolah. Sekolah dapat menangkap apa yang diinginkan oleh

masyarakat. Selain itu, melalui rapat ini sekolah dapat memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bekerja sama dalam mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan pencegahan narkoba di sekolah khususnya kepada putra putri mereka. Mengenai bantuan dana dari DU/DI saat ini belum dapat dilakukan karena peraturan yang mengharuskan sekolah untuk menjalankan program sesuai dengan APBS yang telah disusun.

b. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan

Dalam katirannya dengan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah harus memiliki keterbukaan (transparansi) dalam pengelolaannya. Dari karakteristik MPMBS yang ada Keterbukaan sekolah dapat diwujudkan melalui pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya dengan cara melibatkan pihak-pihak terkait alat kontrol. Komite Sekolah seabgai jembatan antara masyarakat dan sekolah dalam hal ini diharapkan mampu mewujudkan transparansi tersebut khususnya dalam hal pengelolaan pembiayaan pendidikan dari masyarakat(Depdiknas :2001).

Kegiatan Komite Sekolah dalam rangka mendukung penggalangan dana sekolah mencapai 83,33%. Kegiatan yang dillaksanakan adalah melakukan verifikasi RAPBS, bersama kepala sekolah menandatangani dan mengesahkan RAPBS menjadi APBS, memotivasi masyarakat meningkatkan komitmen peningkatan mutu,

menggalang dana abadi bagi sekolah. Peran Komite dalam penetapan RPABS diatur Peraturan Gubernur No.25 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Madrasah. Pada bagian lampiran point (C) penetapan RAPBS/M peran komite yang pertama (1) menerima RAPBS dan membahas dalam rapat komite, (2) menetapkan RAPBS menjadi APBS melalui musyawarah untuk tahun pelajaran yang berjalan paling lambat tanggal 31 Agustus, (3) memantau dan meminta pengesahan dari Kepala Dinas Daerah/ Kabupaten. Berdasarkan peraturan tersebut peran komite telah sesuai dengan mengadakan rapat komite dengan ditandatanganinya berita acara rapat(Lihat : Dokumentasi 3). Kemudian menetapkan RAPBS menjadi APBS(Lihat : Dokumentasi 2).

Selain menetapkan APBS, pada tahun 2015 komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta juga mengadakan rapat perubahan APBS. Hal tersebut dikarenakan ada pengurangan dana investasi orang tua murid dari sebelumnya 3,5 Juta/ peserta didik menjadi 3 Juta/ peserta didik. Peraturan Gubernur No.25 Tahun 2014 mengatur perubahan APBS. Mekanisme perubahan APBS dilaksanakan melalui rapat Komite Sekolah yang dihadiri minimal setengah plus satu dari jumlah pengurus Komite Sekolah. Perubahan APBS dilakukan apabila (1) terjadi perubahan dan atau pengurangan anggaran dan atau kegiatan, (2) terjadi pergeseran anggaran antar kelompok belanja atau biaya.

Kemudian dalam rangka meningkatkan komitmen dan menggalang dana bagi sekolah khususnya dari masyarakat melalui dana Investasi. Dana Investasi yang dibebankan kepada orang tua murid saat ini sebesar 3 Juta Rupiah / peserta didik. Uang investasi tersebut digunakan sesuai dengan APBS untuk biaya operasional khususnya dalam pemenuhan sarana prasarana sekolah yang tidak *discover* oleh dana operasional Pemerintah(Lihat : Dokumentasi 8).

Kendala yang dihadapi oleh Komite Sekolah adalah kurang tertibnya pembayaran uang investasi dari orang tua murid. Uang investasi sejatinya digunakan untuk kegiatan pengadaan sarana pada tahun itu juga. Namun demikian masih ada saja banyak yang menunggak dan bahkan sampai siswa tersebut lulus belum melakukan pelunasan sehingga ijasah belum diambil(Lihat :Lampiran 12). Karena banyaknya orang tua siswa yang menunggak, akibatnya pengadaan sarana sekolah tidak dapat dilakukan tepat waktu. Untuk meringankan beban orang tua siswa komite sekolah memberikan solusi dengan melakukan sistem pembayaran uang investasi bertahap sampai enam (6) kali(Lihat : Dokumentasi 11). Menurut penuturan bapak SR selaku Ketua Komite Sekolah :

“Sebenarnya komite itu memihak masyarakat agar hak anak dapat terpenuhi melalui kerjasama dan kewajiban orang tua murid. Namun seringkali orang tua murid yang menjadi kendala karena tidak sesuai kesepakatan. Dan dari informasi dari sekolah mereka yang belum membayar adalah golongan yang mampu. Sebab kejadian belum lama ini ada siswa yang sudah lulus, dan kuliah tetapi belum melunasi pembayaran, sehingga ironis karena ada orang tua itu tidak mendukung sekolah yang telah mendidik anak-anaknya.” (W/SR/24/09/15)

Kebijakan dari dinas pendidikan sendiri saat ini kurang mendukung kegiatan penggalangan dana sekolah dengan melarang komite sekolah untuk menarik tunggakan kepada orang tua siswa, karena bersifat memaksa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.48 Tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 49 ayat 1 di sebutkan, "Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta atau orang tua/ walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan tidak mengikat kepada satuan pendidikan." Berdasarkan ayat tersebut memang biaya investasi seharusnya sifatnya tidak mengikat. Namun karena telah menjadi ketetapan, perlu kesadaran dari orang tua siswa mengingat biaya investasi untuk memenuhi sarana bagi kegiatan putra-putri mereka. Sebab biaya investasi telah diatur penggunaannya sehingga transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Ketua Komite Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta kendala Komite yang lain adalah kebijakan penurunan iuran wajib bagi siswa SMK dari 40 ribu rupiah menjadi 25 ribu rupiah, sedangkan untuk SMA tetap 40 Ribu rupiah. Kebijakan menurunkan besarnya iuran menurut komite sekolah tidak sesuai mengingat kebutuhan sarana dan bahan kegiatan pembelajaran antara SMA dan SMK lebih banyak untuk SMK. Tetapi iuran wajib yang nilainya diturunkan justru untuk SMA. Pemerintah hanya mendukung dan menuntut komite sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah tetapi tidak dibarengi dengan dukungan dalam kegiatan. (W/SR/24/09/15)

Dalam penelitian Arifian Dwi Cahyono (2012: 76) peran komite sekolah sebagai badan pendukung ditunjukkan dengan ikut dalam pemantauan laporan anggaran. Selain itu juga komite sekolah memberikan dukungan dengan mengkoordinasikan dengan pihak sekolah terhadap penggalangan dana yang berasal dari orangtua murid, masyarakat dan pemerintah. Dana yang diperoleh dimanfaatkan dalam program sekolah yang telah ditetapkan di SMA Negeri 1 Sanden

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jika disesuaikan dengan peraturan yang ada, dan hasil penelitian yang relevan, peran komite sekolah menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan telah sesuai. Hasil penelitian sebesar 83,33% dengan kategori berhasil. Kegiatan yang telah berjalan dengan baik adalah memverifikasi RAPBS, Menetapkan RAPBS, dan melakukan revisi atau perubahan APBS. Kegiatan yang terkendala saat ini adalah penggalangan dana bagi sekolah. Perlu kesadaran orang tua murid dan perlu dukungan dari pemerintah untuk memaksimalkan peran komite. Serta perlu ada evaluasi terkait penetapan iuran wajib bulanan bagi siswa SMK. Namun demikian, meskipun dalam pelaksanaannya sekolah menemui kekurangan dalam pendanaan, sekolah harus mampu untuk menjalankan program sekolah secara maksimal meskipun ada kekurangan. Untuk itu sekolah harus memiliki sustainabilitas atau keberlangsungan hidupnya agar tetap hidup (buka). Kebanyakan sekolah tutup karena

tidak sanggup mempertahankan sustainabilitasnya (Depdiknas:2001). Sekolah yang tidak sustainabilitas tutup karena ketiadaan sumberdaya yang memadai untuk hidup terus. Salah satunya adalah dana. Sebab, seluruh program sekolah dijalankan melalui dana yang telah disusun sejak awal melalui APBS.

c. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan

Untuk meningkatkan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu ada partisipasi tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. Dalam karakteristik pengelolaan MPMBS, partisipasi warga sekolah dan masyarakat menjadi bagian kehidupan sekolah hal ini dilandasi keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar rasa memiliki makin besar rasa tanggung jawab, makin besar tanggung jawabnya makin besar pula dedikasinya untuk sekolah (Depdiknas :2001).

Dalam Buku Acuan Operasional Dan Indikator Kinerja Komite Sekolah (Depdiknas, 2003 : 21) disebutkan, kegiatan yang mencakup indikator mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat diantaranya, (1) melakukan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran orangtua siswa, (2) mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, (3) membantu sekolah menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dan orangtua murid. Berdasarkan hasil angket peran komite sekolah

dalam mendorong dan meningkatkan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mencapai 54,55% atau dalam kategori kurang berhasil. Kegiatan yang dilaksanakan adalah memantau pengajuan bantuan siswa, dan menggandeng orangtua siswa dengan menjadi anggota komite sekolah tidak tetap.

Bila ditinjau dari segi peningkatan mutu sekolah, pemberian subsidi sebagai pemenuhan pembiayaan pengebangan sekolah yang tertuang dalam RAPBS, khususnya bagi masyarakat kurang mampu bisa menjadi pengganti pungutan masyarakat. Pemberian subsidi kepada masyarakat sejalan dengan Peraturan Gubernur No.25 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan APBS, dalam lampiran disebutkan bahwa tidak dipungut biaya dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomi, kemudian sekolah dapat menerapkan subsidi silang yang diatur sendiri oleh sekolah. Di SMK N 3 Yogyakarta sendiri, kegiatan subsidi silang pernah dilakukan. Seiring dengan perkembangan sistem subsidi diperoleh melalui pengajuan keringanan atau bantuan subsidi kepada pemerintah atau lembaga pemberi bantuan. Sesuai dengan hasil petikan wawancara Ketua Komite Sekolah

“Kalau bantuan di SMK 3, kalau dulu ada subsidi silang. Tetapi itu ditutup. Untuk yang minta keringanan masing masing orang tua siswa mengajukan kepada sekolah. Kemudian dari sekolah akan diajukan ke pemerintah daerah kalau yang kota di kota, kalau yang di Bantul di Bantul. Kalau siswa dari kota masuk ke KMS, sedangkan data siswa dari luar kota Jogja di data dan dikembalikan kepada pemerintah setempat karena dari kota tidak ada anggaran.”(W/SK/24/09/15)

Mengenai pemberian bantuan atau subsidi dari dinas diatur dalam Permendiknas No.30 Tahun 2010 mengenai Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan. Pada pasal 3 dijelaskan Direktorat jenderal yang menanggapi pendidikan dasar dan menengah menetapkan alokasi jumlah siswa berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran. Pemerintah provinsi akan menginformasikan kuota calon penerima bantuan. Untuk selanjutnya pemerintah kabupaten/kota menginformasikan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan (a) kondisi masyarakat, (b) letak satuan pendidikan/lokasi asal siswa, (c) pemerataan, dan (d) keadilan sesuai gender.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan yang ada sekarang, komite sekolah tidak dapat memberikan peran langsung dalam pemberian subsidi. Peran komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta saat ini adalah menyampaikan sayarat dan kuota kepada siswa serta menyampaikan permohonan pengajuan subsidi kepada dinas (Lihat :Lampiran 13). Kendala komite sekolah dalam pemenuhan subsidi ini, karena penentuan penerima subsidi dari dinas atau lembaga yang memberikan bantuan sehingga komite tidak bisa memastikan siswa yang mendapat dari golongan ekonomi yang benar-benar kurang mampu atau tidak. Karena keterbatasan tersebut peran komite dalam penerapan konsep subsidi silang disekolah belum maksimal.

Untuk kegiatan inovatif dari komite sekolah program dari sekolah. Sebab dalam penggunaan dana komite yang bersumber dari masyarakat sepenuhnya digunakan untuk pemenuhan sarana prasarana. Komite sekolah hanya berupaya untuk menggandeng masyarakat khususnya orangtua murid melalui anggota komite sekolah tidak tetap yang terdiri dari dua orangtua murid untuk perwakilan kelas. Peran komite tidak tetap terutama untuk menyalurkan aspirasi dan masukan dari orangtua murid yang lain kepada sekolah. Seperti ditunjukkan dalam rapat komite sekolah.(Lihat : Dokumentasi 10). Hanya saja perlu ada peningkatan partisipasi dari anggota komite tidak tetap baik dalam kehadiran dan keaktifan dalam memberikan masukan.

Menurut Irene Astuti (2011 : 239) "orangtua umumnya mempunyai alasan untuk tidak terlibat secara aktif di sekolah, khususnya sebagai anggota komite sekolah dengan berbagai alasan. Secara umum dikarenakan oleh keterbatasan waktu, belum banyak informasi dari sekolah, belum diminta bergabung, dan keterbatasan dana serta belum pemahannya tentang standar mutu." Padahal jika ditinjau komite sekolah tidak tetap ini secara tidak langsung telah menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dan orangtua murid.

Menurut Nur Kholis (2003:125) orang tua siswa seharusnya menyediakan waktu sebanyak mungkin berkunjung ke sekolah dan ke kelas guna mengontrol pendidikan anaknya. Amat diperlukan diskusi dengan guru dan pembimbing siswa sehingga dapat

mengetahui hambatan dan kemajuan yang dialami anaknya. Langkah ini sekaligus bisa mengantisipasi dan mengeliminasi kemungkinan kegagalan pendidikan anaknya. Di sisi lain, guru selain jadi pendidik di sekolah juga secara aktif memantau pendidikan siswa di dalam keluarga.

Ini artinya masyarakat diharapkan meningkatkan partisipasinya dengan sekolah. demikian juga sekolah harus meningkatkan pendekatan dan komunikasinya dengan orangtua murid. Menurut Clark (dalam Nur Kholis, 2003 : 127) ada 2 jenis pendekatan, yaitu dengan pendekatan *school-based* dengan mengajak orangtua datang kesekolah melalui pertemuan, konferensi, diskusi guru-orang tua dan kunjungan saat kegiatan belajar mengajar. Kedua, *home-based* yaitu orangtua membantu anak belajar bersama guru berkunjung ke rumah.

Berdasarkan paparan diatas, peran komite sekolah belum sesuai dengan acuan dan indikator kinerja komite sekolah. Namun demikian ada upaya yang ditunjukkan komite sekolah dalam meningkatkan komitmen masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan cara memantau proses pemberian bantuan kepada siswa dan menggandeng perwakilan orangtua murid sebagai anggota komite tidak tetap merupakan upaya untuk mendekatkan antara sekolah dengan orangtua murid. Jika ditinjau dari peraturan yang sekarang, sebenarnya telah sesuai. Karena dengan peraturan yang ada sekarang, peran komite sekolah menjadi terbatas sehingga tidak

dapat maksimal dalam berperan secara langsung. Komite sekolah dalam hal ini hanya berperan dalam membantu dan berkoordinasi dengan sekolah. Sehingga perlu ada evaluasi terhadap acuan kinerja dengan peraturan dan kebijakan yang sesuai bagi komite sekolah dalam berperan meningkatkan komitmen masyarakat.

Berdasarkan sub indikator diatas, hasil angket bila ditinjau dari hasil wawancara, dokumentasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung mencapai 69,77% atau dalam kategori kurang berhasil. Dari beberapa sub indikator, partisipasi komite sekolah menunjukkan adanya perbaikan karakteristik mutu di sekolah diantaranya menjalin komunikasi efektif antara warga sekolah dan masyarakat, serta membentuk *teamwork* yang baik dengan mengundang orangtua dalam rapat sekolah, mengajak perwakilan orangtua murid sebagai komite sekolah tidak tetap. Mendukung transparansi dan pembiayaan sekolah melalui penetapan APBS, merevisi APBS dan penetapan iuran wajib bagi orangtua murid. Peningkatan partisipasi warga sekolah dan masyarakat belum terlaksana dengan baik karena keterbatasan peran dari komite sekolah.

3. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol

a. Memantau kegiatan dan pelaksanaan program sekolah

Dalam memantau kegiatan dan pelaksanaan program sekolah komite sekolah harus bisa menyesuaikan dengan karakter sistem

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Dalam proses pemantauan komite sekolah diharapkan mampu menggandeng pihak-pihak terkait untuk bekerjasama dan bersama-sama memantau pelaksanaan program di sekolah. Sejalan dengan karakteristik MPMBS bahwa Sekolah harus memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan individual. Karena itu, kerjasama antar fungsi dan antar warga dalam sekolah harus menjadi kebiasaan sehari-hari(Depdiknas :2001).

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada anggota komite sekolah, peran komite sekolah dalam rangka memantau kegiatan dan pelaksanaan program di SMK N 3 Yogyakarta mencapai 76,19% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini adalah mengadakan rapat rutin antara komite sekolah, sekolah, masyarakat, dan dewan pendidikan. Memberikan apresiasi dan masukan terhadap program sekolah dan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah.

Dalam kegiatan untuk memantau kegiatan dan pelaksanaan program sekolah komite sekolah melakukan pemantauan melalui rapat dan kunjungan ke sekolah. Secara resmi kegiatan pemantauan melalui rapat evaluasi, yang dilakukan setiap 6(enam) bulan sekali. Untuk kegiatan tersebut yang terlibat adalah anggota komite sekolah tetap dan tidak tetap, yang terdiri dari unsur sekolah,

pakar pendidikan, pegawai pemerintahan, perwakilan DU/DI dan orang tua murid. Jadi secara tidak langsung dalam rapat tersebut telah melibatkan semua unsur masyarakat. Untuk dewan pendidikan saat ini belum dilibatkan. Dewan pendidikan hanya menerima laporan dari ketua sekolah mengenai hasil musyawarah. Seperti dikemukakan oleh ketua komite, bapak SR,

“Secara struktur dewan pendidikan di atas komite sekolah. Kalau dewan pendidikan tidak pernah, tetapi dari komite bila ada waktu senggang di sempatkan untuk mengunjungi sekolah dan melihat langsung kegiatan siswa di sekolah. memantau peralatan praktik di sekolah dan kegiatan praktik yang dilakukan siswa apakah dilakukan secara serius atau tidak. Karena praktik dilakukan dalam tim jadi harus saling mencermati dan bergantian. Dari kunjungan tersebut kemudian saya mengusulkan kalau pas praktik Handphone dan alat komunikasi dikumpulkan supaya siswa dapat fokus dan mencermati. Karena guru sendiri tidak dapat mengamati siswa secara terus menerus, kemudian karakteristik guru berbeda beda. Jadi komite sekolah melalui kunjungan akan memeberikan masukan terhadap kegiatan siswa, memantau peralatan.”
(W/SR/24/09/15)

Selain pengawasan pembelajaran sekolah, komite sekolah juga memantau kebijakan dan pengelolaan manajemen sekolah. Hal ini untuk mencegah adanya kegiatan diluar perencanaan atau tidak sesuai dengan APBS yang telah disusun. Oleh karena itu komite sekolah selalu melakukan komunikasi kepada gru dan staf. Meskipun tidak formal, komite sekolah dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan. Apabila ada temuan, komite sekolah dapat melaporkan hal tersebut ke Dinas Pendidikan. Sesuai dengan yang diungkapkan bapak SR selaku ketua komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta;

“Secara resmi belum ada, karena masalah teknis langsung pada kebijakan kepala sekolah. jadi ranahnya sekolah, komite tidak dapat ikut campur. Komite sekolah hanya memberikan pandangan-pandangan saja. Yang penting komite memantau kalau pada praktiknya tidak sesuai dengan rencana, kemudian komite bisa melaporkan ke dinas pendidikan. Khususnya dalam penggunaan dana sekolah. yang pertama karena pengelolaan uang yang besar sehingga jangan sampai ada temuan-temuan dari BPK. Jadi secara formal hanya melalui rapat sekolah, sedangkan secara non formal melalui perbincangan dengan guru-guru.” (W/SR/24/09/15)

Berdasarkan uraian tersebut, peran komite sekolah sebenarnya sesuai dengan acuan dan indikator operasional komite sekolah. Hanya saja, perlu peningkatan kesadaran dan intensitas dari anggota yang lain dalam melakukan pengawasan atau pemantauan di sekolah. Saat ini peran pengawasan lebih sering dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Komite. Sedangkan dari pengurus yang lain diluar komite dari sekolah masih belum maksimal. Seperti diungkapkan bapak AS dalam wawancaranya;

“Untuk berkaitan dengan fungsi pengawasan, secara langsung bisa tetapi intensitasnya tidak bisa maksimal karena pengurus komite orang sibuk semua. Sehingga kalau di kontrol secara langsung akan mengganggu aktivitasnya. Namun secara tidak langsung komite sekolah akan menyerap masukan atau laporan dari lain. Kemudian disampaikan baik secara insidental maupun rutin, terutama kepada ketua atau sekretarisnya terutama yang berasal dari unsur luar sekolah. Mungkin satu bulan atau 2 minggu sekali ini bertemu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru guru kemudian dari hasil kunjungan itu diberikan masukan kira-kira yang perlu dikembangkan. Meskipun realisasinya tidak spti yang diharapkan, namun diagendakan dalam rapat rutin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu ada laporan dari keuangan, sarana prasarana, dan prestasi pembelajaran.”(W/AS/05/09/15)

Menurut M.Msibah(2009:10) dalam jurnalnya tentang fungsi komite sekolah, bahwa komite sekolah dalam melakukan kontrol

terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada sekolah, apakah sesuai dengan kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan sekolah. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Komite Sekolah melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Untuk memberdayakan komite sekolah dalam membangun tata kerja kelembagaan sekolah diantaranya komite sekolah perlu melakukan monitoring internal. Monitoring internal dan evaluasi diri dilakukan secara reguler serta melaporkan pembahasan dalam forum komite sekolah. monitoring dapat dirancang sesuai aspek yang ingin dilihat, format dan instrumennya, serta gugus tugas yang akan dituju. Hasil monitoring tersebut sebagai bahan untuk mengetahui kemajuan, hasil dan prestasi yang telah dicapai serta hambatan yang ada disekolah. kedua, memantau langsung kinerja secara menyeluruh, meliputi kinerja manajemen, kepemimpinan kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib, dan prestasi sekolah baik intra maupun ekstrakurikuler. Semua catatan disampaikan kepada sekolah untuk memperoleh tanggapan dalam upaya memajukan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui angket, wawancara dan dokumentasi, bila ditinjau dari segi karakteristik

MPMS yang ada, acuan indikator kinerja komite sekolah, dan hasil penelitian atau jurnal terkait peran komite sekolah, peran komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta dalam memantau pelaksanaan program di SMK N 3 Yogyakarta telah sesuai dengan hasil 76,19% atau masuk kategori berhasil. Untuk menciptakan teamwork yang baik dalam pelaksanaan program dan kebijakan sekolah, Komite sekolah berupaya menggandeng warga sekolah dalam rangka menyerap informasi sebanyak mungkin. Komite sekolah berupaya melakukan pengawasan terutama dalam kontrol penggunaan anggaran. Agar tidak ada temuan atau dana diluar APBS. Selain itu komite sekolah juga memantau kegiatan belajar siswa. Dari sana komite akan menyampaikan hasil pemantauan dalam rapat resmi di sekolah. Apabila ada temuan, komite akan mengkomunikasikan kepada sekolah. Namun apabila yang tidak dapat diperbaiki oleh sekolah, komite dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan sebagai fungsi mengontrol penerapan kebijakan sekolah. Kekurangan komite sekolah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yaitu belum maksimalnya peran anggota komite khususnya dari unsur diluar sekolah. Selama ini pengawasan dilakukan paling banyak oleh Ketua dan Wakil Ketua komite sekolah. Perlu kesadaran dari anggota komite sekolah untuk meluangkan waktu berkunjung ke sekolah.

b. **Memantau serta menindak lanjuti hasil belajar siswa.**

Dalam Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, peningkatan mutu dapat dicapai apabila ada 'Evaluasi dan Perbaikan secara berkelanjutan'. Evaluasi belajar yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses mengajar di sekolah. Karena itu fungsi evaluasi penting untuk meningkatkan mutu peserta didik dan sekolah. Untuk melakukan perbaikan secara terus menerus harus ada sistem mutu yang baku sebagai acuan. Diantaranya struktur organisasi, tanggungjawab, prosedur, proses dan sumberdaya untuk menerapkan manajemen mutu(Depdiknas :2001).

Menurut Ali Imron(2004 :94-109) tujuan dan fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik menampilkan performa sebagai mana yang dikehendaki (sudah sesuai atau belum, sudah betul atau belum). Kemudian tindak lanjut dari evaluasi peserta didik meliputi remidi, mengulangi materi, menentukan kenaikan, menentukan kelulusan, bimbingan dan penyuluhan dan pelaporan. Dari tindak lanjut hasil evaluasi tersebut, keseluruhan dilaksanakan oleh masing-masing tenaga pendidik. Komite sekolah disini akan menerima pelaporan hasil belajar dari sekolah sebagai tindak lanjut evaluasi peserta didik.

Dalam lampiran Permendiknas No.19 Tahun 2007 Point 5.d mengenai bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, untuk kegiatan hasil belajar peserta didik "sekolah/madrasah melaporkan

hasil belajar kepada orang tua peserta didik, Komite Sekolah/ Madarasah, dan institusi di atasnya.

Berdasarkan hasil penelitian peran komite sekolah dalam menindaklanjuti hasil belajar siswa mencapai 63,74% dengan kategori kurang berhasil. Kegiatan yang dilaksanakan oleh komite sekolah adalah memantau dan memberikan masukan kepada sekolah dari laporan hasil belajar siswa. Berdasarkan laporan dari sekolah inilah komite sekolah memberikan masukan tentang perlunya perbaikan atau peningkatan sistem pembelajaran atau kekurangan yang lain sesuai dengan peran dalam memberikan pertimbangan terkait sistem pembelajaran di sekolah. Masukan dapat bersifat formal pada saat rapat atau secara informal melalui komunikasi dengan wakil kepala sekolah atau dengan guru.

Kegiatan evaluasi dan pemantauan idealnya dilakukan tidak hanya pada saat penerimaan rapat evaluasi bersamaan dengan penerimaan rapor. Pemantauan melalui kunjungan juga bisa menjadi dasar evaluasi dari komite sekolah. Kendala yang terjadi disini adalah intensitas pemantauan dan kunjungan ke sekolah dari anggota komite sangat minim. Padahal dengan seringnya melakukan kunjungan tentunya akan tahu secara langsung kekurangan yang terjadi. Seperti telah diungkapkan oleh ketua komite sekolah dalam wawancaranya,

"Evaluasi hasil belajar, kalau itu ranahnya termasuk ranah sekolah. Komite Sekolah hanya berperan dengan masukan secara non formal. Sebab waktu komite sekolah sendiri sedikit. Hanya saja komite selalu fokus untuk memperjuangkan hak-hak

yang diperoleh anak didik. Dan hubungan sekolah dengan komite terjadi sangat bagus, karena diharapkan semua guru kenal dengan peran dan anggota komite. Dengan komunikasi yang baik ini, komite sekolah memperoleh informasi penting dari sekolah sehingga dapat memberikan masukan. Hanya saja kembali ke personal masing-masing karena tidak semua anggota punya waktu untuk datang ke sekolah.”(W/SR/25/09/15)

Menurut Depdiknas(2001:30) relevansi mutu terkait hasil pembelajaran siswa adalah adanya peningkatan prosentase lulusan. Jadi meskipun peran komite bersifat informal dan tidak berdampak secara langsung, namun dua(2) tahun terakhir hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Dari hasil penetapan kelulusan siswa kelas XII di SMK N 3 Yogyakarta pada tahun 2014 ada 4 siswa sedangkan pada tahun 2015 hanya ada 1 siswa. (Lihat :Lampiran 16).

Meskipun mampu meningkatkan jumlah lulusan namun itu belum memperbaiki jumlah siswa yang tidak naik kelas, yang setiap tahun jumlah siswa tinggal kelas tidak tetap. Tetapi jumlah siswa yang tinggal kelas tergolong tinggi. Berkaitan dengan hasil belajar siswa. Kendala yang dihadapi di SMK N 3 Yogyakarta saat ini adalah siswa *drop out* dan tinggal kelas. Dari hasil dokumentasi, untuk tahun ajaran 2013-2014 jumlah siswa tinggal kelas mencapai 40 siswa(Lihat : Dokumentasi 16). Sementara jumlah siswa yang *drop out* atau diberi surat pindah sekolah mencapai 23 siswa(Lihat : Dokumentasi 17). Alasan kepindahan bermacam-macam. Menurut Ali Imron (2004:126-127) sebab-sebab drop out diantaranya (1) rendahnya kemampuan yang dimiliki, (2) tidak punya biaya untuk sekolah, (3) karena sakit dan tidak tahu kapan sembuh,(4)

karena bekerja, (5) karena membantu orangtua bekerja, (6) karena di dikeluarkan oleh sekolah, (7) karena peserta didik ingin keluar, (8) karena kasus pidana, (9) karena sekolah dianggap tidak menarik oleh peserta didik.

Kasus *drop out* atau tinggal kelas merupakan hal yang selalu ada dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Sebagai bagian bahwa masih ada kekurangan dalam penerapan sistem pendidikan dan pembelajaran. Namun dalam hal ini kasus tersebut dapat dicegah atau diminimalisir. Misalnya untuk kasus karena biaya, komite sekolah hendaknya dapat menjembatani dengan pihak pemberi bantuan dan memberikan rekomendasi kepada sekolah agar siswa dapat menerima bantuan. Untuk kasus berkaitan dengan keluarga. Peran komite sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat perlu ditingkatkan sehingga ada ketercapaian atau mufakat antara sekolah dan masyarakat dalam menyelesaikan atau mencegah kasus *drop out*.

Selain memantau hasil belajar siswa, komite sekolah juga memantau output sekolah melalui penelusuran alumni. Selain mengacu dari hasil angket penelusuran siswa, alumni SMK N 3 Yogyakarta terpantau melalui komunitas resmi dari sekolah yang tergabung dalam ALTIS (Alumi Tiga Jetis). Dengan adanya wadah tersebut komite sekolah dapat memantau dalam penelusuran alumni dan juga secara tidak langsung menjadi promosi bagi sekolah.

Dari hasil penelitian yang diperoleh mengacu terhadap peraturan yang berlaku dan referensi yang relevan indikator kinerja komite sekolah telah dilaksanakan. Hasil yang ditunjukkan belum sesuai atau belum mencapai indikator berhasil karena minimnya peran anggota komite sekolah dalam melakukan pemantauan sebagai bahan untuk memberikan masukan atau evaluasi. Sehingga perlu ada peningkatan peran dalam memantau hasil belajar, dan koordinasi dengan sekolah dalam upaya pencegahan siswa *drop out* dan tidak naik kelas.

Berdasarkan sub indikator diatas hasil angket bila ditinjau dari hasil wawancara, dokumentasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, partisipasi komite sekolah sebagai badan pengontrol mencapai 69,70% atau dalam kategori kurang berhasil. Partisipasi komite sekolah yang telah berjalan menunjukkan adanya perbaikan karakteristik mutu di sekolah diantaranya membentuk *teamwork* yang baik melalui kerjasama, menggandeng pihak terkait dalam pemantauan program di sekolah, dan memantau kegiatan belajar siswa. Dalam rangka evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan kegiatan komite sekolah ditunjukkan melalui pemberian masukan terhadap hasil belajar siswa. Hanya saja, hasilnya belum sesuai seperti masih tingginya angka tinggal kelas dan kasus *drop out*. Diperlukan pembinaan dari masing-masing siswa yang bermasalah.

4. Partisipasi Komite Sekolah Sebagai Badan Penghubung

a. Melakukan Kerjasama dengan Masyarakat

Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah kegiatan kerjasama dan kolaborasi dengan masyarakat merupakan salah satu karakter bahwa sekolah memiliki budaya mutu. Selain budaya mutu, kerjasama merupakan cerminan karakteristik MPMBS bahwa sekolah yang memiliki teamwork yang baik, dan juga wujud partisipasi tinggi masyarakat (Depdiknas :2001).

Hubungan sekolah dengan masyarakat hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Sebaliknya sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, sekolah berkewajiban untuk memberi penerangan tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Sebaliknya, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat, terutama terhadap sekolah. Dengan perkataan lain, antara sekolah dan masyarakat harus dibina suatu hubungan yang harmonis (Mulyasa, 2003:50).

Berdasarkan hasil kuesioner komite sekolah, peran komite sekolah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat mencapai 70,45% dengan kategori pencapaian berhasil. Ini artinya komite sekolah telah berupaya untuk menciptakan *link and match* antara sekolah dan DU/DI melalui kerjasama baik untuk kegiatan praktik kerja industri maupun perekrutan lulusan/ tenaga kerja. Hal ini sesuai bila di tinjau dari hasil yang diperoleh dengan banyaknya DU/Di yang menjalin kerjasama dengan sekolah. Khususnya dalam kegiatan prakerin, dapat menampung kebutuhan siswa untuk 20 rombongan belajar yang mencapai lebih dari 500 siswa. Dalam pelaksanaannya kegiatan PI biasanya dibagi dalam 2 gelombang.(Lihat : Dokumentasi 19).

Dari hasil penelitian tersebut komite sekolah memiliki peran penting sebagai badan penghubung antara sekolah dan masyarakat untuk menciptakan kerjasama antara sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang terjalin antara sekolah dan masyarakat diwujudkan melalui kontrak kerja sama (MOU). Kerja sama tersebut untuk mendukung terselenggaranya Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Sesuai dengan Kepmendiknas No. 323 tahun 1997 dijelaskan Praktik industri atau praktik kerja industri adalah suatu program yang bersifat wajib tempuh bagi siswa SMK yang merupakan bagian dari Program Sistem Ganda. Dalam pedoman teknis pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda pada SMK disebutkan, Praktik Kerja Industri adalah praktik keahlian produktif yang

dilaksanakan di industri atau perusahaan yang berbentuk kegiatan mengajarkan pekerjaan produksi dan jasa.

Selain kerjasama dalam perwujudan PSG, peran komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta dalam rangka menjalin kerjasama dengan masyarakat diwujudkan melalui pembinaan hubungan antara sekolah dengan masyarakat dan stakeholder melalui rapat-rapat dan undangan kegiatan di sekolah. Komite sekolah juga melakukan kerjasama dalam perekrutan lulusan. (Lihat : Dokumentasi 20).

Menurut Dhuta Sumayoga (2013: 93-94) peran sebagai penghubung dilaksanakan dengan efektif oleh komite sekolah SDN 1 Banjarmangu. Dari enam indikator peran hanya dua peran yang belum efektif yaitu memberikan laporan kepada masyarakat dan penjangaan kemungkinan kerjasama. Peran paling efektif adalah menampung menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan masyarakat. Menurut kepala sekolah peran ini dilaksanakan ketika ada rapat wali murid. Hal tersebut menunjukkan bahwa rapat merupakan salah satu faktor meningkatkan keefektifan suatu peran.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, jika dilihat terhadap kesesuaian peraturan yang ada dan hasil penelitian yang relevan, terkait peran komite sekolah sebagai badan penghubung dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat telah sesuai. Hasil yang baik ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat atau orangtua murid dalam rapat sekolah. selain keterlibatan orangtua

murid, hasil baik ditunjukkan dengan banyaknya DU/DI yang bekerjasama dalam kegiatan prakerin. dan kerjasama dalam perekrutan lulusan.

b. Menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat

Dalam sistem Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, kegiatan menampung ide, tuntutan dan kebutuhan masyarakat merupakan cerminan karakteristik MPMBS. Dalam hal ini bahwa Sekolah punya sikap responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Namun untuk itu perlu ada keseimbangan keterbukaan sekolah dan akuntabilitas sekolah untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap masukan yang diperoleh dan dijalankan oleh sekolah. peran komite dalam hal ini menjadi penghubung dalam memperoleh aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan hasilnya kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban(Depdiknas :2001). Partisipasi Komite Sekolah sebagai badan Penghubung dalam rangka menampung aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat mencapai 71,59% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut diantaranya menyediakan fasilitas untuk menampung masukan dari masyarakat, menyediakan fasilitas penyalur bantuan, menampung dan mensosialisasikan hasil musyawarah, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kegiatan yang telah terlaksana dengan baik yaitu

menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat. seperti diungkapkan oleh bapak SR dalam wawancaranya,

“Kebanyakan orang tua siswa yang tidak kenal dengan komite sekolah akan melakukan pengaduan melalui sekolah. Tetapi bila mengenal anggota komite sekolah maka akan mengadu melalui komite sekolah. Kebanyakan aduan bukan untuk mengadu masalah sekkolah tetapi masyarakat ingin memberikan suport meskipun hanya lewat kata-kata, sebab anaknya sekolah di SMK. Jadi kalau yang tidak kenal lewat sekolah kalau yang kenal melalui komite.”(W/SR/24/09/15)

Selain melalui komite, ada juga kartu pengaduan dan saran yang berada di sekolah untuk menampung masukan dari orangtua murid yang ingin memberikan masukan langsung di sekolah. komite sekolah juga menerima laporan masukan masyarakat dari sekolah melalui angket kepuasan orang tua murid yang dibagikan oleh sekolah. pengaduan dan laporan dari masyarakat kemudian disampaikan dalam rapat komite sekolah. Untuk penyediaan fasilitas penyalur bantuan, selama ini komite sekolah belum menyediakan, mengingat minimnya bantuan sarana-prasarana dari masyarakat, baik masyarakat umum maupun DU/DI.

Untuk kegiatan sosialisasi, saat ini telah terlaksana baik seosialisasi melalui anggota komite tidak tetap atau sosialisasi melalui media kepada orangtua murid. Sosialisasi dilakukan melalui surat edaran dan pemberitahuan. (Lihat: Lampiran 11). Sedangkan untuk kegiatan laporan dari komite sekolah, saat ini belum dilaksanakan dengan baik. Untuk laporan sendiri komite sekolah saat ini belum membuat laporan khusus secara tertulis kepada sekolah. Komite sekolah hanya memberikan laporan secara lisan berdasarkan

pengamatan di sekolah selama satu semester. Hanya saja karena kesibukan dari masing-masing anggota komite terutama dari unsur dluar sekolah, pengamatan atau kunjungan dari komite sekolah tidak maksimal. Seperti dikutip dari petikan wawancara dengan bapak AS,

“Harapannya memang semua anggota komite sekolah sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan sekolah harapannya memang pro-aktif. Tetapi kita atau dari pemerintah dan masyarakat tidak dapat memaksa atau mematok. Kalau dari bapak ibu guru bisa memastikan tetapi kalau komite sekolah tidak mungkin. Pada dasarnya kembali kepada potensi dari komite sekolah. Ada anggota yang aktif, ada beberapa yang tidak namun diharapkan hal tersebut bisa melengkapi.”(W/AS/05/09/15)

Sedangkan laporan pertanggungjawaban komite sekolah dibuat pada akhir masa jabatan komite sekolah berdasarkan laporan sekolah. Seperti dikutip dalam wawancara dengan bapak SR selaku Ketua Komite Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta,

“Laporan pertanggungjawaban dibuat pada masa pergantian jabatan. Dengan capaian yang sudah tertuang di laporan sekolah. Kemudian anggota komite sekolah yang dari diundang untuk mengemukakan apa yang telah ditemui dan dilakukan selama masa jabatan. Laporan disusun menjadi satu dimana telah merangkul tugas-tugas anggota.”(W/SR/24/09/15)

Menurut upik supriyati (2013: 125-126) dalam pelaksanaan program sekolah di SMP n 1 Turi peran komite sekolah sebagai badan penghubung diantaranya (a) mensosialisasikan program dan kebijakan sekolah pada masyarakat, (b) memfasilitasi berbgadi masukan/ saran/ usulan program dan kebijakan sekolah, (c) menampung pengaduan dan keluhan terhadap pelaksanaan

prgram dan kebijakan sekolah, (d) mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan terhadap pelaksanaan prgram dan kebijakan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian melalui angket, wawancara dan dokumentasi terhadap peraturan yang ada, buku pedoman indikator kinerja komite sekolah, dan hasil penelitian yang relevan, peran komite sekolah sebagai badan penghubung dalam rangka menampung menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat telah sesuai dengan pencapaian sebesar 71,59% dengan kategori pencapaian berhasil. Kegiatan Komite Sekolah yang telah terlaksana dengan baik diantaranya kegiatan menampung aduan atau masukan dari masyarakat, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan yang belum terlaksana dengan baik adalah kegiatan penyusunan laporan komite sekolah, khususnya kegiatan laporan evaluasi. Mengingat laporan seharusnya disusun oleh tiap-tiap seksi yang ada dalam komite sekolah. Sedangkan, peran masing-masing anggota dalam pengamatan langsung kesekolah tidak sama sehingga pencapaiannya masih kurang.

Berdasarkan sub indicator diatas hasil angket bila ditinjau dari hasil wawancara, dokumentasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, partisipasi komite sekolah sebagai badan pengontrol mencapai 71,02% atau dalam kategori berhasil. Partisipasi komite sekolah yang telah berjalan menunjukkan adanya perbaikan karateristk mutu di sekolah diantaranya sekolah memiliki budaya mutu kerjasama dan partisipasi

tinggi dari masyarakat melalui kontrak kerjasama(MOU) dengan DU/DI, perekrutan lulusan, mengajak DU/DI dalam kegiatan Prakerin sebagai perwujudan PSG. Sekolah menunjukkan sikap responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan, dan menunjukkan akuntabilitas sekolah kepada masyarakat dengan menyediakan sarana pengduan, menampung aduan dan masukan masyarakat, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi komite sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Partisipasi Komite Sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta masuk kategori berhasil dengan persentase 70,00%.
2. Partisipasi Komite Sekolah komite sekolah sebagai badan pendukung dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta masuk kategori kurang berhasil dengan persentase 69,77%.
3. Partisipasi Komite Sekolah sebagai badan Pengontrol dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta masuk kategori Kurang Berhasil dengan persentase 69,70%.
4. Partisipasi Komite Sekolah sebagai badan Penghubung dalam pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta masuk kategori berhasil dengan persentase 71.02%.
5. Ada Kendala yang menghambat kegiatan komite sekolah yang berasal dari faktor internal dan eksternal

B. SARAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung perlu ditingkatkan dalam upaya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat khususnya komitmen anggota komite tidak tetap untuk menggandeng dan bekerjasama dengan orangtua murid.
2. Peran kmite sekolah Sebagai badan pengontrol perlu ditingkatkan dalam upaya menindaklanjuti hasil belajar siswa. Diperlukan peningkatan intensitas kunjungan dalam memantau kegiatan siswa.
3. Perlu adanya peningkatan kesadaran dari anggota komite sekolah untuk rutin melakukan kunjungan kesekolah. Selain itu perlu peningkatan intensitas pertemuan rutin antara anggota komite sekolah untuk menjalin komunikasi yang lebih baik antar anggota komite.
4. Perlu ada kebijakan yang disetujui antara dinas, kepala sekolah, dan komite terkait dengan penarikan uang investasi sekolah, sehingga tidak menghambat program kerja dalam APBS.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad sanusi(2010). *Balanced score card*, Suatu Pendekatan Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.bandung.Pt. remaja rosdakarya
- Ali Imron.(2004).*manajemen peserta didik berbasis sekolah*.Depdiknas. Universitas negeri malang. Malang
- Andi Sujatmiko.(2012).Peran Serta Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SD N 2 Wates Kulonprogo.FIP. skripsi tidak diterbitkan
- Andi supangat (2008). Statistika : dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik.Jakarta. Kencana
- Atus Sundari & Rahayu Susilowati.(2011).Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah(Studi pada Pendidikan Berbasis Sekolah di SMK N 1 Pesisir Tengah kabupaten Lampung Barat).Jurnal Imliah Adinistrasi publik dan Pembangunan(vol.2,No.1 Tahun 2011).p.225
- Deni darmawan(2014). Metode penelitian Kuantitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Depdiknas.(2001).Partisipasi Masyarakat.Jakarta.Depdiknas
- (2001). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta. Depdiknas
- (2003). Acuan Operasional Dan Indikator Kinerja Dewan Pendidikan. Jakarta. Depdiknas
- (2007).Pemberdayaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.Jurnal tidak diterbitkan2007. Jakarta
- Dhuta Sukma Yoga.(2013).Keefektifan Peran Komite Sekolah Dasar Negeri 1 Banjarmangu Dan Sekolah Dasar Negeri 3 Kesenet Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Pascasarjana UNY Thesis
- Direktorat pendidikan menengah kejuruan jakarta.(1997).Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor323/U/1997 Tentang:*Penyelenggaraann Pendidikan Sistem Ganda Pada Sekolah Menengah Kejuruan*.Jakarta. Drektorat Penididkan Menengah Kejuruan Jakarta
- Dwisa Riana(2012). Statistika Deskriptif Itu Mudah. Tangerang. Jelajah Nusa

- Echols, John M. & Hasan Shadily.(2000). Kamus Inggris Indonesia.Jakarta.Gramedia
- Edwards Sallis.(2010).Manajemen Mutu terpadu Pendidikan. Yogyakarta.iRsoSS
- Engkoswara & Komariah.(2010).Administrasi Pendidikan.Bandung.Afabeta
- Fasli Djalal & Dedi Supriadi (eds). (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.44 Tahun 2002. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.Jakarta.Depdiknas
- Junaedi.(2011). Kontribusi Peran Komite Sekolah Terhadap Mutu Layanan Pendidikan di SMK N 1 Depok. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta
- M Misbah.(2009). Peran dan Fungsi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.Jurnal Pemikiran alternatif kependidikan (vol.14 No.1 Tahun 2009). Hlm. 3
- Made Pidarta.(2004).Manajemen Pendidikan Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta
- Manshur riadli.(2013). Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah Di Se Kabupaten Sleman.UNY.skripsi tidak diterbitkan
- Margono.(2003). Metodologi Penelitian Pendidikan.Jakarta. Rineka Cipta
- Matin.(2014).Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya.Rajagrafindo Persada.Jakarta
- Mulyasa.(2003). Manajemen Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implikasi. Rosda Karya. Bandung
- Mulyono.(2008).Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan.Yogyakarta.Ar-Ruzz Media
- Nico Setiawan.(2012).Partisipasi Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ekstra Kurikuler Di SD Negeri Se Kecamatan Muntilan.FIP UNY skripsi
- Nurkolis.(2003). Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model Dan Aplikasi.Jakarta.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Peraturan Gubernur No.25 Tahun 2014. *Tata Cara Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/ Madrasah*. Yogyakarta

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.30 Tahun 2010. *Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan*. Jakarta. Mendiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 54 Tahun 2013. *Standar Kompetensi Lulusan*. Jakarta. Depdikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 64 Tahun 2013. *Standar Isi*. Jakarta. Depdikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 65 Tahun 2013. *Standar Proses*. Jakarta. Depdikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 Tahun 2013. *Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta. Depdikbud
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007. *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakarta. Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007. *Standar Kepala Sekolah*. Jakarta. Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 48 Tahun 2008. *Standar Sarana Prasarana SMK*. Jakarta. Depdiknas
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 69 Tahun 2009. *Standar Pembiayaan*. Jakarta. Depdiknas
- Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010. *Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Sam M Chan & Tuti T sam.(2006). Analisis SWOT : Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah. Rajawali Press
- Siti irene A.D.(2011).Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan.Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Sri Sundari.(2001). Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Partisipasi Orang Tua Dan Masyarakat Untuk Mendukung Keberhasilan Program Sekolah Sebagai Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Pertiwi II Kecamatan Bandung Wetan. Makalah.Bandung
- Sugiaryo.(2005).Peran Dewan Pendidikan dan Komite Skeolah dalam Formulasi Kebijakan Pelayanan Publik.Makalah.Surakarta
- Sugiyono(2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabetha.bandung

- Suharno.(2008). Manajemen Pendidikan Buku Pengantar Bagi Calon Guru. Solo. UNS Press
- Suharsimi Arikunto.(2008).Manajemen Pendidikan. Yogyakarta. Aditya Media
-(2005).Manajemen Penelitian. Yogyakarta. Aditya Media
- Upik Supriyati.(2013). Pelaksanaan Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di Smp Negeri 1 Turi Dan 3 Turi. Pascasarjana UNY thesis
- Undang-Undang No.25 Tahun 2000. *Program Pembangunan Nasional*.Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.Jakarta. Sekretaris Negara Republik Indonesia
- Utami Dewi Septi Purnami.(2012).Peran Komite Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Sma N 1 Temon. FIP UNY. Skripsi tidak diterbitkan
- Windi Retno Bintari.(2014).Peran Komite Sekolah Dalam Meingkatkan Mutu Sekolah Di Sd Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Tahun Ajaran 2011/2012.FIP UNY. Skripsi

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK



Alamat : Karangmalang Yogyakarta, Telepon 586168 pes. 256, 289, 292, 586734

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd
NIP : 19540809 197803 1 005
Jurusan : Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik UNY

menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa

Nama : Kismanto
NIM : 09504241009
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik UNY
Judul TAS : Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3
Yogyakarta

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan :

- Layak digunakan untuk penelitian
 Layak digunakan dengan perbaikan
 Tidak Layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan saran / perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2015

Validator

Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd

NIP. 19540809 197803 1 005

Catatan :

Beri tanda ✓

Hasil Validasi Instrumen Penelitian TAS

Nama Mahasiswa : Kismanto

NIM : 09504241009

Judul TAS

: Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta

No.	Variabel	Saran/ Tanggapan
	Komentor Umum/ Lain-lain <i>Untuk penghomat Responden, Gunaakan kate " Bp/ibu sebagai Responden kate "anda"</i>	

Yogyakarta, 15... Mei 2015
 Validator




Prof. Dr. Herminarto Sofyan, M.Pd
 NIP : 19540809 197803 1 005



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK



Alamat : Karangmalang Yogyakarta, Telepon 586168 pes. 256, 289, 292, 586734

**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Martubi, M.Pd, M.T
NIP : 19570906 198502 1 001
Jurusan : Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik UNY

menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa

Nama : Kismanto
NIM : 09504241009
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif Fakutas Teknik UNY
Judul TAS : Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3
Yogyakarta

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan :

- Layak digunakan untuk penelitian
 Layak digunakan dengan perbaikan
 Tidak Layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan saran / perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Mei 2015
Validator

Martubi, M.Pd, M.T
NIP. 19570906 198502 1 001

Catatan :

- Beri tanda ✓

Hasil Validasi Instrumen Penelitian TAS

Nama Mahasiswa : Kismanto

NIM : 09504241009

Judul TAS

: Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta

No.	Variabel	Saran/ Tanggapan
	Senus	Tersurat bealimat pd. instrumen perlu diper- baiki strukturny; usg. menambahkan responden dan agar lebih profesional (kurusny- jglat)
	Komentar Umum/ Lain-lain	

Yogyakarta, Mei 2015
Validator

Martubi M.Pd, M.T

NIP : 19570906 198502 1 001



**SURAT PERNYATAAN VALIDASI
INSTRUMEN PENELITIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwiwaruji, SPd
NIP : 19751221 200012 1 002
Jabatan : Sekretaris Dewan Sekolah SMK Muh Imogiri

menyatakan bahwa instrumen penelitian TAS atas nama mahasiswa

Nama : Kismanto
NIM : 09504241009
Program Studi : Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik UNY
Judul TAS : Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3
Yogyakarta

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TAS tersebut dapat dinyatakan :

- Layak digunakan untuk penelitian
- Layak digunakan dengan perbaikan
- Tidak Layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan

dengan saran / perbaikan sebagaimana terlampir.

Demikian agar digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Mei 2015



Validator

Dwiwaruji, SPd

Catatan :

- Beri tanda ✓

ANGKET

PARTISIPASI MASYARAKAT (KOMITE SEKOLAH) DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BEBASIS SEKOLAH

DI SMK N 3 YOGYAKARTA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Masa Kerja :

Pendidikan Terakhir : SPG/DII/DIII/SI/SII/SIII *)

Jabatan dalam komite sekolah :

Dari unsur :

*) *coret yang tidak perlu*



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2015

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu Komite Sekolah SMK N 3 Yogyakarta

Dengan hormat,

Dalam kesibukan Bapak/Ibu saat ini, perkenankanlah saya mohon Bapak/Ibu Guru dapat menyisihkan waktu untuk mengisi angket penelitian seperti yang saya lampirkan.

Angket ini sebagai upaya untuk mengambil data penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) Dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Bebas Sekolah Di Smk N 3 Yogyakarta”, sebagai skripsi saya di Universitas Negeri Yogyakarta.

Angket ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan tidak ada pengaruhnya terhadap jabatan Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu kesungguhan dan kesediaan dalam mengisi angket ini sangat berarti bagi kelancaran penelitian saya.

Atas kesedian Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini, saya mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan Bapak/Ibu mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Peneliti,

Kismanto

NIM.09504241009

ANGKET PENELITIAN UNTUK PENGURUS KOMITE SEKOLAH

A. Petunjuk Pengisian

1. Pada Kuesioner Pertama untuk angket tertutup, silahkan jawab semua pertanyaan dengan memberikan tanda check (√) pada salah satu kolom alternatif jawaban YA/TIDAK.
2. Kemudian berikan jawaban singkat atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan jawaban bapak/ibu dalam angket tertutup.
3. Untuk Kuesioner kedua, silahkan Bapak/ Ibu memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan.

4. Contoh Pengisian :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
	Apa saja yang bapak/ibu lakukan sebagai badan pertimbangan dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan :		
1.	Apakah komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RKAS oleh sekolah?	√	
2.	Apakah bapak/ibu memberikan usulan atau saran dalam penyusunan dalam penyusunan RKAS? Jika YA, usulan /saran yang bapak/ibu usulkan adalah :penggunaan dana anggaran pengadaan sarana prasarana Bukti tertulis untuk usulan bapak/ibu tersebut? <input checked="" type="checkbox"/> Notulen <input type="checkbox"/> Dokumen lain : ...daftar hadir....	√	

5. Apabila ada jawaban salah dan ingin diganti, maka berilah tanda silang atau coretlah pada tanda cek awal kemudian berikan tanda cek yang baru pada jawaban yang dianggap benar !

B. Berilah tanda (√) pada salah satu kolom jawaban yang tersedia!

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	
		YA	TIDAK
	<p>Apa saja yang bapak/ibu lakukan sebagai badan pertimbangan dalam memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan :</p>	YA	TIDAK
1.	Apakah komite sekolah dilibatkan dalam penyusunan RKAS oleh sekolah?		
2.	<p>Apakah bapak/ibu memberikan usulan atau saran dalam penyusunan dalam penyusunan RKAS?</p> <p>Jika YA, usulan /saran yang bapak/ibu usulkan adalah :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bukti tertulis untuk usulan bapak/ibu berupa :</p> <p><input type="checkbox"/> Notulen</p> <p><input type="checkbox"/> Daftar hadir</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumen lain :</p>		
3.	<p>Apakah bapak/ibu ikut melakukan pendataan kondisi sosial ekonomi orang tua dan sumber daya pendidikan sekitar yang dapat diterapkan di sekolah?</p> <p>Jika YA, Bukti tertulis untuk data-data sumberdaya pendidikan yang telah bapak/ibu data berupa :</p> <p><input type="checkbox"/> Daftar kondisi sosial ekonomi orang tua siswa</p> <p><input type="checkbox"/> Daftar sumber daya pendidikan masyarakat</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumen lain</p>		
4.	<p>Apakah bapak/ibu melakukan analisis data kondisi sosial dan sumber daya masyarakat tersebut dan memberikan rekomendasi kepada sekolah ?</p> <p>Jika YA, rekomendasi yang bapak/ibu usulkan untuk dijadikan pertimbangan kepada sekolah adalah</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bukti tertulis dalam kegiatan berupa :</p> <p><input type="checkbox"/> Surat Rekomendasi</p> <p><input type="checkbox"/> Notulen</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumen lain</p>		
5.	<p>Apakah komite sekolah memiliki standar untuk tenaga kependidikan guru dan non guru yang dapat bekerja atau diperbantukan dalam sekolah ?</p> <p>Acuan standar tenaga kependidikan di sekolah berupa :</p> <p><input type="checkbox"/> Permendikbud No.16 tahun 2007</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumen lain :</p>		
6.	Apakah bapak/ibu ikut melakukan pendataan formasi dan jumlah tenaga pendidikan yang diperlukan sekolah?		

	<p>Jika YA, bukti untuk mendasari kegiatan berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Daftar formasi guru <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
7.	<p>Apakah selama ini sekolah mengalami kekurangan tenaga kependidikan guru dan non guru di sekolah?</p> <p>Jika YA, apakah bapak/ibu memberikan rekomendasi tenaga kependidikan yang dapat bekerja atau diperbantukan kepada sekolah?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
8.	<p>Apakah bapak/ibu memberikan masukan terhadap pelaksanaan kurikulum yang diterapkan di sekolah?</p> <p>Jika YA, saran/masukan yang bapak/ibu berikan untuk pelaksanaan kurikulum sekolah adalah :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Apakah masukan atau usulan tersebut dibuat dalam surat rekomendasi tertulis?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
9.	<p>Memberikan usulan atau saran terhadap sistem pembelajaran yang diterapkan.</p> <p>Jika YA, usulan yang bapak/ibu berikan dalam sistem pembelajaran adalah :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bukti tertulis untuk usulan bapak/ibu tersebut berupa:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
10.	<p>Apakah sarana prasarana sekolah saat ini sudah mencukupi dan sesuai standar yang berlaku ?</p>		
11.	<p>Apakah komite sekolah memberikan pertimbangan terhadap standar fasilitas sarana dan prasarana sekolah ?</p> <p>Jika YA, masukan yang bapak/ibu berikan kepada sekolah adalah :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Dokumen yang digunakan komite sekolah sebagai standar sarana prasarana di sekolah berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Permendiknas No.40 Tahun 2008 <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
12.	<p>Apakah komite sekolah melakukan pendataan kondisi sarana dan prasarana sekolah sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi?</p>		

	Jika YA, Bukti untuk kegiatan tersebut berupa : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Daftar jumlah sarana-prasarana sekolah <input type="checkbox"/> Daftar kondisi sarana prasarana sekolah <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
	Apa saja yang bapak/ibu lakukan sebagai badan pendukung komite sekolah dalam mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan :	YA	TIDAK
13.	Apakah komite sekolah melakukan rapat berkala atau insidental dengan melibatkan orang tua murid dan masyarakat ?		
	Jika YA, berapa lama periode rapat berkala dilakukan dalam 1 tahun ?		
14.	Apakah komite sekolah memiliki program kerja untuk mencarikan dana bantuan dari DU/DI untuk membantu siswa yang tidak mampu ?		
	Jika YA, adakah DU/DI yang bersedia memberikan bantuan?		
	Jika YA, apakah bantuan DU/DI cukup untuk membantu pembebasan biaya bagi siswa kurang mampu ?		
	Bukti untuk kegiatan tersebut berupa : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Daftar penerimaan bantuan dana <input type="checkbox"/> Bukti transfer <input type="checkbox"/> Buku rekening bank <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
15.	Apakah komite sekolah memberikan dukungan untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa ?		
	Jika YA, bentuk dukungan seperti apa yang diberikan?		
16.	Apakah komite sekolah menghimbau dan melakukan pendekatan kepada orang tua siswa untuk menjadi nara sumber dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sekolah lainnya ?		
	Jika YA, adakah orang tua yang bersedia menjadi narasumber kegiatan ?		
	Jika YA, Bukti untuk kegiatan tersebut berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumentasi <input type="checkbox"/> Jadwal kegiatan <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
17.	Apakah komite sekolah memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan siswa ?		
	Jika YA, kegiatan apa saja yang dilakukan dalam mendukung pemeriksaan kesehatan siswa ?		

	<p>.....</p> <p>Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bukti untuk kegiatan tersebut berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jadwal pemeriksaan <input type="checkbox"/> Lembar pengumuman <input type="checkbox"/> Dokumentasi kegiatan <p>Dokumen lain :</p>		
18.	Apakah komite sekolah memiliki program dalam pencegahan dan pembrantasan penyebarluasan narkoba di sekolah ?		
	<p>Jika YA, program seperti apa yang diadakan untuk melakukan pencegahan ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
19.	Apakah komite sekolah melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk membantu pencegahan dan pembrantasan narkoba di sekolah?		
	<p>Apakah bapak/ibu lakukan sebagai badan pendukung komite sekolah dalam menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan?</p>	YA	TIDAK
20.	Apakah bapak/ibu terlibat dalam verifikasi RKAS yang diajukan sekolah?		
21.	Apakah bapak/ibu memberikan usulan atau saran sebagai perubahan RKAS?		
	<p>Jika YA, usulan yang bapak/ibu usulkan adalah :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bukti tertulis untuk usulan bapak/ibu berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Notulen <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
22.	Apakah bapak/ibu ikut mengawasi dan mengesahkan RKAS bersama Kepala Sekolah dalam rapat pleno Komite Sekolah?		
23.	Apakah komite sekolah memotivasi masyarakat menengah atas untuk meningkatkan komitmen dalam peningkatan mutu, khususnya dalam pembiayaan pendidikan ?		
	<p>Jika YA, bagaimana bentuk motivasi yang diberikan kepada masyarakat?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Apakah selama ini ada peningkatan dari masyarakat untuk membantu pembiayaan pendidikan?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

24.	Apakah bapak/ibu ikut mendorong orang tua murid untuk membayar uang investasi tepat waktu sebagai bagian pengumpulan dana abadi sekolah ?		
	Jika YA, bagaimana bentuk upaya komite sekolah untuk mendorong orang tua murid membayarkan kewajibannya ke sekolah tepat waktu? Bukti untuk kegiatan tersebut berupa : <input type="checkbox"/> Surat edaran / pemberitahuan <input type="checkbox"/> Dokumen lain :		
25.	Apakah komite sekolah memiliki program penggalangan dana kepada masyarakat dalam rangka pengumpulan dana abadi bagi sekolah?		
	Jika YA, apakah saat ini program tersebut telah dijalankan? Apakah sudah ada hasil dari program tersebut?		
	Apa saja yang bapak/ibu lakukan sebagai badan pendukung komite sekolah dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu :	YA	TIDAK
26.	Apakah komite sekolah memiliki AD/ART ?		
27.	Apakah bapak/ibu terlibat dalam penyusunan AD/ART Komite sekolah?		
28.	Apakah bapak/ibu memberikan masukan / usulan program dalam penyusunan AD/ART Komite Sekolah?		
	Jika YA, program yang bapak/ibu usulkan adalah : Bukti tertulis untuk usulan bapak/ibu berupa : <input type="checkbox"/> Notulen <input type="checkbox"/> Dokumen lain :		
29.	Apakah selama ini ada subsidi silang, dalam penarikan iuran orang tua siswa?		
	Jika TIDAK, bagaimana bentuk bantuan kepada orangtua siswa yang kurang mampu?		
30.	Apakah komite sekolah melakukan kegiatan inovatif untuk meningkatkan komitmen antara sekolah dan masyarakat ?		

	<p>Jika YA, bentuk kegiatan seperti apa yang diadakan ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Apakah program tersebut memberikan dampak positif terhadap komitmen masyarakat ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bukti nyata untuk kegiatan tersebut berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dokumentasi <input type="checkbox"/> Undangan <input type="checkbox"/> Daftar hadir <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 		
31.	<p>Apakah masyarakat menunjukkan peningkatan komitmen dari kegiatan tersebut?</p>		
	<p>Jika YA, bagaimana bentuk peningkatan komitmen dari masyarakat?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
32.	<p>Apakah komite sekolah melakukan evaluasi terhadap program yang dibuat bagi masyarakat secara berkelanjutan?</p>		
	<p>Jika YA, bagaimana bentuk evaluasi komite sekolah terhadap program-program yang disusun untuk masyarakat?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Apakah evaluasi tersebut tercatat dalam bukti tertulis ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
	<p>Apa saja yang bapak/ibu lakukan sebagai badan pengontrol komite sekolah dalam melakukan evaluasi dan pengawasan kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan :</p>	YA	TIDAK
33.	<p>Apakah bapak/ibu memberikan apresiasi dan masukan terhadap kegiatan organisasi di sekolah?</p>		
	<p>Jika YA, bagaimana bentuk upaya bapak/ibu mengapresiasi dan memberi masukan bagi organisasi di sekolah?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		
34.	<p>Apakah komite sekolah mengadakan rapat atau pertemuan rutin dengan sekolah dan dewan guru ?</p>		
	<p>Jika YA, berapa kali pertemuan tersebut diadakan dalam jangka waktu 1 tahun ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

	Apakah selama ini ada tindak lanjut dari hasil pertemuan rutin tersebut?		
35.	Apakah komite sekolah sering melakukan kunjungan dan silaturahmi ke sekolah atau dewan guru di sekolah? Jika YA, apa saja hasil kunjungan dan pemantauan di sekolah? Bagaimana tindak lanjut komite sekolah dari hasil kunjungan tersebut?		
36.	Apakah bapak/ibu ikut memantau hasil ujian siswa Jika YA, bagaimana bentuk tindak lanjut komite sekolah terhadap hasil ujian siswa? Bagaimana upaya komite sekolah meningkatkan hasil ujian siswa ?		
37.	Apakah komite sekolah memantau dan memberikan penilaian terhadap angka mengulang kelas di sekolah? Jika YA, bagaimana upaya komite sekolah mengurangi angka mengulang kelas siswa ?		
38.	Apakah bapak/ibu ikut memantau jumlah angka bertahan siswa di sekolah? Jika YA, bagaimana bentuk tindak lanjut komite sekolah terhadap angka bertahan siswa di sekolah?		
39.	Apakah komite sekolah bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni ? Apakah komite sekolah berupaya menarik alumni untuk dapat berperan dalam sekolah ? Apakah sudah ada alumni yang telah ikut berperan bagi sekolah? Jika YA, apakah bentuk atau peran alumni kepada sekolah?		

	Apa saja yang akan Bapak/Ibu lakukan sebagai badan penghubung dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat?	YA	TIDAK
40.	Apakah komite sekolah selalu berupaya melibatkan DU/DI, masyarakat, dan <i>stakeholder</i> pendidikan dalam perencanaan program sekolah? Jika YA, upaya yang dilakukan komite sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan program sekolah adalah :		
41.	Apakah komite sekolah selalu berupaya melibatkan DU/DI, masyarakat, dan <i>stakeholder</i> pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah? Jika YA, upaya yang dilakukan komite sekolah untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah adalah		
42.	Apakah komite sekolah melakukan penjajagan kepada masyarakat dan DU/DI untuk menjalin kerjasama (MOU) dengan sekolah Jika YA, adakah masyarakat dan DU/DI yang bersedia bekerjasama dengan sekolah? Jika YA, Bukti kerjasama tersebut berupa <input type="checkbox"/> Kontrak kerja/ MOU <input type="checkbox"/> Dokumentasi <input type="checkbox"/> Dokumen lain :		
43.	Apakah komite sekolah menyediakan fasilitas penyaluran bantuan kepada sekolah? Jika YA, fasilitas apa saja yang disediakan untuk menyalurkan bantuan ke sekolah?		
	Apa saja yang Bapak/Ibu lakukan sebagai badan penghubung dalam menampung dan menganalisis masukan dari masyarakat :	YA	TIDAK
45.	Apakah komite sekolah menampung aspirasi masyarakat dan orang tua murid dalam perencanaan pendidikan? Bukti untuk kegiatan tersebut berupa : <input type="checkbox"/> Daftar masukan masyarakat <input type="checkbox"/> Dokumen lain :		

46.	Apakah komite sekolah menyampaikan aspirasi masyarakat dan orangtua murid dalam perencanaan pendidikan?		
Bukti untuk kegiatan tersebut berupa: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat rekomendasi <input type="checkbox"/> Dokumen lain :..... 			
47.	Apakah komite sekolah mensosialisasikan kebijakan dan program sekolah kepada masyarakat?		
Jika YA, bagaimana upaya komite sekolah mensosialisasikan program sekolah kepada masyarakat?			
48.	Apakah komite sekolah memberikan fasilitas layanan masukan kebijakan dari masyarakat terhadap sekolah?		
Jika YA, media/fasilitas yang disediakan untuk menampung aduan dan masukan dari masyarakat berupa : <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> No. Telp Komite Sekolah <input type="checkbox"/> Website <input type="checkbox"/> Email Komite Sekolah <input type="checkbox"/> Media lain : 			
49.	Apakah komite sekolah menampung pengaduan dan keluhan dari masyarakat/orang tua murid terhadap kebijakan sekolah?		
Bukti untuk kegiatan tersebut Berupa <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Daftar masukan masyarakat <input type="checkbox"/> Dokumen lain : 			
50.	Apakah komite sekolah menyampaikan pengaduan dan keluhan dari masyarakat terhadap kebijakan sekolah?		
Jika YA, bagaimana komite menyampaikan pengaduan dan keluhan masyarakat kepada sekolah?			
51	Apakah Komite sekolah membuat laporan program komite sekolah?		
Jika YA, Apakah ada pembagian tugas bagi anggota dalam penyusunan laporan komite sekolah? Partisipasi seperti apa yang bapak/ibu lakukan sebagai bentuk partisipasi dalam penyusunan laporan program komite sekolah?			

52	Apakah komite sekolah menyampaikan laporan program komite sekolah kepada sekolah dan masyarakat?		
	Jika YA, bagaimana komite menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada sekolah dan masyarakat?		

C. Silahkan berikan pernyataan mengenai pertanyaan dibawah ini

1. Apakah selama ini Bapak/Ibu selaku anggota komite sekolah menemui kendala dalam menjalankan tugas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Apakah ada evaluasi secara berkala terhadap kinerja komite sekolah selama ini?

.....
.....

3. Bagaimana upaya Bapak/Ibu selaku anggota komite sekolah untuk meningkatkan kinerja komite sekolah baik untuk tugas pribadi maupun kesatuan sebagai komite sekolah ?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NO	Responden	No angket																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SR	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
2	YI	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Sp	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4	AS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
5	IB	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
6	SM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
7	HW	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
8	BS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
9	BSP	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	HWi	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
11	DY	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
	Prosentase Kinerja Komite Sekolah	91%	82%	55%	36%	100%	73%	82%	55%	82%	36%	82%	64%	82%	36%	100%	36%	82%	73%	91%	91%	91%	100%	55%	91%

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Kismanto

Nim : 09504241009

Program Studi: Pendidikan Teknik Otomotif

Pada ;

Hari/Tanggal : Rabu, 2 September 2015

Pukul : 08.30 - 09.10

Bertempat di : Masjid Cipta Jati SMK N 3 Yogyakarta

Menyatakan telah melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta".

Yogyakarta, 2 September 2015

Yang menyatakan,

Mengetahui
Responden



Dr. Aruji Siswanto



Kismanto

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Kismanto

Nim : 09504241009

Program Studi: Pendidikan Teknik Otomotif

Pada ;

Hari/Tanggal : Rabu , 2 September 2015

Pukul : 10.10 - 10.25

Bertempat di : Ruang KPTO

Menyatakan telah melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta".

Yogyakarta, 2 September 2015

Mengetahui
Responden



.....

Yang menyatakan,



Kismanto

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Kismanto

Nim : 09504241009

Program Studi: Pendidikan Teknik Otomotif

Pada ;

Hari/Tanggal : Selasa, 29 September 2015

Pukul : 15.58 - 16.58

Bertempat di : Rumah Ketua Komite Sekolah

Menyatakan telah melakukan wawancara sebagai bagian dari pengumpulan data dalam penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah) dalam Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK N 3 Yogyakarta".

Yogyakarta, 29 September 2015

Yang menyatakan,

Mengetahui
Responden


.....
Suko Raharjo


.....
Kismanto

HASIL WAWANCARA KOMITE SEKOLAH YANG TELAH DIREDUKSI

Kode Responden : SR
Tanggal : 24 September 2015
Pukul :15.58-16.58 WIB
Tempat : Rumah Ketua Komite Sekolah SMK N 3 Yogyakarta

Hasil Wawancara :

1. apakah komite sekolah dilibatkan dalam pembuatan RAPBS?
“Pada dasarnya komite itu ada unsur dari sekolah, orang tua, tokoh masyarakat dan orang tua siswa yang masih aktif. Kalau yang dari unsur sekolah otomatis dilibatkan sejak awal. Kalau saya hanya waktu-waktu tertentu saat diperlukan. Ketika sekiranya ada yang urgen saya dilibatkan, karena dalam sistem kerja saya sekiranya bisa dikerjakan oleh komite di sekolah silahkan. Karena tujuannya sama maka bisa dilakukan.”
2. Pada bagian apa komite sekolah dilibatkan ?
“Biasanya pada masalah besar kecilnya anggaran. Jadi misalnya begini, anggaran yang dikeluarkan dari orang tua dikehendaki murah. Padahal sarana sekolah yang diperlukan memiliki harga yang telah ditentukan atau sudah ada harga sesuai dengan pasar sehingga anggaran tahun lalu dan tahun ini berbeda. Harga dan rencana pembelian peralatan sudah sejak lama hanya biayanya belum ada. Karena sekarang ini dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SMK N 3 Yogyakarta akan dijadikan sekolah rujukan.mestinya harus memiliki peralatan sendiri sehingga biaya yang dikelola komite sekolah untuk mengadakan peralatan selain itu SMK N 3 Yogyakarta saat ini kekurangan ruangan sekitar 20 an. Untuk mengantisipasi digunakan sistem ruang buka tutup dimana bisa digunakan untuk praktik dan teori. Misalnya minggu ini digunakan untuk praktik, minggu berikutnya alat praktik bisa di geser diganti dengan kursi meja lipat untuk teori. Untuk menopang anggaran bagi siswa diharapkan ada survei dulu untuk menentukan harga yang dianggarkan.”
3. Apakah komite sekolah melakukan pendataan terkait sumber daya dan tingkat ekonomi orang tua siswa?
“Kalau bantuan di SMK 3, kalau dulu ada subsidi silang. Tetapi itu ditutup. Untuk yang minta keringanan masing masing orang tua siswa mengajukan kepada sekolah. Kemudian dari sekolah akan diajukan ke pemerintah daerah kalau yang kota di kota, kalau yang di Bantul di Bantul. Kalau siswa dari kota masuk ke KMS, sedangkan data siswa dari luar kota Jogja di data dan dikembalikan kepada pemerintah setempat karena dari kota tidak ada anggaran. Kalau dulu di Bantul penganggarnya menurut jumlah siswa jadi siswa dari Bantul yang sekolah dikota tidak mendapat anggaran dari pemerintah Bantul karena sekolah di kota dan Kota Jogja tidak ada anggarannya sehingga sekarang dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing.”
4. Jadi pendataan tidak dilakukan komite sekolah tetapi orang tua yang mengajukan sendiri?
Ya, jadi sesuai dengan orang tua yang akan meminta keringanan ke sekolah.
5. Bagaimana peran komite dalam memberikan pertimbangan terhadap tenaga pendajar dan pendidik di sekolah?

Kalau untuk partisipasinya dalam perannya dalam bidang tenaga pendidik, saya belum pernah di ajak ngomong-ngomong karena tenaga pendidik masuk melalui kebutuhan. Misalnya dari jurusan ada kebutuhan tenaga pengajar maka tenaga pengajar masuk lewat bidang kebutuhan. Setelah ada penerimaan bari komite sekolah diberitahu bahwa ada penerimaan. Ini ada kebutuhan dan yang harus diterima sesuai kriteria dan jurusan serta pengalaman mengajarnya. Untuk penentuan dari bidang kebutuhan atau dari sekolah, dimana setelah diterima komite tinggal melakukan persetujuan.

6. Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terkait sistem pembelajaran di sekolah?

Selama ini karena itu telah menjadi ranah dan tanggungjawab dari komite sekolah, secara tidaklangsung kami berkomunikasi dengan waka kurikulum untuk kemajuan dan perlu diberikan untuk kemajuan kurikulum. Jadi secara formal tidak dilakukan tetapi secara informal sering dilakukan, karena bagi saya tidak perlu selalu formal bertemu. Melalui pertemuan non formal tersebut karena disampaikan kepada wakil bidang kurikulum maka bisa disampaikan dalam rapat resmi di sekolah. Jadi masukan disampaikan melalui rapat karena sekolah mengadakan rapat rutin 1 bulan sekali di sekolah

7. Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terkait kurikulum sekolah?

Kurikulum sepenuhnya menjadi tanggung jawab Waka Kurikulum dan staffnya. Dari komite sekolah sendiri terkait dengan kurikulum sekolah sendiri setidaknya harus tahu, hanya saja tidak berhubungan dengan maksimal hanya memberikan dorongan, sebab kurikulum sudah ada Undang-undangnya.

8. Bagaimana partisipasi komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terkait sarana dan prasarana sekolah?

Kalau sarana dan prasarana sangat penting dibutuhkan bagi sekolah. Sarana dan prasarana di cover oleh Waka. Kalau masalah perawatan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah, wakil kepala sekolah selalu berkomunikasi dengan komite sekolah. Karena komite bukan hanya ketua, semua punya hak untuk memajukan sekolah. Selain itu juga Waka Sarana dan prasarana perlu berkomunikasi dengan kepala program apabila ada perubahan pengadaan sarana dan prasarana.

9. Apakah ada program dari komite sekolah untuk mendukung kesehatan siswa dan pembrantasan narkoba?

Kalau dari bidang komite itu tidak ada, tetapi ketika ada rapat dengan sekolah, pada saat rapat itu kita tekankan tugas diantara wakilkepala sekolah yang membidangi kesiswaan, kita tekankan agar siswa jangan sampai terlibat dalam kenakalan remaja, narkoba, miras dsb. Jadi secara formal belum ada programnya tetapi dalam rapat itu bisa di tekankan. Dari kegiatan non formal saya sendiri selaku ketua komite akan berkomunikasi dengan semua wakil kepala sekolah dan juga kepala sekolah. Sebab bila dilakukan secara formal tentunya butuh pembiayaan dari komite. Prinsip dari komite sendiri untuk menciptakan sekolah yang murah namun memiliki kualitas yang tidak kalah saing. Sebab sekarang ini baru taraf pengembangan, terutama dalam pengadaan alat.”

10. Apakah ada program untuk menarik minat masyarakat luas berperan dalam kegiatan sekolah?

Selama ini kebanyakan dunia usaha kebanyakan melakukan kerjasama dengan sekolah yang dulunya sekolah RSBI. Kalau dari SMK 3 sendiri kita mengupayakan untuk bekerjasama dengan swasta. Dari rekan-rekan komite yang berkompeten dibidang tersebut, sebenarnya SMK N 3 Yogyakarta mampu untuk bekerja sama. Hanya saja bila SMK yang mengajukan nanti predikatnya akan turun. Tetapi kalau yang meminta dari perusahaan itu berarti DU/DI memandang bahwa SMK N 3 mampu untuk bekerjasama. Tetapi selama ini kami selalu berupaya melalui Kunjungan Industri, terutama dalam menjangkau lulusan dari tempat-tempat Kunjungan Industri. Kemudian masalah bantuan dari pihak luar, untuk sekolah swasta banyak sekali bantuan dari pihak luar. Sedangkan dari sekolah negeri sering kali terbentur pertanggungjawaban terutama terkait dengan RAPBS, sebab uang keluar masuk harus sesuai dengan RAPBS, sehingga bila ada uang tambahan yang masuk akan menjadi temuan dari bidang audit. Sehingga aturan dari dinas banyak yang berpikiran kadang membingungkan. Termasuk uang komite yang sekarang kembali menjadi SPP. Seperti kita tahu kalau di SMK itu banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan bahan habis pakai, alat dan sebagainya, tetapi kenapa yang biaya dinaikkan malah SMA dan SMK di turunkan. Untuk sekarang di SMA Rp 40.000 kalau di SMK Rp 25.000,00 sehingga kadang-kadang kurang bisa diterima sebab yang membutuhkan banyak biaya adalah SMK tetapi kenapa SMA lebih besar demikian juga dengan uang investasi. Dari Dinas disarankan untuk menarik seminimal mungkin tetapi dari dinas sendiri belum mampu mencukupi kebutuhan sekolah. Sehingga sekolah terbentur oleh aturan yang ada sehingga usulan-usulan yang ditujukan untuk memajukan sekolah sering kali terbentur aturan.

11. Bagaimana pembayaran uang investasi dari orang tua murid, apakah selama ini telah sesuai?

“Intinya kalau masalah dana investasi sekolah mengharapkan tertib agar digunakan sesuai jadwal. Tetapi kebanyakan tidak tertib. Bahkan sampai lulus ada yang belum membayar. Sehingga dana yang seharusnya digunakan sesuai jadwal kadang tidak sesuai. Bahkan kumpulan akumulasi seluruh siswa yang belum melunasi mencapai 1 Miliar rupiah. Padahal sekolah membutuhkan biaya setiap hari sehingga menjadi kendala bagi sekolah. Padahal sudah disepakati dan pembayarannya dapat diangsur sebanyak 3 kali selama satu tahun. Sekolah sebenarnya ingin memajukan mutu sekolah tetapi terkendala dana dari orang tua, sebab bila mengandalkan dana dari dinas dan pemerintah tidak akan mencukupi. Jadi pemerintah itu menuntut sekolah meningkatkan mutu tetapi tidak dibarengi dengan dukungan yang sesuai. Sehingga tahun ini, salah satu usulan sebagai solusi masalah investasi dari komite sekolah diangsur 9 kali, harapannya agar cicilan tidak terlalu tinggi. Padahal jika dibanding SMK-SMK lain uang investasi di SMK 3 tergolong lebih rendah. Jadi harapannya dalam satu ini masalah uang investasi dapat selesai sehingga pembangunannya sesuai jadwal. Komite sekolah sendiri kebingungan dalam menarik investasi dari orang tua siswa sebab dari pemerintah dilarang untuk memaksa orang tua murid. Sehingga akumulasi biaya ini menjadi hambatan memajukan sekolah.

Dalam rapat-rapat antara dinas pendidikan, kepala sekolah, dan ketua komite pernah disampaikan masalah penarikan tunggakan, tetapi dari dinas tidak diperbolehkan karena bersifat memaksa. Padahal itu merupakan kewajiban orang tua untuk membayar dan sekolah untuk menjalankan.

12. Bagaimana upaya komite sekolah untuk menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri?
- Dari komite sekolah khususnya wakil ketua 1 selaku dari unsur Dunia industri diberikan amanah terkait jalinan kerja sama dengan sekolah. dan bentuk jalinan nya mungkin sudah saya utarakan tadi.
13. Bagaimana komite sekolah menampung masukan dari masyarakat?
- Kebanyakan orang tua siswa yang tidak kenal dengna komite sekolah akan melakukan pengaduan memalui sekolah. tetapi bila mengenal anggota komite sekolah maka akan mengadu melalui komite sekolah. kebanyakan aduan bukan untuk mengadu masalah sekkolah tetapi masyarakat ingin memberikan suport meskipun hanya liwat kata-kata, sebab anaknya sekolah di SMK. Jadi kalau yang tidak kenal lewat sekolah kalau yang kenal melalui komite
- Kalau yang dekat-dekat biasanya langsung datang ke rumah atau ke sekolah bertemu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau BK. Untuk isi pengaduan tidak banyak yang komplain hanya masukan untuk kemajuan sekolah. sebab jika sekolah bagus, otomatis anaknya akan menjadi lulusan yang bagus pula.
14. Apakah komite sekolah mengajak dewan pendidikan dan masyrakat dlam kunjungan ke sekolah?
- Secara struktur dewan pendidikan di atas komite. Kalau dewan pendidikan tidak pernah, tetapi dari komite bila ada waktu senggang di sempatkan untuk mengunjungi sekolah dan melihat langsung kegiatan siswa di sekolah. memantau peraltan praktik di sekolah dan kegaitan praktik yang dilakukan siswa apakah dilakukan secara serius atau tidak. Karena praktik dilakukan dalam tim jadi harus saling mencermati dan bergantian. Dari kunjungan tersebut kemudian saya mengusulkan kalau pas praktik Handphone dan alat komunikasi dikumpulkan supaya siswa dapat fokus dan mencermati. Karena guru sendiri tidak dapat mengamati siswa secara terus menerus, kemudian karakteristik guru berbeda beda. Jadi komite sekolah melalui kunjungan akan memeberikan masukan terhadap kegiatan siswa, memantau peralatan.
15. Bagaimana peran komite sekolah dalam mengontrol kebijakan dan prgram di sekolah?
- Secara resmi belum ada, karena maslah teknis langsung pada kebijakan kepala sekolah. jadi ranahnya sekolah, komite tidak dapat ikut campur. Kommitte sekolah hanya memberikan pandangan andangan saja. Yang penting komite mamantau kalau pada praktiknya tidak sesuai dengan rencana, kemudian komitebisa melaporkan ke dinas pendidikan. Khususnya dalam penggunaan dana sekolah. yang pertama karena pengelolaan uang yang besar sehingga jangan sampai ada temuan-temuan dari BPK. Jadi secara formal hanya melalui rpat sekolah, sedangkan secara non formal melalui perbincangan dengan guru-guru.
16. Bagaimana peran komite sekolah dalam mengevaluasi hasil belajar siswa?
- Kalau itu ranahnya termasuk ranah sekolah. Komite Sekolah hanya berperan dengan masukan secara non formal. Sebab waktu komite sekolah sendiri sedikit. Hanya saja komite selalu fokus untuk memperjuangkan hak-hak yang diperoleh anak didik. Dan hubungan seklah dengan komite terjadi sangat bagus, karena diharapkan semua guru kenal dengan peran dan anggota komite.

Dengan komunikasi yang baik ini komite sekolah memperoleh informasi penting dari sekolah sehingga dapat memberikan masukan. Hanya saja kembali ke personal masing-masing karena tidak semua anggota punya waktu untuk datang ke sekolah.

17. Apakah komite sekolah memiliki pembagian tugas bagi anggota komite sekolah?

Secara struktur anggota komite sekolah punya tugas masing-masing. Hanya saja tugas masing-masing anggota ini telah tercover oleh wakil kepala sekolah masing-masing misalnya dibagian sarana dan prasarana di cover wakil kepala sekolah bidang prasarana. Intinya semua membidangi pekerjaan masing-masing. Seperti jabatan bendahara komite sekolah, itu urusan keuangan kembali ke bendahara sekolah bukan bendahara dari luar, sehingga anggota komite sekolah melengkapi tugasnya. Memang untuk komite sekolah di sekolah negeri kebanyakan di cover oleh guru dari sekolah. Lain kalau sekolah swasta yang laporan pertanggungjawabannya terlalu longgar. Kalau di sekolah negeri pengawasannya langsung dari Dinas. Jadi kalau sekolah negeri peluang untuk mendapatkan sesuatu dari luar itu sama sekali tidak ada. Misalnya komite sekolah mau melakukan studi banding, itu tidak dapat dilaksanakan. Padahal melalui studi banding dapat memberikan masukan lewat studi dengan komite sekolah dari sekolah yang maju. Tetapi dari pemerintah tidak diperbolehkan, sehingga menjadi kendala untuk mengembangkan kreatifitas komite.

Misalnya ada dana khusus sebenarnya bisa untuk mengembangkan komite, tetapi memang tidak ada dana untuk hal tersebut. Padahal untuk mengembangkan peran komite tentunya membutuhkan dana. Sementara pemerintah sendiri menuntut komite berperan lebih aktif tetapi pemerintah sendiri tidak menghargai peran komite. Sehingga seharusnya ada kebijakan dalam membantu komite sekolah, sebab komite sekolah sedikit banyak juga berjuang memajukan sekolah.

18. Apakah ada pembagian tugas antara komite sekolah dari unsur sekolah dan anggota komite sekolah dari unsur diluar sekolah?

Ya memang kalau komite sekolah dari luar itu setahun sekali tidak pasti berbeda dengan ketua komite, ketua komite selalu datang ke sana secara rutin. Anggota komite datang ke SMK 3 kalau ada undangan saja atau ada urusan dengan SMK baru datang. Karena dalam pembahasan-pembahasan rapat juga melibatkan komite.

19. Apakah ada pedoman kerja bagi anggota komite sekolah dalam melakukan tugas-tugasnya?

Seharusnya semua anggota komite sekolah ikut bekerja. Seperti ketua 1 dan ketua 2 biasanya selalu berperan aktif. Kalau di SMK 3, wakil ketua 1 berperan ganda terutama dalam mengurus kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri sehingga sebulan sekali pasti ke sekolah. Sedangkan wakil ketua kurang bertugas, hanya datang pada saat ada undangan. Kadang memberikan masukan tetapi kurang memberikan peran yang maksimal karena tercover oleh wakil kepala sekolah yang sekaligus sebagai komite sekolah. Hanya saja anggota komite sekolah selalu berkomunikasi dengan ketua komite sekolah. Sehingga anggota komite memberikan dorongan atau dukungan melalui ketua komite sekolah, sebab untuk masalah teknis telah dikerjakan oleh wakil kepala sekolah. Yang penting komite sekolah berjalan sesuai dengan anggaran dari sekolah.

Jadi inti komite sekolah di SMK N 3 Yogyakarta adalah menjembatani antara orang tua kemudian dengan sekolah. Dan juga komite sekolah berupaya agar masyarakat tidak terbebani dengan pembayaran dan SMK dapat berjalan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil kunjungan industri juga ada komitmen untuk kerjasama, jadi dengan kualifikasi yang bagus ada siswa yang dapat diterima di dunia kerja. Jadi alumni-alumni di SMK 3 sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan kompetensi keahlian atau melanjutkan studi. Sebab lulusan SMK itu belum sepenuhnya mampu untuk terjun dan masih butuh teori-teori dan praktik yang mendukung di dunia kerja.

20. Apakah ada pedoman dari Dinas Pendidikan mengenai peran Komite Sekolah?

Untuk perannya, Peran utama komite sekolah adalah bertanggung jawab dengan orang tua siswa. Sedangkan tugas-tuganya adalah untuk mengembangkan sekolah dan mengontrol kinerja sekolah, serta memberikan support yang baik dan tidak memihak. Khususnya dalam pengelolaan dana sekolah kebutuhan sekolah benar-benar dihitung sehingga menghasilkan dana investasi sekolah yang harus dibayarkan oleh orangtua siswa. Selain untuk kebutuhan sarana dan prasarana dana dari komite sekolah juga digunakan untuk membiayai tenaga pendidik yang bersiaft GTT/PTT. Dimana untuk tahun ini komite sekolah mengusulkan untuk menaikkan anggaran bagi GTT/PTT dari 1,2 Juta rupiah menjadi 1,5 juta rupiah perbulan.

21. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban komite sekolah terhadap kinerja komite sekolah

Laporan pertanggungjawaban dibuat pada masa pergantian jabatan. Dengan capaian yang sudah tertuang di sekolah. kemudian anggota komite sekolah yang dari diundang untuk mengemukakan apa yang telah ditemui dan dilakukan selama masa jabatan. Laporan disusun menjadi satu dimana telah merangkul tugas-tugas anggota.

HASIL WAWANCARA KOMITE SEKOLAH YANG TELAH DIREDUKSI

Kode Responden : AS
Waktu : 8.30-9.10 WIB
Tanggal : 2 September 2015
Tempat : Masjid Cipto Jati SMK N 3 Yogyakarta

Hasil Wawancara :

1. Bagaimana alur pembuatan RPABS/ RKAS di SMK N 3 Yogyakarta? Apakah komite sekolah di libatkan sejak awal.

“Terkait dengan sekolah dalam kaitannya membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah atau yang biasa di sebut RKAS, sejak awal sekolah berusaha untuk melibatkan komite sekolah. Dalam hal ini komite sekolah dibagi menjadi dua yaitu komite tetap dan komite tidak tetap. Komite tetap ini di ditentukan melalui pemilihan dan ada SK yang diterbitkan secara resmi. Sedangkan komite tidak tetap ini diambil dari wali murid kelas X yang jumlahnya 40 orang, itu diambil tiap kelas 2 orang. Komite tetap ini sejak awal dilibatkan sampai

penetapan RAPBS berdasarkan RKAS yang di susun. Kemudian dari hasil ini komite tetap sejak awal menginformasikan kepada komite sekolah yang tidak tetap mengenai anggaran yang dibutuhkan sesuai dengan RKAS yang telah disusun.”

2. Bagaimana peran komite sekolah baik yang tetap maupun tidak tetap dalam pembuatan RPABS di SMK N 3 Yogyakarta apakah ada perbedaan?

“Untuk penyusunan RAPBS ini, antara komite tetap dan tidak tetap sudah ada porsinya masing-masing. Tentunya untuk komite sekolah punya porsi yang lebih banyak.karena komite tetap ikut dari perencanaan sedangkan untuk komite tidak tetap membahas mengenai persetujuan anggaran yang telah disusun. Khusus komite tetap ini membantu dalam penyusunan RKAS kelasX, XI dan XII. Kemudian komite tidak tetap hanya membantu dalam penyusunan RKAS kelas X karena anggotanya dari wali murid kelas X.”

3. Dalam tahap verifikasi apakah seluruh komite sekolah ikut dilibatkan ?

“Sesudah RPABS disusun draftnya dan dikonsultasikan berdasarkan konten, anggaran, dan besarnya anggaran pengurus hariannya dilibatkan. Dalam proses verifikasi komite sekolah yang dilibatkan adalah pengurus harian. Pengurus harian ini terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Mengingat kesibukan dari masing-masing anggota sesudah ada hasil dari RAPBS yang tersusun antara 60-70% baru di informasikan kepada anggota komite sekolah yang lain. “

4. untuk pendataan sumber daya sekolah apakah khusus anggota komite atau dari sekolah?

“Pada dasarnya untuk pendataan sumberdaya di sekitar sekolah kita menyerap masukan dari anggota-anggota komite sekolah. Karena komite sekolah sebagian besar merupakan perwakilan orang tua kelas 1,2,3 meskipun sebagaian bukan dari orang tua misalnya dari tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha/industri kita serap informasi dari sana.Terkait dengan potensi untuk sumberdaya khususnya sumber dana yang mungkin ada orang tua yang keterbatasan ekonomi kurang mampu, sekolah akan terbuka dalam menyerap informasi-informasi tersebut.”

5. Sebagai badan pertimbangan terhadap tenaga pendidik/ pengajar, Peran komite sekolah itu seperti apa, dan bagaimana perannya selama ini?

“Sebetulnya berkaitan dengan sumber daya manusia entah itu baik dari kebutuhan personilnya dari segi kualifikasinya dan peran komite sekolah ini tidak langsung. Sebab kompetensi guru telah disusun dalam PP, Permendiknas, dan ada Peraturan Pemerintah No.74 min. Tenaga pendidik S1, sudah miliki sertifikat kompetensi dan latar belakang pendidikan. disini tugas komite sekolah adalah menginventarisasi guru-guru tersebut berdasarkan kompetensi, baik untuk guru mapel adaptif, normatif dan produktif atau kejuruan. Dalam hal ini pengurus inti cukup tahu, komposisi SDM khususnya pendidik. Karena komite sekolah tidak punya hak intervensi mengenai penambahan guru. selain itu komite sekolah berhak untuk memberikan masukan apa bila ada laporan atau keluhan dari peserta didik terhadap guru yang mengajar yang ditindak lanjuti.”

6. Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terhadap sistem pembelajaran di sekolah? Apakah inisiatif atau setelah ada keluhan?

“Harapannya dari potensi yang ada di sekolah dan pembelajaran sehari-hari, diharapkan komite sekolah dapat memantau. Namun demikian tentunya komite sekolah tidak melaksanakannya setiap hari. Salah satunya melalui siswa, atau melalui media-media di sekolah.”

7. Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan terhadap pengelolaan kurikulum sekolah?

“Dalam pengelolaan kurikulum, komite sekolah memiliki satu unsur dari komite tetap yang memiliki tugas khusus dalam pengembangan pembelajaran, yang terdiri dari perwakilan orang tua, yang salah satu tugasnya adalah menganalisis kebutuhan sekolah, pembiayaan sarana prasarana, dan masukan-masukan kebutuhan secara langsung dan tidak langsung dilihat dari kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi memang ada beberapa seksi yang dibentuk namun untuk seksi pengembangan tugasnya seperti itu. Dan karena kurikulum sudah ada pengembangan sendiri, jadi komite sekolah tidak dapat mengintervensi secara langsung terbatas pada pemberian masukan.”

8. Bagaimana peran komite sekolah dalam memberikan pertimbangan dalam hal membantu pemenuhan sarana dan prasarana sekolah?

“Kalau untuk sarana komite sekolah agak detil, sebab komite sekolah di SMK 3 ini sebagai personalnya adalah orang-orang yang dulu pernah di SMK 3 misalnya guru, alumni atau orang tua siswa. Sehingga yang berkaitan dengan sarana dan prasarana mereka tahu khususnya untuk alat-alat praktik. Kalau untuk normatif adaptif tidak terlalu pelik. Kalau untuk kegiatan praktik, komite sekolah banyak memberikan saran dan solusi karena untuk pengadaan bahan dan alat praktik. Kalau untuk bahan sendiri dari pemerintah, meskipun mestinya untuk peralatan juga dari pemerintah. Komite sekolah sampai saat ini sampai tahun ajaran 2015, melalui komite sekolah masih boleh menyiapkan anggaran untuk penyediaan alat praktik di mesin, otomotif, dan lain-lain. Jadi perannya masih tinggi dalam pengembangan. Buktinya kami masih punya anggaran persiswanya selama belajar di SMK N 3 Yogyakarta antara 3-3,5 yang di upayakan komite sekolah ada di setuju pemerintah kota.”

9. Bagaimana upaya komite sekolah selama ini dalam upaya menarik masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah? Apakah ada program-program tertentu yang dikhususkan bagi masyarakat?

“Kalau program khusus, komite sekolah mengikuti program dari sekolah, artinya komite sekolah tidak memiliki program khusus dalam waktu-waktu tertentu mensosialisasikan kepada masyarakat. Tetapi, karena komite sekolah punya perwakilan di masing-masing kelas kelas X, XI, dan XII. Untuk kelas X ini berperan aktif dan di tiap-tiap kelas ada. Otomatis komite sekolah tidak tetap ini menjadi agen promosi dan informasi sekolah baik lewat siswanya maupun orang tuanya. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan sekolah lewat WKS Humas. Ada komite sekolah yang diberi tugas sebagai humas, tetapi programnya dikordinasikan dengan WKS 4, kemudian memanfaatkan alumni yang telah sukses. Komite sekolah ini dalam programnya adalah berkoordinasi dengan alumni. Khususnya dalam penanganan program atau sistem keiswahan, sarpras.”

10. Terkait perannya dalam menarik minat masyarakat, apakah dalam penarikan dana uang investasi sekolah ini ada respon yang baik dari masyarakat?

“Pada hakikatnya, investasi bukan dana pokok, tetapi sebagai dana yang diijinkan oleh pemerintah untuk membantu. Karena sebenarnya sarana-sarana seperti gedung, alat praktik untuk pengadaan,

pemeliharaan dan perbaikan sebetulnya kewajiban pemerintah, tetapi untuk saat ini komite sekolah masih diberi kesempatan untuk mendukung dalam kaitannya untuk menambah dana. “

11. Apakah terdapat peningkatan dalam ketepatan pembayarannya?

Selama saya di SMK N 3 Yogyakarta selama ini ada peningkatan, contohnya pada tahun 2013 belum ada bengkel otomotif, sekarang sudah punya. Yang dulu praktik di BLPT mulai tahun 2014 bisa praktik di Induk. Demikian juga di bengkel mesin, ini semua berkat dukungan komite sekolah jadi sebagian dari komite dan pengajuan ke pemerintah. Pengajuan sendiri tidak semata-mata dari sekolah, tetapi atas usulan dari komite sekolah yang dikkoordinasikan bersama untuk di ajukan ke pemkot, dan pemerintah pusat. Dan memang ada hasilnya, seandainya progarna ini tidak diketahui komite sekolah mungkin akan terkendala. Jadi ada perkembangan baik karena meskipun inisiatif dari sekolah akan dikonsultasikan dengan komite sekolah dulu.”

12. Bagaimana komite sekolah menjalin kerjasama dengan DU?DI sehingga ada MOU yang di sepakati

“Kerjasama dengan DU?DI terbatas pada pembelajaran praktik. Mungkin perkembangannya kedepan dari DU/DI ini ada perkembangan. Kontribusi khusus thd sarana belum ada, baru sebatas kerjasama yang membuahkan MOU, terutama dari kegiatan prakerin. Bantuan seperti ini tidak ternilai karena membantu siswa saat diterjunkan ke industri, otomatis menggunakan peralatan bengkel. Dengan bantuan praktik langsung membantu mematangkan siswa untuk siap terjun ke dunia industri. Selain itu dibebberapa perusahaan ada pesangon. Itu sangat membantu sekolah karena perusahaan tersebut berjumlah sekitar 60an. Selain itu ada beberpa perusahaan yang inten mengadakan rekrutmen khusus di smk 3 yang rata-rata telah memiliki MOU prakerin atau kunjungan industri. Kalau hubungannya dalam menyumbang alat masih belum.”

13. Apakah Komite Sekolah menampung masukan dan laporan dari masyarakat?

“Ada Dua kelompk masyarakat yang pertama merupakan customer yaitu ortu, kelompk 2 merupakan pengguna yang merupakan user yaitu DU/Di dan masyarakat. pada saat tertentu Kadang mereka melalui telepon, sms, sms gateway dan media sosisal dikelola bk, dan media sosial yang diakses orang luar. Ini merupakan sarana dari sekolah utnuk menerima masukan dari luar. Dan ternyata responya banyak, misalnya ada laporan kalau ada siswa yang keluar di jam sekolah. Atau dalam bidang pembelajaran misalnya ada beberapa masyarakat misalnya bila bertemu dengan kepala sekolah atau guru kadang menyampaikan dari segi sarana prasarana misalnya ada yang kurang, kemudian dari seragam sekolah perlu ada inovasi, lingkungannya tidak terwat, nah ini contoh yang sering terjadi melalui kesek, guru, BK. Selain itu dengan penerapan SMM, ada lembar kontrol/ masukan dari masyaraakat yang dinamakan nota SMM yang bisa di akses oleh masyarakat. yang mau memberikan saran.

14. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan komite sekolah dalam mengontrol kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah?

“Untuk berkaitan dengan fungsi pengawasan, secara langsung bisa tetapi intensitasnya tidak bisa maksimal karena pengurus komite orang sibuk semua. Sehingga kalau di kontrol secara langsung akan mengganggu aktivitasnya. Namun secara tidak langsung komite sekolah akan menyerap masukan atau laporan dari lain. Kemudian disampaikan baik secara insidental maupun rutin, terutama kepada ketua atau sekretarisnya terutama yang berasal dari unsur luar sekolah. Mungkin satu bulan atau 2 minggu sekali ini beertemu dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru guru kemudian dari hasil kunjungan itu diberikan

masuk kira-kira yang perlu dikembangkan. Meskipun realisasinya tidak spti yagn diharapkan, namun diagendakan dalam rapat rutin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu ada laporan dari keuangan, sarana prasarana, dan prestasi pembelajaran.”

15. Bagaimana sistem pembagian tugas anggota koite sekolah baik yang dari unsur sekolah maupun dunia luar?

“Kalau dari struktur telah dibentuk dan dibagi mengenai tugas tugasnya, untuk ketua seperti apa, sekretaris seperti apa dan anggota seperti apa. Untuk anggota sudah dibagi dalam seksi-seksi misalnya untuk pengembangan sarana prasarana sekolah, pengembangan kurikulum, ada 4 seksi. Yang punya tugas masing-masing jadi secara format yang disusun sudah ada ketegasan. Tetapi dalam realisasinya yang paling aktif pengurus inti. Kalau yang dari anggota kadang ada yang ke sekolah, terutama dari perwakilan pengurus dari untur orang tua dan orang tua tersebut punya kepedulian terhadap pendidikan. “

16. Apakah ada perbedaan tugas-tugas anggota komite sekolah dari unsur sekolah dengan unsur luar ?

“Kalau untuk perbedaan saya kira tidak ada. Di masing-masing unsur seksi kan ada yang dari sekolah dan dari luar. Dan disetiap seksi tersebut biasanya ada dari sekolah 1 orang dan dari luar 2 orang. Di komite sekolah pengurus besar secara keseluruhan ada 17 orang sehingga dari luar sifatnya melengkapi. Tapi tentunya dalam proses tersebut yang berperan tentu yang mengamati, melakukan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan yang berinisiasi tentunya kebanyakan orang dalam karena tahu seluk beluknya. Sedangkan dari luar itukan mengamatinya tidak sedetil dari unsur sekolah sehingga kelihatannya ada perbedaan secara peran dan tanggung jawab. Namun dari segi pengorganisasian pengurus komite sekolah berkoordinasi dengan sekolah, menghimpun informasi semua dari sekolah baik yang bersifat akademik dan non akademik kemudian disampaikan pada komite yang lain.”

17. Apakah ada evaluasi terhadap kinerja komite sekolah ?

“Iya, evaluasi diencanakan 1 tahun 2 kali. Dalam komite sekolah pertemuan secara periodik dilakukan 1 tahun 2 kali. Untuk pertanggungjawaban keuangan dan proses pembelajaran dilakukan oleh sekolah setiap tahun, nah disana komite sekolah akan melakukan evaluasi. Evaluasi berkaitan dengan tanggungjawab anggota komite disampaikan dan dievaluasi kurangnya dimana. Kemudian biasanya yang sering ditemukan adalah komunikasi, karena kesibukaanya. Tidak seperti bapak ibu guru dan karyawan yang setiap hari ketemu. Sedangkan pengurus tidak setiap hari ketemu, hanya pada saat ada pertemuan atau datang ke sekolah. Nah itu juga sebagai materi evaluasi bagi kita untuk memperbaiki. Jadi program-program yang disampaikan dari komite sekolah dan dilaksanakan oleh sekolah itu kita evaluasi. Dalam pertemuan tahunan menjelang tahun ajaran baru berkaitan dengan evaluasi dilakukan secara total. Biasanya ada banyak masukan untuk tahun kedepan yang perlu diperbaiki atau ada yang kurang. Baik dari SDM-nya, sarana prasarana, dan sumberdaya finansial. Atau keterlambatan pengumpulan dana sehingga ada beberapa item yang perlu ditunda bagaimana memberikan solusinya.”

18. Bagaimana pengharapannya dari anggota komite sekolah itu dalam berperan di sekolah?

“Harapannya memang semua anggota komitesekolah sebagai salah satu pilar pendukung pembangunan sekolah harapannya memang pro-aktif. Tetapi kita atau dari pemerintah dan masyarakat tidak dapat memaksa atau mematok. Kalau dari bapak ibu guru bisa memastikan tetapi kalau komite sekolah tidak

mungkin. Pada dasarnya kembali kepada potensi dari komite sekolah. Ada anggota yang aktif, ada beberapa yang tidak namun diharapkan hal tersebut bisa melengkapi.”

HASIL WAWANCARA KOMITE SEKOLAH YANG TELAH DIREDUKSI

Kode Responden : BTS

Waktu : 10.10-10.25 WIB

Tempat : Ruang KPTO SMK N 3 Yogyakarta

Hasil Wawancara :

1. Menurut bapak, bagaimana kinerja komite sekolah selama ini ?

Secara prinsipnya sudah bagus. Namun kemudian kalau boleh diperinci lagi. Selama inikan kewajiban peserta didik atau orang tua murid untuk menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Sekolah mengalami kendala, orangtua tidak dapat membayar sesuai jadwal. Selama ini peranan komite belum kuat dalam memecahkan masalah tersebut. Disamping itu juga belum ada regulasi yang kuat dari pemerintah daerah yang membatasi dana investasi. Sehingga pemda itu tidak terlalu ikut campur, peran komite sekolah ini akan lebih baik.

2. bagaimana pemerintah itu memberikan batasan, seperti yang anda maksud?

Secara konkret batasan tersebut tidak dapat saya jelaskan. Tetapi contohnya untuk sumbangan atau SPP tidak boleh lebih dari Rp 40.000,00 ini sampai akhir tahun. Untuk kedepannya malah sudah tidak ada seperti nya. Sumbangan-sumbangan yang lain juga dibatasi.

3. Kalau perkembagannya pengurus komite lama dan baru?

Sebetulnya untuk pengurus komite yang baru ini saya masih berharap, nantinya sepak terjang dan kinerjanya belum. Masalah utama dalam pembayaran. Pembayaran sudah terjadwal namun pada realisasinya belum. Komite selama hanya berhimpun dan memberikan masukan serta persetujuan. Sedangkan sampai mekanismenya belum sampai disitu. Komite banyak berperan dala pengabilan keputusan. Tetapi untuk pelaksanaannya sampai nominal terpenuhi itu dari sekolah. Kendala yang terjadi disini bahkan sampai lulus ada yang belum membayar kewajibannya. Padahal dari pemerintah kota, sekolah tidka boleh menahan ijasah. Hal ini kontra produktif dengan usaha sekolah untuk memajukannya.

4. Apabila belum melakukan pembayaran, apakah bisa diberikan fotocopy ijasah dulu?

Kalau mereka jeli masyarakat akan lapor ke pemda, atau membawa LSM. Tetapi uang penyelenggaran pendidikan sebenarnya dipakai pada saat siswa itu belajar di situ. Seandainya lulus baru membayar saya kira sudah tidak pada saatnya. Dengan begitu rencana-rencana sekolah akan meleset. Seharusnya pemakaian anggaran bisa disesuaikan.

5. selain dari pendanaan, bagaimana peran komite dalam pembelajaran ?

Kalau masukan untuk materi pelajaran tidak ada. Kalau masukan yang bersifat memperbaiki kemajuan, misalnya dari jam masuknya, atau istirahatnya, ya hanya sebatas memberi masukan.

6. bagaimana peran komite dalam mengevaluasi hasil belajar siswa?

Secara rinci masukan seperti apa, kelihatannya belum. Tetapi komite sekolah memberikan masukan secara umum terhadap prestasi anak perlu ditingkatkan. Kalau secara rinci yang mana yang kurang itu belum ada masukan.

7. bagaimana perkembangan sarana prasarana di prokram keahlian Teknik Kendaraan Ringan ?

Kalau peningkatan sarana ada, tetapi untuk percepatannya itu yang kurang. Dari pemerintah dana sarana prasarana minim, sedang dari komite penerimaan dana tidak terjadwal. Dan juga dana yang dipungut tidak boleh terlalu besar. Karena dari pemerintah tidak ada pos anggaran untuk peralatan. Hanya ada pos untuk bahan praktek. Kalau untuk alat harus disampaikan melalui proposal dan terserah pemerintah yang di turunkan.

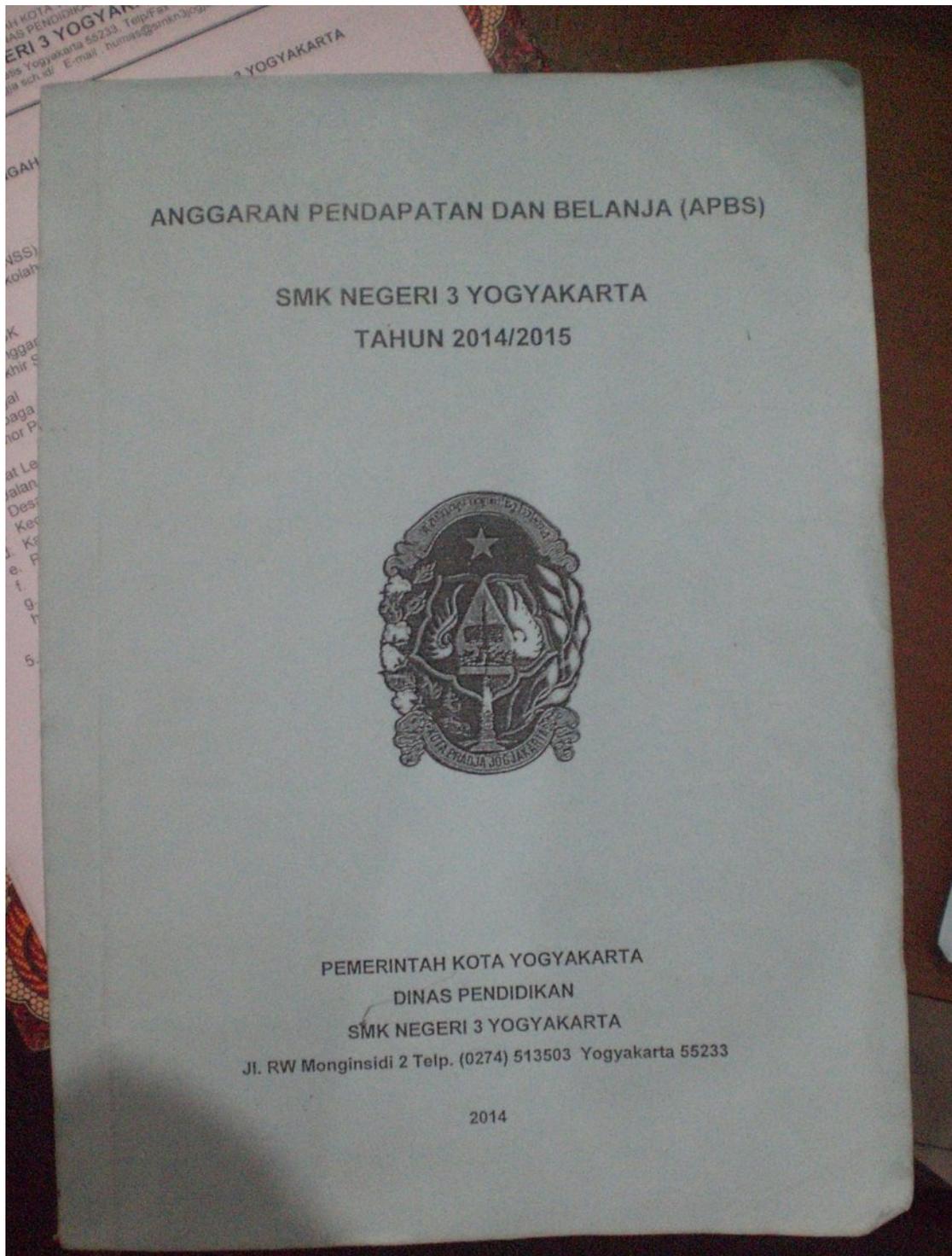
8. apakah peralatan yang masih menjadi kekurangan pada saat observasi sekarang sudah tersedia ?

Kalau di banding yang dulu pemenuhan alat sudah sampai 80%. Contohnya di silabus dari direktorat dibutuhkan mesin Gasoline Dirct Injection, Padahal di pasaran untuk mesinnya belum ada. Dan kalau mau beli kendaraanya mahal. Untuk import juga susah, dari supliernya.

Seandainya barangnya di pasaran ada, apakah bisa langsung direalisasikan?

Ya perlu diusulkan, terutama untuk dana dari komite. Karena dana komite ini lebih supel untuk peruntukannya seperti investasi. Sedangkan dari pemerintah itu pokok untuk bahan. Kalau dari pemerintah belum ada untuk investasi. Kalau untuk bahan pemerintah menghitung kebutuhan per anak dan bersifat rutin. Kalau untuk investasi alat belum ada. Karena sarana menurut pemerintah itu tidak ruitn. Dan pemerintah mungkin sudah mematok plot dana untuk sekolah. Sehingga dalam pengajuan alat tidak seratus persen direalisasikan pemerintah. Misalnya untuk pengjauan 100 juta itu yang turun 50. Nah ini yang kemudian tidak dapat masuk dalam RAPBS. Sehingga RAPBS tidak memuat kebutuhan alat. Jadi untuk alat itu nanti pos dananya dari komite sekolah.

Dokumentasi 1. RAPBS



Dokumentasi 2: Lembar Persetujuan APBS



LEMBAR PERSETUJUAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2014-2015**

Yogyakarta, 15 September 2014

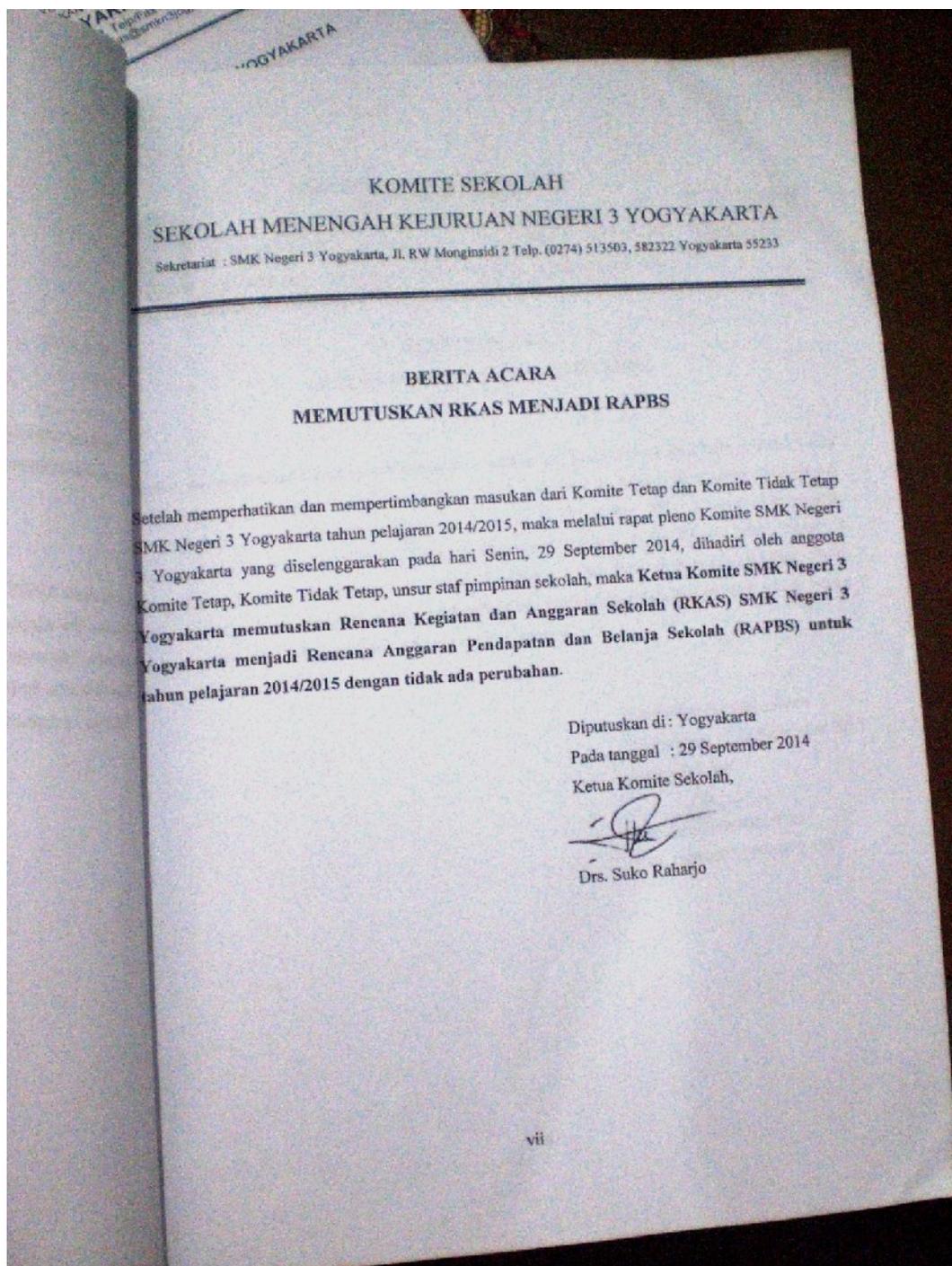
<p>Ketua Komite</p> <p></p> <p>Drs. Suko Raharjo</p>	<p>Kepala</p> <p></p> <p>Drs. Anis Siswanto NIP. 19640507 199010 1 001</p>
--	---

Menyetujui
Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

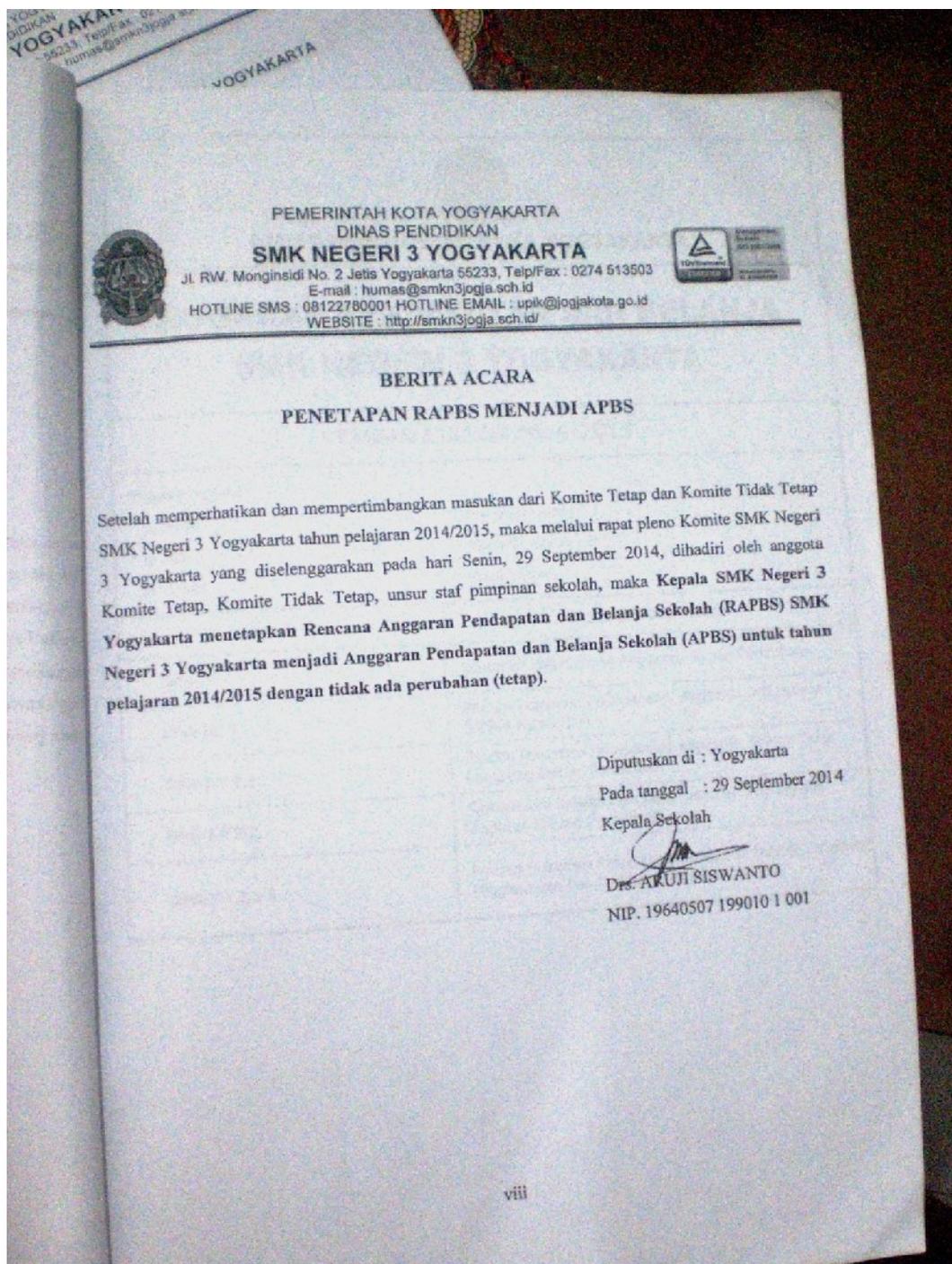


Drs. Eddy Harto Kusana, M.Pd
NIP. 19640507 198401 1 005 4

Dokumentasi 3 :Berita acara RAPBS



Dokumentasi 4 : Berita Acara APBS

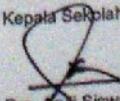


Dokumentasi 5 : Rangkuman Pendapatan Dan Belanja Sekolah

AKA...
3. Telp/Fax...
lumas@smkn3jogja...

YOGYAKARTA

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN		FORMULIR DPA SP
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014-2015		
Urusan Sekolah	: Pendidikan	
Satuan Pendidikan	: SMK Negeri 3 Yogyakarta	
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	2	3
	PENDAPATAN	
	PENDAPATAN	19.201.715.093
4		
4 3 1 01	Dana APBN	1.885.657.500
4 3 1 02	Dana APBD Propinsi D.I.Y	972.150.000
4 3 1 03	Dana APBD Kota	11.395.627.584
4 3 1 04	Iuran Wajib	704.160.000
4 3 1 06	Sumbangan Investasi	1.753.500.000
4 3 1 08	SILPA	1.394.607
4 3 1 09	UPJ	16.500.000
4 3 1 10	Biaya Personal	532.085.000
4 3 1 11	Biaya Personal yang belum terbayar tahun lalu dan Sumbangan investasi Yang Belum Terbayar Tahun Lalu	1.940.640.402
		19.201.715.093
5	BELANJA	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.036.044.584
5 1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.036.044.584
5 1. 1.	BELANJA PEGAWAI	
		11.165.670.509
5 2.	BELANJA LANGSUNG	1.071.821.500
6 2. 1.	BELANJA PEGAWAI	7.371.947.009
6 2. 2.	BELANJA BARANG DAN JASA	2.721.902.000
6 2. 3.	BELANJA MODAL	
SURPLUS / (DEFISIT) :		0

Kepala Sekolah

 Drs. Aruk Siswanto
 NIP. 19640507 199010 1 001

Dokumentasi 6 : rincian pendapatan sekolah

YAKAR
233, Telp/Fax 021
umas@smkn3jogja.sch

YOGYAKARTA



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN

Formulir
DPA-SP 1

DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2014-2015

Urusan Sekolah : Pendidikan
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Yogyakarta

Ringkasan Pendapatan Satuan Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
	PENDAPATAN				19.201.715.093
4 3 1 01	APBN				1.885.857.500
	01 Bantuan Ujian Nasional			10.657.500	10.657.500
	02 Bantuan PEDAS (Pekan Disiplin Siswa)				70.000.000
	03 BOS	1805	ot	1.000.000	1.805.000.000
4 3 1 01 02	APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				972.150.000
	01 BOSDA	1805		510.000	920.550.000
	02 Bantuan Insentif GTI/PTT	43	ok	1.200.000	51.600.000
4 3 1 01 03	APBD Kota Yogyakarta				11.395.627.584
	01 Gaji Pegawai dan Tunjangan PNS				7.401.307.584
	02 Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) KMS				1.014.000.000
	<i>Kelas X</i>	139	ot	3.000.000	417.000.000
	<i>Kelas XI</i>	103	ot	3.000.000	309.000.000
	<i>Kelas XII</i>	96	ot	3.000.000	288.000.000
	03 Bantuan Ujian Kompetensi	577	ok	85.000	49.045.000
	04 Bantuan Ujian Nasional	577	ok	75.000	43.275.000
	05 BOP	1805	ot	1.120.000	2.021.600.000
	06 BOP Biaya Personal	1805	ot	480.000	866.400.000
	PENDAPATAN				Rp 4.948.280.009
4 3 1 04	Lain-lain Pendapatan Sumber Lain Yang Sah				704.160.000
	01 Iuran wajib bulanan				240.480.000
	<i>Kelas X</i>	501 x 12	6012	ob	40.000
	<i>Kelas XI</i>	485 x 12	5820	ob	40.000
	<i>Kelas XII</i>	481 x 12	5772	ob	40.000
	02 Sumbangan Investasi				1.753.500.000
	<i>Kelas X</i>	501 x 1	501	ok	3.500.000
	03 SILPA				16.500.000
	04 UPJ				532.085.000
	05 Biaya Personal				212.925.000
	<i>Kelas X</i>	501	ot	425.000	206.125.000
	<i>Kelas XI</i>	485	ot	425.000	113.035.000
	<i>Kelas XII</i>	481	ot	235.000	113.035.000
	06 Biaya Personal yang belum terbayar				1.940.640.402
	07 Sumb. Investasi yang belum terbayar tahun lalu				

Wepala Sekolah



Drs. Aruji Siswanto
NIP. 19640907 198010 1 001

Dokumentasi 7 : Rincian Belanja Sekolah

YOGYAKARTA
 YOGYAKARTA
 65233, Telp/Fax : 0274 813503
 humas@smkn3jogja.sch.id
 SMKN 3 YOGYAKARTA

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 SATUAN PENDIDIKAN**
 DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
 TAHUN AJARAN 2014- 2015

Formulir
 DPA-SP
 2.1

Instansi : Pendidikan
 Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Yogyakarta

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN PENDIDIKAN**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)	
		Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan		
1	2	3	4	5	6	7	
	BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG					7.401.307.884	
	BELANJA PEGAWAI					7.401.307.884	
	Gaji dan Tunjangan					7.401.307.884	
	01 Gaji Pokok PNS					8.883.947.200	
	01 Golongan IV	89	x	13	OB	Rp 2.948.400	3.412.455.800
	02 Golongan III	59	x	13	OB	Rp 2.570.400	2.065.096.800
	03 Golongan II	4	x	13	OB	Rp 2.238.300	116.391.600
	Tunjangan Keluarga					807.879.888	
	01 Golongan IV	89	x	13	OB	Rp 317.028	367.726.996
	02 Golongan III	59	x	13	OB	Rp 294.940	226.218.980
	03 Golongan II	4	x	13	OB	Rp 267.940	13.932.690
	Tunjangan Fungsional					638.284.000	
	01 Golongan IV	89	x	13	OB	Rp 388.000	450.073.000
	02 Golongan III	41	x	13	OB	Rp 327.000	174.291.000
	03 Golongan II	4	x	13	OB	Rp 210.000	10.920.000
	Tunjangan Beras					361.152.888	
	01 Golongan IV	89	x	12	OB	Rp 198.000	211.454.000
	02 Golongan III	59	x	12	OB	Rp 198.000	140.194.000
	03 Golongan II	4	x	12	OB	Rp 196.000	6.504.000
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus					208.621.828	
	01 Golongan IV	89	x	13	OB	Rp 114.895	132.933.515
	02 Golongan III	59	x	13	OB	Rp 92.770	71.154.590
	03 Golongan II	4	x	13	OB	Rp 48.787	2.432.924
	Tunjangan Struktural					6.370.000	
	01 Golongan IV						
	02 Golongan III	1	x	13	OB	Rp 490.000	8.370.000
	03 Golongan II						
	Tunjangan Fungsional Umum					0	
	01 Golongan IV						
	02 Golongan III						
	03 Golongan II						
	Pembuatan Gaji					154.499	
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG					7.401.307.884	

Kepala Sekolah
 Drs. Anj Siswanto
 NIP. 19640507 199010 1 001



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN PENDIDIKAN

Formulir
DPA-SP
2.1

**DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2014- 2015**

Sekelompok : Pendidikan
 Satuan Pendidikan : SMK Negeri 3 Yogyakarta

**RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN PENDIDIKAN**

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN				JUMLAH (Rp)
		Rincian	Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
5 1 1	BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG					634.737.000
5 1 1	BELANJA PEGAWAI					634.737.000
5 1 1 01	Belanja Pegawai					
	Gaji dan Tunjangan					
	Gaji Pokok					
	-Gaji Tenaga Honorar Sekolah	13 X	13	169	OB	1.173.000
	-Gaji Guru Tidak Tetap	16 x 30 X	13	6240	OB	30.000
	Insentif GTT/PTT Nabab			43	OB	1.200.000
	Jumlah 1					
	Honor Pen. Jwb. Pelaks. Kegiatan					
	Kepala Sekolah	1 X	12	12	OB	850.000
	Wakil Kepala Sekolah	5 X	12	60	OB	30.000.000
	Ka TUR/Kegiatan Kota/da Urahaan dan RT	1 X	12	12	OB	4.800.000
	Kapala Kompetensi Kesehatan	6 X	12	72	OB	350.000
	Bendahara Sekolah	1 X	12	12	OB	2.700.000
	Pembantu Bend. Komite Sekolah	1 X	12	12	OB	2.400.000
	Pembantu Bendahara Ura. Gaji	1 X	12	12	OB	2.400.000
	Pemb. Bend. Ura. Bantuan	3 X	12	36	OB	200.000
	Kapala Bengkal	8 X	12	96	OB	7.200.000
	Wali Kelas	80 X	12	720	OB	200.000
	Koordinator Perpustakaan	1 X	12	12	OB	125.000
						300.000
						90.000.000
						3.800.000
						634.737.000

Kepala Sekolah

Dr. Aruk Siswanto
 NIP. 19640507 199010 1 001

Dokumentasi 8 : Penggunaan Dana Investasi

RINCIAN SUMBANGAN INVESTASI

$$\frac{1.753.500.000}{401 \text{ siswa non KMS}} = 3.500.000$$

URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
	Volume	Sat.	Harga Satuan	
Pengadaan Mesin Bubut	1	bh	102.200.000	102.200.000
Pengadaan Mesin Frais	1	set	119.000.000	119.000.000
Pengadaan Mesin Gerinda tool	1	set	31.700.000	31.700.000
Hydrene meter persisi 1A	2	bh	5.500.000	11.000.000
Hydrene meter	2	bh	6.000.000	12.000.000
Mikroskop	2	bh	10.000.000	20.000.000
Mesin potong Plat	1	bh	35.000.000	35.000.000
Mesin Boor duduk	1	bh	12.000.000	12.000.000
Wheel Balancer Digital	1	bh	30.240.000	30.240.000
Automatic Tyre Changer	1	bh	36.288.000	36.288.000
Annual Wheel Alignment	1	bh	10.080.000	10.080.000
Pengkrak Buaya KRISBOW 5 Ton	1	bh	13.104.000	13.104.000
Mesin Gerinda Duduk MAKITA	1	bh	3.108.000	3.108.000
Mesin Bor Duduk MAKITA	1	bh	5.456.000	5.456.000
Mesin Bor Tangan MAKITA	1	bh	2.604.000	2.604.000
Mesin LAS CMR 250 Amper	1	bh	9.408.000	9.408.000
Angka Sorong MITUTOYO 30 cm	1	bh	2.620.000	2.620.000
Compression Test Set ulir	1	bh	3.024.000	3.024.000
General Chagerr	1	bh	10.080.000	10.080.000
Hydraulic impact TOKU	2	bh	3.427.000	6.854.000
Compressor 2 PK	1	bh	9.996.000	9.996.000
Printer Microprocessor	2	bh	4.500.000	9.000.000
Radio Mixer	1	unit	3.500.000	3.500.000
Projector Home Theater 3D	1	unit	22.000.000	22.000.000
VCD TV Recorder	1	unit	6.270.000	6.270.000
Camera Canon DLSR	5	unit	9.498.000	47.490.000
Teodolith	3	bh	40.000.000	120.000.000
Mesin Gergaji bundar bermeja	1	set	20.000.000	20.000.000
Mesin bor	1	bh	20.000.000	20.000.000
Pembuatan ruang perakitan PC MM & TKJ	1	set	57.197.000	57.197.000
Pengadaan Ruang TOOLMAN MM	1	set	51.641.000	51.641.000
Disco 1941 w/2 GE,2 EHWIC slots,256MB CF,512MB RAM,IP Base	1	ubh	15.950.000	15.950.000
SMARTnet 8x5xNBD for 1941 Router	1	bh	1.990.000	1.990.000
SMARTnet 8x5xNBD for 1941 Router with Security Technology Package License	1	bh	1.990.000	1.990.000
PC SUPPORT 8X5XNBD 5108 Blade Server Chassis	1	bh	7.000.000	7.000.000
35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet	1	unit	1.000.000	1.000.000
35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet	2	set	1.000.000	2.000.000
SMARTNET 8X5XNBD Catalyst 2960 24 10/100 + 2 1000BT LAN	2	bh	1.030.000	2.060.000
Pengadaan Genset dan instalasi	1	set	328.750.000	328.750.000

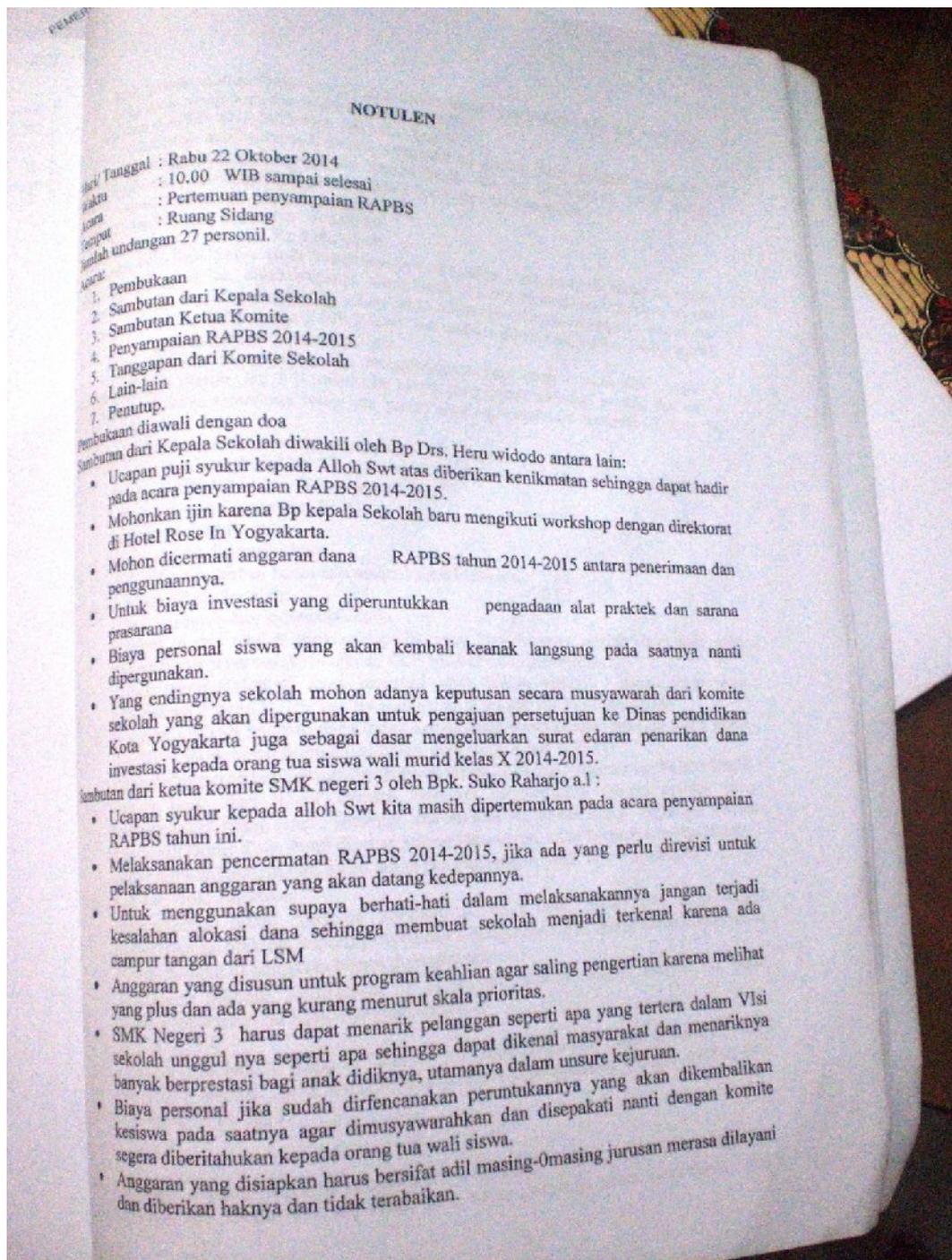
Instansi AC & Instalasi Ruang Aula	8	set	5.500.000	44.000.000
Instansi LCD ruang kelas	43	set	4.750.000	204.250.000
Instansi Master Plan	1	unit	100.000.000	100.000.000
Instansi dana bantuan pengadaan peralatan praktik			162.000.000	162.000.000
Instansi Almisi pinis	1	set	14.000.000	14.000.000
Instansi Tempat papan Informasi Sekolah	1	set	23.650.000	23.650.000
Jumlah				1.763.500.000

Kepala Sekolah



Drs. Arji Siswanto
NIP. 19640507 199010 1 001

Dokumentasi 9 : Notulen RAPBS Bersama Komite Sekolah



• Semua stake holder SMK negeri 3 Yogyakarta harus loyal disiplin dan ada semangat yang menantang demi kemajuan pelaksanaan KBM.
 • Laporan terimakasih atas waktunya, pada kesempatan ini disampaikan RAPBS 2014-2015 yang sudah disajikan melalui print out supaya bapak dan ibu mencermati, untuk biaya investasi sebesar Rp 3.500.000,00 per siswa dan biaya personalnya untuk:

- Kelas X sebesar Rp 571.000,00
- Kelas XI sebesar Rp 580.000,00
- Kelas XII sebesar Rp 418.500,00

Tanggapan dari Bpk. Setyo Budi Sungkwo menyampaikan dana investasi tahun ini masih terbagi ada 20 kegiatan siswa yang belum dapat dilaksanakan harus dipangkas, bagaimana dana investasi sebesar Rp 3.500.000,00 bisa sedikit dinaikkan, karena Dinas sendiri anggarannya sampai dengan Rp 5 juta.
 Dan Bapak Yulianto mengatakan cara menghitungnya juga sama dengan SMK negeri 2 yang anggaran sementara tetap ada punya sharing, sementara menyetujui tetap Rp 3.500.000,00.

Dari Bapak Bambang komite tetap menanyakan a.l:

1. Sumbangan investasi yang belum terbayar sudah sampai dimana mengupayakannya
2. Program PEDAS itu bentuknya seperti apa
3. Informasi pasca lepas dari BLPT
4. Padamu Negeri itu apa
5. Janset segera diprioritaskan
6. Untuk dana investasi harus ada muncul spesifikasinya.

Tanggapan dari pihak Sekolah:

1. Janset segera diprioritaskan setuju
2. Padamu negeri adalah programdapodik yang keperluannya adalah input data guru bersertifikasi serta untuk penilaian PKB MGMP serta penelitian
3. Untuk menindaklanjuti dana investasi yang belum tertagih sudah diupayakan kerjasama dengan BTPN saat ini sudah masuk sekitar Rp 347.000.000,00
4. Program PEDAS bantuan dana untuk kedisiplinan siswa dengan menggandeng pihak (KODIM untuk melatih etika lalu lintas, bela Negara dan TONTI)
5. Dana Pedas perolehan pengajuan proposal tahun 2013-2014 sebesar Rp 70.000.000,00
6. Pasca lepas dari BLPT sekolah berupaya menyediakan tempat praktek yang menggunakan ruang teori sehingga saat ini kelas XI masuk siang sejumlah 9 kelas sudah ijin Dinas Kota tetapi dipesan jangan lama-lama, kami berupaya mengajukan
7. nada bantuan-bantuan dari pusat untuk pengembangan SMK N 3 Yogyakarta.

Tanggapan dari Bpk. Bambang:

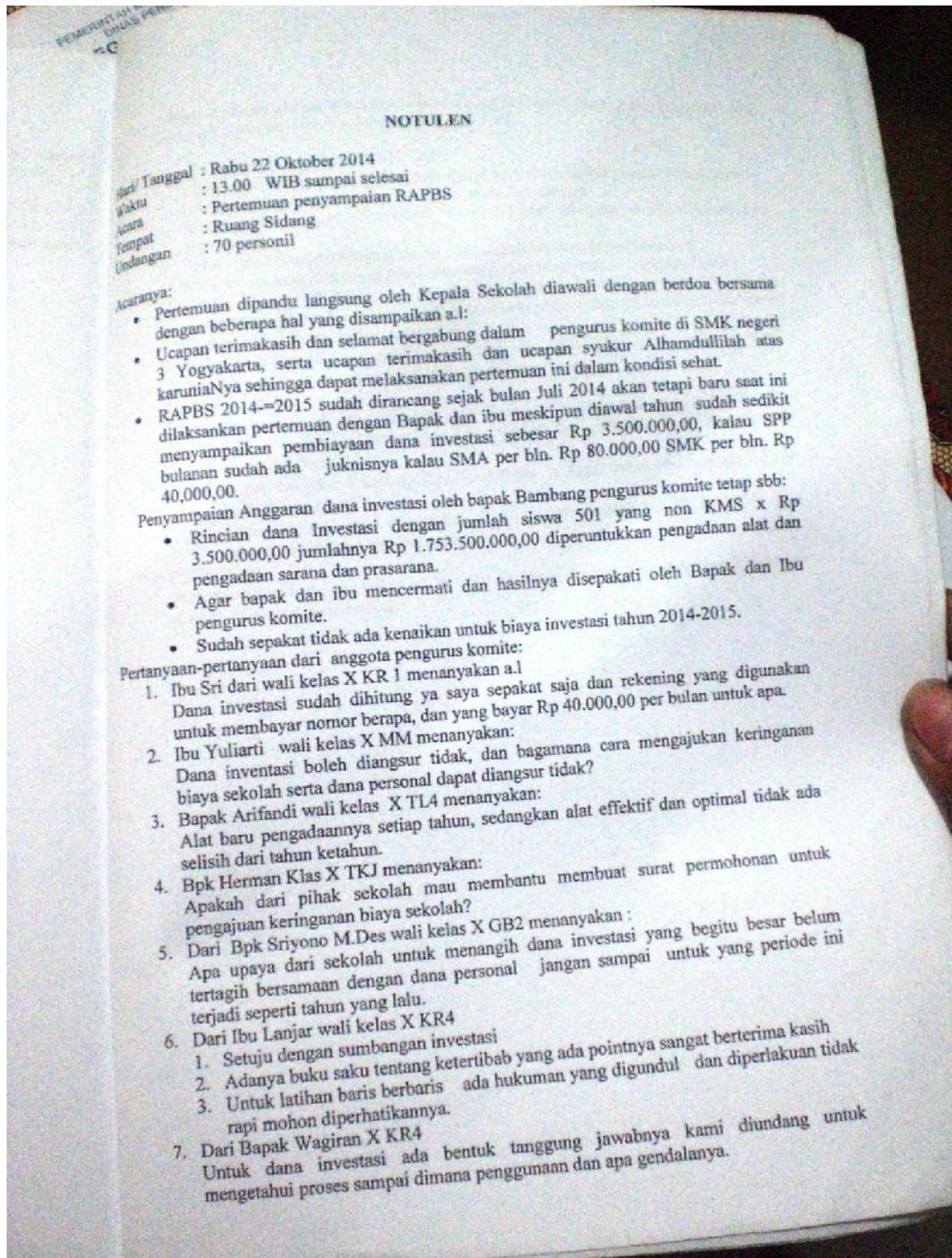
- Mengusulkan untuk menjaga keselamatan kerja bagi siswa dan guru dalam melaksanakan praktek, seperti penyediaan tabung kebakaran yang harus dianggarkan karena melihat di anggaran belum diprogramkan.
- Tanggapan sekolah, terimakasih ini belum terpikirkan sampai sedetail itu, maka dalam kesempatan ini akan dianggarkannya.

KESIMPULANNYA:

Komite sekolah pada hari ini Rabu 22 Oktober 2014 diputuskan untuk dana investasi RAPBS tahun 2014-2015 sebesar Rp 3.500.000,00 dan dapat dipergunakan sebagai sumber dana masuk tahun 2014-2015.

Pada pertemuan dengan pengurus komite tidak tetap yang siang pukul 13.00 WIB ketua komite mohon ijin karena ada keperluan lain, maka pemandu acara diserahkan kepada

Dokumentasi 10 : Notulen RAPBS bersama Orang tua siswa



Adanya evaluasi kenyamanan dan keamanan jangan terjadi geng-geng disekolah yang membuat orang tua was-was adanya menyekolahkan.

TANGGAPAN DARI SEKOLAH a.l:

1. Untuk dana investasi dapat diangsur mulai bulan November sampai Maret 2014
2. Untuk beasiswa akan dibantu administrasi pengajuannya
3. Biaya personal agar dibayarkan sekali karena sebagian sudah dilaksanakan kegiatannya.
4. Belum ada informasi tentang siswa yang digundul akan ditindaklanjuti
5. Mohon orangtua ikut mengawasi siswanya agar sama-sama berjalan baik.
6. Sudah ada upaya kerjasama dengan BTPN dan Bank Jogja untuk melayani pembayaran dan ada tagihan secara rutinitas kepada orangtua siswa melalui siswa bagi yang belum menyelesaikan administrasi.
7. Adanya kerjasama dengan wali kelas dan ada Tim yang bekerja untuk mengupayakan kelancaran pemasukan pembayarannya.

KESIMPULAN:

- Dana investasi dapat diterima dan disepakati oleh pengurus komite tetap dan tidak tetap sebagai perwakilan kelas sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Dapat diangsur 5 kali @ Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) mulai bulan November 2014.
- Dana personal dapat dibayarkan sekali dengan jumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

PENUTUP:

Pertemuan diakhiri pada pukul 15.30 WIB dipimpin dengan doa oleh Kepala Sekolah dengan ucapan Alhamdulillah.

Dokumentasi 11 : Edaran Perubahan Pembayaran Uang Investasi

F/553/TU/1
14 November 2014



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Jl. RW. Monginsidi No. 2 Jetis Yogyakarta 55233 Telp/Fax : (0274) 513503
EMAIL : humas@smkn3jogja.sch.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@ogjakota.go.id
WEBSITE : <http://smkn3jogja.sch.id>



Nomor : 03/KS/SMKN.3/X/15
Lamp : ---
Perihal : Revisi Biaya Investasi.

Yogyakarta, 16 Oktober 2015.

Kepada:
Yth.Bpk/Ibu Orangtua/Wali peserta Didik
Kelas X Th. 2015-2016
SMK Negeri 3 Yogyakarta
di. **YOGYAKARTA.**

Dengan hormat,
Merevisi surat edaran kami Nomor 02/KS/SMKN.3/IX/15, tertanggal 28 September 2015 perihal pemberitahuan sumbangan investasi sekolah pada tahun 2015-2016 sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan secara Tunai ataupun diangsur mulai Bulan November 2015 sampai bulan Mei 2016.
Sehubungan dengan peruntukan biaya investasi tersebut yang akan digunakan untuk kegiatan pengadaan peralatan kegiatan belajar mengajar , pada tahun 2015 ada bantuan BOSDA yang menurut juknis dapat digunakan untuk pengadaan alat praktek, sehingga sekolah menghitung kembali besaran biaya investasi tahun 2015-2016 yang semula Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) diturunkan menjadi Rp 2.800.000,00 (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ada pengurangan sejumlah Rp 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah).
Sedangkan biaya investasi pada Tahun Pelajaran 2015-2016 sejumlah Rp 2.800.000,00 (Dua juta Delapan ratus ribu rupiah) dapat dibayarkan dengan perincian sbb:

Bulan	Sumbangan Investasi
November 2015	Rp. 500.000,00
Desember 2015	Rp 500.000,00
Januari 2016	Rp 500.000,00
Pebruari 2016	Rp 500.000,00
Maret 2016	Rp 500.000,00
April 2016	Rp 300.000,00
Jumlah Total Investasi	Rp 2.800.000,00

Demikian surat edaran pemberitahuan ini kami sampaikan kepada Bpk/Ibu Orang Tua/Wali peserta Didik Kelas X Tahun Pelajaran 2015-2016, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

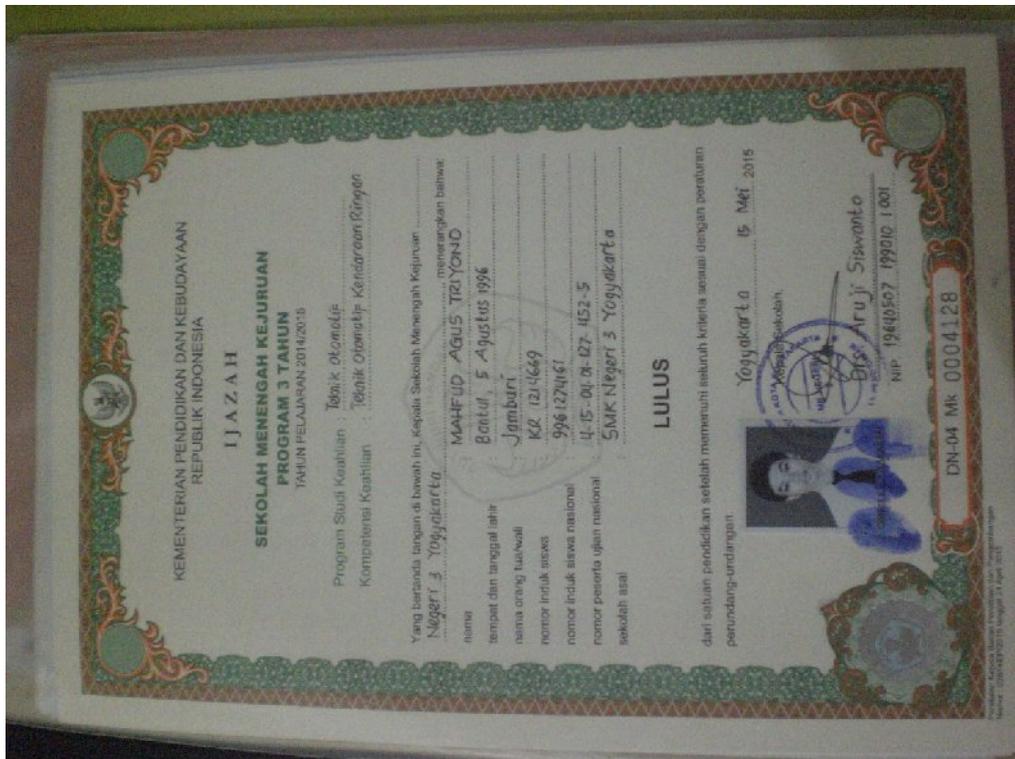
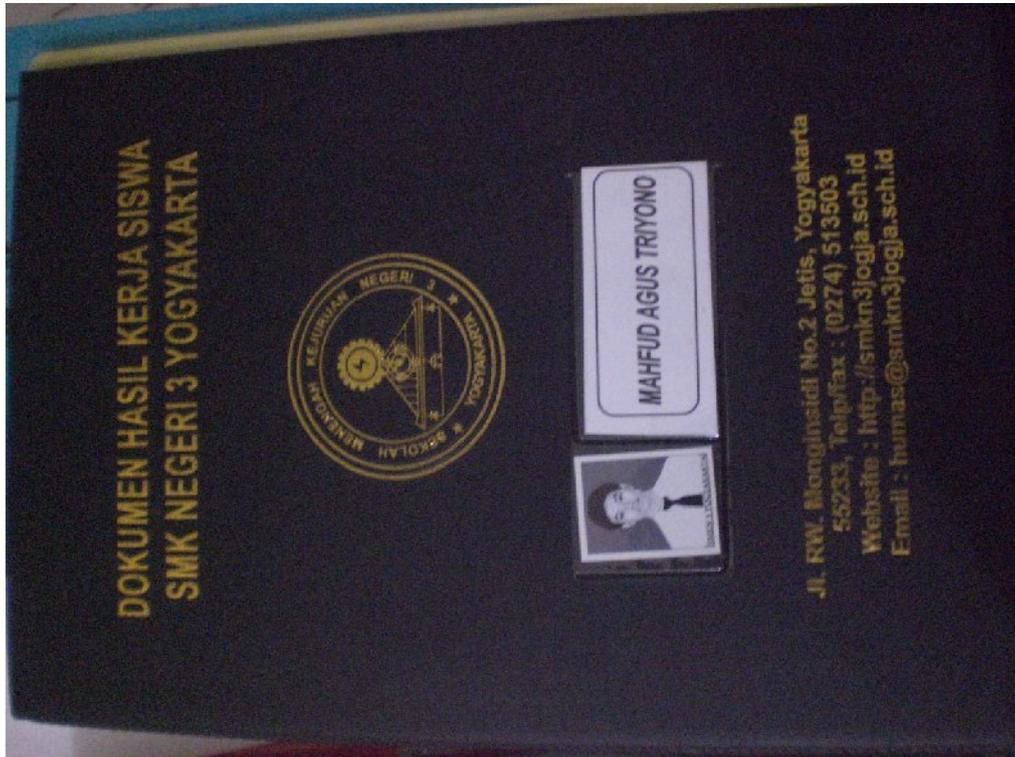


Komite Sekolah
Drs. Suko Raharjo



Mengetahui
Kepala Sekolah
Drs. Bujang Sabri
NIP. 19630830 198703 1 003

Dokumentasi 12 : Ijasah yang Belum Diambil



Dokumentasi 15 : Daftar Hasil Ujian Nasional

DAFTAR SEKOLAH SMK BERDASARKAN JUMLAH NILAI UJIAN NASIONAL SMK TAHUN PELAJARAN 2013/2014											UN	
Kode/Instansi : 04 - DI YOGYAKARTA											Kota/Kab. : 01 - KOTA YOGYAKARTA	
No.	KD. SEK	NAMA SEKOLAH	STS SEK	JUMLAH			MATA UJIAN					RANK
				PES	TL	%	BIN	ING	MAT	KMP	TOT	
1	01-132	SMK INDONESIA YOGYAKARTA	S	119	-	-	9.06	7.68	8.74	8.33	33.81	1
2	01-133	SMK NEGERI TEKNOLOGI INDUSTRI	N	174	-	-	8.94	7.45	8.75	8.45	33.59	2
3	01-110	SMK NEGERI 7 YOGYAKARTA	N	281	5	1.78	8.88	7.37	8.22	8.37	32.84	3
4	01-101	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA	N	706	21	2.97	8.72	7.06	7.57	8.14	31.49	4
5	01-105	SMK NEGERI 1 YOGYAKARTA	N	209	9	4.31	8.68	6.29	7.03	8.53	30.53	5
6	01-136	SMK CIPTA BHAKTI HUSADA YOGYAKARTA	S	87	8	9.20	8.70	6.29	7.15	7.53	29.67	6
7	01-115	SMK NEGERI 4 YOGYAKARTA	N	540	92	17.04	8.32	5.98	6.34	8.37	29.01	7
8	01-127	SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA	N	586	86	14.68	8.38	6.10	6.38	8.13	28.99	8
9	01-114	SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA	N	401	82	20.45	8.28	6.11	6.05	8.30	28.74	9
10	01-121	SMK NEGERI 5 YOGYAKARTA	N	430	140	32.56	8.03	5.74	5.18	8.02	26.97	10
11	01-107	SMK MUHAMMADIYAH 1 YOGYAKARTA	S	62	20	32.26	7.91	5.26	4.98	8.00	26.15	11
12	01-111	SMK BOPKRI 1 YOGYAKARTA	S	58	28	48.28	7.72	5.48	4.56	8.36	26.12	12
13	01-126	SMK PERKEBUNAN MM 52 YOGYAKARTA	S	25	10	40.00	7.47	5.22	4.70	8.11	25.50	13
14	01-125	SMK MUHAMMADIYAH 3 YOGYAKARTA	S	457	199	43.54	7.73	5.45	4.45	7.85	25.48	14
15	01-112	SMK MARSUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA	S	140	60	42.86	7.46	5.59	4.71	7.66	25.42	15
16	01-109	SMK KOPERASI YOGYAKARTA	S	111	52	46.85	7.72	4.65	4.70	8.26	25.33	16
17	01-106	SMK PIRI 3 YOGYAKARTA	S	39	19	48.72	7.74	5.29	4.37	7.80	25.20	17
18	01-108	SMK MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA	S	120	47	39.17	7.37	5.25	4.65	7.92	25.19	18
19	01-117	SMK MUHAMMADIYAH 4 YOGYAKARTA	S	35	19	54.29	7.54	5.17	4.51	7.64	24.86	19
20	01-104	SMK TAMANSISWA YOGYAKARTA	S	144	85	59.03	7.39	5.42	3.94	7.62	24.37	20
21	01-129	SMK PIRI 1 YOGYAKARTA	S	219	133	60.73	7.14	5.00	3.95	8.03	24.12	21
22	01-130	SMK BOPKRI 4 YOGYAKARTA	S	7	4	57.14	7.60	5.31	4.25	6.94	24.10	22
23	01-116	SMK PIRI 2 YOGYAKARTA	S	12	9	75.00	7.08	4.85	3.88	8.08	23.89	23
24	01-131	SMK IBU PAWIYATAN TAMANSISWA	S	31	24	77.42	7.16	5.68	3.28	7.70	23.82	24
25	01-118	SMK BOPKRI 2 YOGYAKARTA	S	44	28	63.64	7.32	4.85	3.86	7.78	23.81	25
26	01-162	SMK MA'ARIF 1 YOGYAKARTA	S	46	27	58.70	7.47	4.80	4.28	7.08	23.63	26
27	01-124	SMK PERINDUSTRIAN YOGYAKARTA	S	96	58	60.42	7.21	4.76	4.02	7.45	23.44	27
28	01-134	SMK BERDUDI	S	17	12	70.59	7.20	4.60	3.57	7.77	23.14	28
29	01-128	SMK ISLAM YOGYAKARTA	S	30	22	73.33	6.59	4.49	3.75	7.98	22.81	29
30	01-137	SMK PEMBANGUNAN YOGYAKARTA	S	14	9	64.29	6.57	4.77	3.45	7.32	22.11	30
31	01-102	SMK PANCA SAKTI YOGYAKARTA	S	17	16	94.12	6.34	3.86	3.18	8.11	21.49	31

Dokumentasi 14 : Daftar Gaji GTT dan PTT

**DAFTAR PENERIMAAN GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
BAGIAN BULAN SEPTEMBER 2015**

No	N A M A	TMT I	KG B KE	TMT	KGB	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan KJK/Khusus	Jumlah Diterimakan (Rp)	Tanda tangan
1	Sulastri Hastuti	01-Jul-06	6	Jul-14	Jul-16	952.000,00	125.000,00	1.077.000,00	1
2	Sri Mulyani D	08-Feb-07	5	Feb-13	Feb-17	952.000,00	125.000,00	1.077.000,00	2
3	Dadi Susanto	08-Feb-07	5	Feb-13	Feb-17	952.000,00	125.000,00	1.077.000,00	3
4	Marsudi	08-Feb-07	5	Feb-13	Feb-17	952.000,00	125.000,00	1.077.000,00	4
5	Dani Kurniawan	01-Apr-09	4	Apr-13	Apr-17	882.000,00	125.000,00	1.007.000,00	5
6	Jagyang Saputra	01-Okt-10	2	Oktb-12	01-Okt-16	818.000,00	125.000,00	943.000,00	6
7	Supangat	01-Okt-10	2	Oktb-12	01-Okt-16	818.000,00	125.000,00	943.000,00	7
8	Ari Kumianto	01-Mar-12	1	Sep-12	01-Mar-16	759.000,00	125.000,00	884.000,00	8
9	Dwi Supardiyanto	13-Agust-12	1	Feb-13	13-Agust-16	759.000,00	125.000,00	884.000,00	9
10	Tri Zuliani	13-Agust-12	1	Feb-13	13-Agust-16	759.000,00	125.000,00	884.000,00	10
11	Muh. Royan W	01-Sep-13	0	Mar-14	01-Sep-15	759.000,00	125.000,00	884.000,00	11
12	Nike Rahmawati H, S	10-Sep-14	0	Mar-15	10-Sep-15	555.000,00	125.000,00	680.000,00	12
13	Nurdin Syafei	01-Dec-14	0	1 Jun-15	01-Dec-15	555.000,00	125.000,00	680.000,00	13
Jumlah						10.472.000,00	1.625.000,00	12.097.000,00	

Terbilang : Duabelas juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah

Mengetahui,
Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta

Yogyakarta, 1 Oktober 2015
Bendahara,

Drs. Bujang Sabri
NIP. 19630830 198703 1 003

Dwi Atmaja Priyo Martana
NIP. 19600408 198303 1 018

Dokumentasi 16 : Daftar Siswa Tidak Naik Kelas


 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Jln. R. Wolff Manginsidi 2 (0274) 513503, 552322 Fax. 513503 Yogyakarta 55233

**DAFTAR PESERTA DIDIK TIDAK NAIK KELAS
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	KELAS	NO. INDUK	NAMA	KETERANGAN
1	X GB 1	GB. 1415462	Aldo Santosa Putra	KMS
2		GB. 1415479	Deska Fajar Dianto	KMS
3	X GB 2	GB. 1415500	Iqbal Miftakhul Latif	KMS
4	X KK	KK. 1415567	Restu Putra Prayoga	KMS
5	X TL 1	TL. 1415596	Angga Harry Andrian	
6		TL. 1415597	Angger Sonni Kuncoro Jati	
7		TL. 1415603	Bages Junianto	KMS
8	X TL 2	TL. 1415611	Dicky Bryan Her Hutomo	KMS
9		TL. 1415616	Erwanto	KMS
10		TL. 1415617	Erwin Yellowan	<i>Naik</i>
11	X TL 3	TL. 1415652	Lanang Rizki Sadewo	
12	X TL 4	TL. 1415662	Savira Mega Oktavia	
13		TL. 1415683	Septian Eka Saputra	
14		TL. 1415699	Yayang Pramadiya Sutejo	
15	X TP 2	TP. 1415822	Firmansyah	KMS
16		TP. 1415831	Ikbar Raihan	KMS
17	X TP 3	TP. 1415836	Jodhan Lutfi Eka Nugraha	
18		TP. 1415849	Muhammad Bagoes Paripurno	KMS
19		TP. 1415857	Nawang Ferdian	
20		TP. 1415861	Pandu Krisna Nurdiana	
21	X TP 4	TP. 1415872	Rio Pradinata Putra	
22		TP. 1415873	Rizal Zainuri	KMS
23	X KR 1	KR. 1415914	Aloysius Bagus Adji Pamungkas	
24	X KR 2	KR. 1415952	Galuh Fajar Raharjo	
25	X KR 3	KR. 1415963	Junindra Tri Wahyu Putro	KMS
26		KR. 1415972	Muchammad Ifan	KMS
27		KR. 1415990	Noval Maulana Azis	
28	X KR 4	KR. 1416007	Ryan Muarif Nugroho	
29	XI GB 2	GB. 1314853	Erin Martino Putra	
30		GB. 1314868	Iksan Prambudi Tama	KMS
31		GB. 1314872	Kharisma Dewa Bagus	
32	XI GB 3	GB. 1314906	Wahyu Ramadhan	KMS
33	XI KK	KK. 1314918	Erlin Dwi Krisnanto	
34		KK. 1314923	Joannes Christanto Surya Putra	
35		KK. 1314929	O'diaz Yudhistira	
36	XI TL 3	TL. 1315028	Martin Kristanto Simanjuntak	
37		TL. 1315030	Mohammed Bagus Purwantono	
38	XI KR 3	KR. 1315340	Hartono	
39		KR. 1315346	Januar Adi Candra	
40	XI KR 4	KR. 1416094	Rangga Adi Yatra	

Yogyakarta, 27 Juni 2015

Dokumentasi 17 : Daftar Siswa Keluar/ Pindah Sekolah

DAFTAR MUTASI SISWA
TAHUN PELAJARAN: 2014 / 2015

NO	NAMA DAN NOMOR INDIK SISWA	NO SURAT	ASAL SURAT	KELAS	AGAMA	TEMPAT TGL LAHIR	NAMA ORANGTUA	ALAMAT	TGL MASUK	TGL KELUAR	ALASAN	PARAF
1	MUHAMMAD SYAIFUL NIZAR HARITANO	412/ 1048	SMK N 3 JK	XI MM	ISLAM	JK. 23 April 1997	TRI HARJONO BUCIANTO	SURYO PUTRANI RA. II 105 Perumahan Kraton Jk. 55131	16 Juli 2012	15 April 2014	Pindah Sekolah	
2	DWI JUNI SAPITRO	412/ 1053	SMK N 3 JK	XI TP3	ISLAM	JK. 25 Juni 1995	MARZANO	Kirabayan No II RT. 8 Widagran Jk. 55252	16 Juli 2012	15 April 2014	Pindah Sekolah	
	ADAM BARIK AL HADJI	412/ 1054	SMK N 3 JK	XI TP2	ISLAM	JK. 1 Juli 1998	HRU MAFYANTO	Jogjakarta MT II RT. 7 Klaten Jk. 55131	4 Juli 2013			
3	ETIYA BARIK RAHMAN	412/ 1056	SMK N 3 JK	XI TL	ISLAM	BANTUK 12 Januari 1999	LIGIT WIDORO	JEMBRAL MS II RT. 03/3 Klaten Jk. 55131	4 Juli 2013	15 April 2014	Pindah Sekolah	
4	SIPRIYATNO	421/ 1052	SMK N 3 JK	XI GB3	ISLAM	SEMAN 25 Mei 1995	PANNIYONO	Bungayogi RT. 11/104 AT-14/RT. 04 Lany Wan. Jk.	31 Juli 2013	23 April 2014	Pindah Sekolah	
5	SOEK DWI PUTRA	422/ 1184	SMK N 3 JK	XI 9	ISLAM	Pinjung Jatayuhen 1/1993 Mant	HARAHANTO	Blk. Keloroy km 4,5 Cendak Martani Mergangsa Jk. 55188	15 Juli 2014	15 April 2015	Pindah Sekolah	

DAFTAR MUTASI SISWA
TAHUN PELAJARAN: 20.... / 20....

NO	NAMA DAN NOMOR INDIK SISWA	NO SURAT	ASAL SURAT	KELAS	AGAMA	TEMPAT TGL LAHIR	NAMA ORANGTUA	ALAMAT	TGL MASUK	TGL KELUAR	ALASAN	PARAF
	ROYI HIRNORO	423/ 088	SMK 3 JK	XI GB2	ISLAM	SEMAN 27/12 2008	SIPRIYONO	Agungyogi km RT-08 Pw-11 Klaten Jk. 55551	4 Juli 2014	29 Juni 2015	Pindah Sekolah	
	ENDIN MOREND	422/103	SMK 3 JK	XI GB3	ISLAM	Jakarta 22 April 1998	Lejo Maribun Kuter-kuter	Desa Panal Pulus RT. 8 Punguy Lago Seaman Klaten 55188	4 Juli 2014	29 Juni 2015	Pindah Sekolah	
	ANGGITO BAGUS DWI PRABERTO	422/ 145	SMK 3 JK	XI TP	ISLAM	Jk. 29/1 1999	Sudarto	Pajohesuman MS2 527/RT. 017/004 Koperalan Mergangsa Jk.	27 Juni 2014	4 Juli 2015	Pindah Sekolah	
	ANDI KURNIAWAN	422/ 129	SMK 3 JK	XI TP	ISLAM	JK. 2-Oket 1996	Nagimin	Joga Kargan. MT 2 608 RT-38/10 Mantri Jawa Jk.	4 Juli 2012	4 Juli 2015	Pindah Sekolah	
	MUSNI ARSUANDAR	422/ 1280	SMK 3 JK	XI T2	ISLAM	Seaman 13/9 1998	Sutrisman	Madura Kanyoran Gunging Keman.	27 Juni 2014	17/12 2014	P.S	
	CAHYA CHANINDA ALIA PRINISTA	422/ 1231	SMK N 3 JK	XI AV1	ISLAM	JK. 23/9 1997	SLAMET SANTOSA	Tegal Rejo TR3/285 AT-14/05 Tegal Rejo Jk.	27 Juni 2014	20/12 2014	P.S.	



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA
Jl. W. Monginsidi 2 Telp./Fak. (0274) 513503 Yogyakarta 55233
Website : <http://smkn3yoga.sch.id> E-mail : humas@smkn3yoga.sch.id

F/755/WKS.3/21
20 Agustus 2013



SURAT KETERANGAN PINDAH/KELUAR SEKOLAH
NOMOR : 422 / 1032

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : EGA BOMANTARA SAPUTRA
2. Nomor Induk Siswa : TP. 1214498
3. Nomor Induk Siswa Nasional : 9964181769
4. Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 2 September 1996
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Bangunrejo TR. I/1652 RT. 51/RW. 11 Kricak Tegalrejo Yogyakarta
55242
8. Nama Orang Tua : Sudaryanto
9. Pekerjaan Orang Tua : Buruh
10. Alamat Orang Tua : Bangunrejo TR. I/1652 RT. 51/RW. 11 Kricak Tegalrejo Yogyakarta
55242
11. Diterima di sekolah ini
 - Tanggal : 16 Juli 2012
 - Di Kelas : X (sepuluh) TP 2
 - Sekolah sebelumnya : SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta
12. Terakhir di sekolah ini
 - Di Kelas / Program Kejuruan : XI (sebelas) TP 2 / Teknik Pemesinan
 - Meninggalkan, tanggal : 30 September 2014
 - Alasan meninggalkan sekolah : Pindah Sekolah
13. Keterangan lain-lain : Selama menjadi siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta yang bersangkutan berkelakuan baik

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sepenuhnya. Dan siswa yang telah keluar atau pindah tidak dapat diterima kembali di sekolah ini, serta tidak menjamin untuk diterima pada sekolah yang dituju.

Yogyakarta, 30 September 2014

Kepala Sekolah

Dik. Muji Siswanto
DINAS P. NIP. 19640507 199010 1 001

Tembusan :

1. Waka Kesiswaan
2. Bagian Pengajaran
3. Ketua Program Keahlian
4. Bimbingan Penyuluhan

Dokumentasi 18 : Daftar Perusahaan yang Bekerjasama dengan Sekolah

F1424/WKS4/8
8 Maret 2013

DAFTAR REKAMAN DOKUMEN SURAT KERJASAMA

NO.	IDENTITAS DOKUMEN	PERUSAHAAN / INSTANSI REKANAN	TANGGAL DOKUMEN	MASA BERLAKU KERJASAMA	BENTUK KERJASAMA	PENANGGUNG JAWAB (JABATAN)	ALAT SIMPAN	BATAS SIMPAN
1		PT Fuji Bajak Prestasi	26 Juli 2009	1 tahun	Kerjasama Tentang Perekrutan Calon Tenaga Kerja	WKS 4	Map	5 tahun
2	No. Tel. /HK/810/DBS-C2020000/2011	PT TELKOM INDONESIA	26 April 2011	1 tahun	Pemasangan Layanan INTERNET GOLD upto 10Mbps	WKS 4	Map	5 tahun
3		INDONESIAN SCHOOL MAGAZINE ON INTERNET	27 Juli 2011	1 tahun	Iklan Sekolah di Majalah	WKS 4	Map	5 tahun
4	No.074/092 dan No.421/484	BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK (BLPT) YOGYAKARTA	9 Mei 2011	3 tahun	Pelaksanaan KBM Praktik	WKS 4	Map	5 tahun
5		SF TONER	14 Oktober 2011	-	Penempatan Printer laserjet merk Canon LBP 2930	WKS 4	Map	5 tahun
6		LEMBAGA PENDIDIKAN TRANSPORTASI UDARA DAN PRAMUGARI IIAM	-	-	Sosialisasi IIAM kepada siswa kelas XII	WKS 4	Map	5 tahun
7	No. Perjanjian 020/MOU/AXIS-CJ1/X/2011	PT AXIS TELEKOM INDONESIA	25 Oktober 2011	1 tahun	Perjanjian Program AXIS	WKS 4	Map	5 tahun
8		INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	18 Februari 2012	24 - 25 Maret 2012	Perjanjian peminjaman tempat penyisihan "Eco Robot Competition 2012"	WKS 4	Map	5 tahun
9	M/M-SMK/PKL 132012/003	SUZUKI, PT KHARISMA MATARAM JAYA GEMILANG	November 2012	-	Kerjasama tempat Praktek Kerja Lapangan	WKS 4	Map	5 tahun
10		CV. MULTIPRATAMA TOURS & TRAVELS	17 Desember 2012	-	Kerjasama pengadaan Paket Perjalanan Jakarta - Bandung Visit Factory	WKS 4	Map	5 tahun
11	488/091	PT Jogja Pashika Daya	30 Januari 2013	2 tahun dengan evaluasi periodik setiap 6 bulan	Kerjasama Produksi Lampu LED, pihak PT JPD sebagai pemrakasa dan penyedia alat bahan pembusahan LED, pihak	WKS 4	Map	5 tahun

12	No.488/993 dan No.016/098/1/Ms UNV I/2013	PT SUKSES BERSAMA BANGUN TECHINDO	5 Juli 2013	2 tahun	SMKN 5 Yogyakarta sebagai tempat LED Praktek Kerja Industri / On The Job Training	WKS 4	Map	5 tahun
13	No.423/094 dan No.130/LUN/34 15/09/2 014	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	30 Januari 2014	1 bulan	Tempat Pelaksanaan Kegiatan Ujian Kompetensi Jurusan siswa kelas XII Teknik Pemasaran	WKS 4	Map	5 tahun
14		CV. MULTIPRATAMA TOURS & TRAVELS	5 Maret 2014	-	Kerjasama pengadaan Paket Perjalanan Kudus - Jakarta - Bandung Visit Factory, Paket Jakarta - Bandung Visit Factory dan Paket Jepang - Surabaya - Malang Visit Factory	WKS 4	Map	5 tahun
15	No. 34/PKSKMS/SMKN3Y K/STP/VI/2014 No. 305/090	PT Karya Multi Sejahtera	1 Juli 2014	1 Juli 2014 - 31 Desember 2014	Kerjasama Penyedia Jasa Tenaga Kerja Satuan Pengamanan	WKS 4	Map	5 tahun
16	No. 680/993 No. 003/ADG-CS/2014	PT Asia Duta Sarana	1 Juli 2014	3 bulan 11 Juli 2014 - 30 September 2014	Kerjasama jasa Tenaga Pelembaga Kebencanaan	WKS 4	Map	5 tahun
17		PT Bumi Metalindo Persada	8 Desember 2014	1 tahun	Kerjasama rekrutmen dan penyelenggaraan Training calon Karyawan	WKS 4	Map	5 tahun

F/A1/WK54/40

14 OKTOBER 2010



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA



Cert. No: 01 100 117000

Jalan RW. Monginsidi No. 2 Yogyakarta 55233 Telp/Fax: (0274) 543040 / 6608290
 website: www.smkn3jogja.sch.id email: humas@smkn3jogja.sch.id

DAFTAR PERMINTAAN TENAGA KERJA

NO	N A M A	ALAMAT	PRODUKSI
1	UT SCHOOL	Jakarta	Alat Berat
2	PT. Saptalndra Sejati	Jakarta/Kalimantan	Pertambangan Batu Bara
3	PT. Pama Persada	Jakarta/Kalimantan	Pertambangan Batu Bara
4	PT. Trakindo	Jakarta/Kalimantan	Pertambangan Batu Bara
5	PT. Sewa Tama Indonesia	Jakarta/Kalimantan	Pertambangan Batu Bara
6	PT. Showa Indonesia	Bekasi	Manufactur
7	PT. Chemco	Bekasi/Karawang	Manufactur
8	PT. Astra Honda Motor	Jakarta	Otomotif
9	PT. Astra Daihatsu Motor	Jakarta	Otomotif
10	PT. Toyota Astra	Jakarta	Otomotif
11	PT. Polytron	Kudus	Elektronika
12	PT. Simteri	Tangerang	Listrik
13	PT. Unindo	Jakarta	Listrik
14	PT. CG. Power System	Bogor	Listrik
15	PT. Kayaba Indonesia	Jakarta	Manufactur
16	PT. Karya Hidup Santosa	Yogyakarta	Manufactur
17	Universitas Gajah Mada	Yogyakarta	Informatika
18	PT. Sinar Alum Sarana	Tangerang	Manufactur
19	PT. BLY Indonesia	Jakarta	Pertambangan Minyak
20	PT. Indomobil/Nissan	Jakarta	Motor

Dokumentasi 20 : Lembar MOU/ Kerjasama

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk
DENGAN
SMKN 3 YOGYAKARTA
TENTANG
LAYANAN TELKOM INTERNET GOLD



NO. Tel./HK 810/DBS-C2020000/2011

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Duapuluhenam** bulan **April** tahun 2011(**26- 04 - 2011**) bertempat di **Yogyakarta** dilakukan kesepakatan antara pihak-pihak :

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk** yang beralamat di Jl Yos Sudarso 9 yang diwakili oleh **Umi Fatimah, SE** jabatan **Account Manager** Unit Divisi Business Service Regional II Area Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TELKOM**; -----
- II. **SMKN 3 YOGYAKARTA** yang beralamat **Jln. Wolter Monginsidi 2A Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta** diwakili oleh **Drs. Aruji Siswanto** Jabatan **Kepala Sekolah** selanjutnya disebut **PELANGGAN** ;-----

Masing-masing pihak menyatakan sepakat akan menyediakan layanan **INTERNET GOLD .10Mbps** dengan rincian sebagai berikut :-----

1. **TELKOM** dan **PELANGGAN** sepakat akan melakukan Pasang Baru layanan Internet Gold upto 10Mbps dengan data sebagai berikut :

NO	Jenis Layanan	ALAMAT INSTALASI	Biaya Instalasi	Biaya Bulanan (Rp)	Biaya 1 Tahun (Rp)	Jangka Waktu Berlangganan
1	INTERNET GOLD10 M	Jl Wolter Monginsidi 2 A Cokrodingratan, Jetis, Yogyakarta	1.250.000	4.000.000	48.000.000	1 th
			1.250.000	4.000.000	48.000.000	

Catatan :

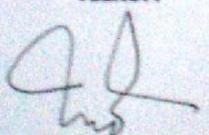
- Harga tersebut belum termasuk ppn 10% dan bea materai.

2. Jangka waktu pemasangan sampai dengan teraktivasi **selambat-lambatnya 3 bulan** dan Penyediaan Perangkat CPE (Router, Hub, PC dan Instalasi LAN/WIFI) menjadi tanggung jawab **PELANGGAN**;-----

ntar Business Service Area Jateng & DIY
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Pahlawan No. 10 Semarang 50241

T. 62-24 8302542

3. Setelah layanan INTERNET GOLD teraktivasi dan dapat beroperasi sesuai dengan spesifikasi layanan dalam butir 1 (satu) diatas, maka TELKOM dan PELANGGAN menandatangani Berita Acara Siap Operasi (BASO) :-----
4. TELKOM dan SMKN 3 YOGYAKARTA sepakat menandatangani kontrak berlangganan selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 01-06-2011 sampai dengan tanggal 31-05-2012;
5. PELANGGAN melakukan pembayaran biaya berlangganan Internet Gold, dengan cara dibayar setiap bulan, paling lambat Tanggal 10 sebesar Rp4,000,000,- (Empatjuta Rupiah), belum termasuk pajak dan biaya materai;-----
6. Pembayaran biaya berlangganan INTERNET dimaksud dilakukan dengan cara transfer ke Rekening **BANK MANDIRI**
a.n **PT. TELKOM DIVRE -IV Jateng dan DIY**
Rek. No.135-00-0415958-6
Jl Pahlawan 10
SEMARANG
setelah menerima surat tagihan billing atau invoice yang dikirimkan oleh TELKOM;-----
7. Nota Kesepakatan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penerbitan Invoice Biaya Bulanan dengan dilampiri Berita Acara Siap Operasi apabila Kontrak berlangganan belum selesai ditandatangani oleh **Kedua Belah Pihak**; -----
8. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih rinci dalam Kontrak Berlangganan;-----
9. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

TELKOM

UMI FATIMAH,SE
 Account Manager

PELANGGAN


Drs. ARUJI SISWANTO
 Kepala Sekolah

Dokumentasi 21 : Daftar DU/DI dalam Kegiatan Prakerin

Pemerintah Kota Yogyakarta
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3
Jln. R. Wolter Monginsidi 2 (0274) 513503, 582322 Fax. 513503 Yogyakarta 55233
Website: www.smkn3jogja.sch.id e-mail : humas@smkn3jogja.sch.id

Management System ISO 9001:2008
TUW Management SYSTEM
TUW Management SYSTEM

DAFTAR PESERTA PRAKERIN ANGKATAN II TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO	NAMA SISWA	NO.INDUK	KELAS	INDUSTRI I		TANGGAL	INDUSTRI II		PEMBIMBING	
				NAMA	ALAMAT		NAMA	ALAMAT		
1	N. MALIK AB. RS	GB.1214182	XI GB 2	FINAL 3 ARSITEKTUR	Gang Kapuas II No 29 A Condong Sari, Condong Catur Sleman	6 Januari 2014 s.d 15 Maret 2014				
2	PUCIANGGA P. R	GB.1214184	XI GB 2							
3	JANUAR A. D. BUDI P	GB.1214189	XI GB 2							
4	M. FARIS NUR Hidayat	GB.1214190	XI GB 2							
5	RISQ QILANG R.	GB.1214170	XI GB 2							
6	M. NURUL HUDA	GB.1214183	XI GB 2	CV.SRI ROMO	Jl. Megelang Km 7 No 2 Sleman			Suwarnono, M.Pd		
7	LATIFU PAMUNGKAS	GB.1214173	XI GB 2							
8	KRENSA RENOTAMA	GB.1214171	XI GB 2							
9	QILANG PERDANA YOGA	GB.1214156	XI GB 2							
10	QIVANG SETYA ANDRI. AP	GB.1214159	XI GB 2	PT.WIDYA WASTU WASESA	Jl.Gedong Kuning No 110D Yogyakarta					
11	NANDA WULANDARI	GB.1214158	XI GB 2							
12	NEVI AYU SITI BUNDARI	GB.1214187	XI GB 2							
13	MUR IMAM BAHOFI	GB.1214190	XI GB 2							
14	HELLEN ROBAVINA S	GB.1214184	XI GB 2							
15	MUHAMMAD RYAN S	GB.1214184	XI GB 2	PT SURYO PROGO	Prawirotanan Mg III / 825 Yogyakarta			Suwarnono, M.Pd		
16	NOVI NURDIANSYAH	GB.1214187	XI GB 2							
17	PANDIYONO	GB.1214191	XI GB 2							
18	PRABETYO EKO PRABOWO	GB.1214192	XI GB 2							
19	LUTHFIANO DENNY AMARA	GB.1214173	XI GB 2	CV.MANDIRI KONSTITI (EMKA)	Jl. Ki Mangun Sankoro No 40 B Yk					
20	IMAN	GB.1214167	XI GB 2							
21	MUHAMMAD ANUL F	GB.1214178	XI GB 2							
22	M. ARIFF MUHUSYIN	GB.1214179	XI GB 2							
23	HANDI AGAS SETYAWAN	GB.1214161	XI GB 2							
24	BRAC AKBAR TAHRID	GB.1214165	XI GB 2	PT.CAKRAWALA METRIK	Jl.Nogobondo No 9 Rejowinangun Kolgeda Yogyakarta					
25	M. AGUNG RISANTO	GB.1214178	XI GB 2							
26	MUR HARIST SETIANTO	GB.1214189	XI GB 2							
27	PRAMBODO HARI K	GB.1214190	XI GB 2							
28	NURNAWAN ARDENEGO	GB.1214171	XI GB 2	WASTUMATRA KENCANA INDONESIA	Jl.Branjangan No 1 Demangan Baru Yogyakarta					
29	MUHAMMAD RAYA R S	GB.1214183	XI GB 2							
30	MUHAMMAD FATMILLAH	GB.1133475	XI GB 2							
31	MICHAEL MO	GB.1113810	XI GB 2	PT.KARYA SEHATI UTAMA	Ruko Grand Cuyuwata KAV R-1 Jl Solo Km 11,8 Yk					
32	M. ALDO REYNALDO	GB.1214177	XI GB 2							

Pemerintah Kota Yogyakarta
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3
Jln. R. Wolter Monginsidi 2 (0274) 513503, 582322 Fax. 513503 Yogyakarta 55233
Website: www.smkn3jogja.sch.id e-mail : humas@smkn3jogja.sch.id

Management System ISO 9001:2008
TUW Management SYSTEM
TUW Management SYSTEM

DAFTAR PESERTA PRAKERIN ANGKATAN I TAHUN PELAJARAN 2013/2014

NO	NAMA SISWA	NO.INDUK	KELAS	INDUSTRI I		TANGGAL	INDUSTRI II		PEMBIMBING
				NAMA	ALAMAT		NAMA	ALAMAT	
1	ANDRUS FITRIANSYAH	KR.1214813	XI KR 1	MEKANIKA RAYA	Jl.Kaliurang Km 12,2 Yk	14 Okt 2013 s.d 21 Dec 2013	B MOBIL MODINA	Jl. D' Rajalin, Ngem	Subagyo, S.Pd
2	ANGGA KLINGDRO JATI	KR.1214815	XI KR 1						
3	ADI PRANATA PUTRA	KR.1214817	XI KR 1	GAYATRI MOTOR	Jl Gedean Km 8, No 1 Klujuran Gedean Sleman				Subagyo, S.Pd
4	AMIR ROSAWIDON	KR.1214818	XI KR 1						
5	ANGGUS BUDIMAN SYANDU	KR.1214920	XI KR 1						
6	ANGGOT ALRIBUDA	KR.1214829	XI KR 1	NASMOCC BANTUL	Jl Ringroad selatan taman 190 Kasihan Bantul				Supriyono, S.Pd
7	ANDI SULISTANTO	KR.1214825	XI KR 1	PT.MITRA PRATAMA MOBILINDO	Jl. Megelang Km.5, 7 kulu Yogyakarta				Subagyo, S.Pd
8	BOWEN TURA DESTA D S	KR.1214822	XI KR 1						
9	BECOLE PRABOWA	KR.1214824	XI KR 1						
10	DIMAS ADE KRISNAN S K	KR.1214832	XI KR 1	BENGKEL KWENI 5	Jl. Bantul Km 8 Kweni Panggangharjo Sewon bantul				Supriyono, S.Pd
11	DIHANI DANGRA W	KR.1214830	XI KR 1						
12	ALDINO YUANTORO	KR.1214826	XI KR 1						
13	DINDY RIZALDI PUTRA	KR.1214851	XI KR 1	PAHALA DIESEL	Jl Ring Road Barat No 33 Yogyakarta				Subagyo, S.Pd
14	DIMAS PRAMBOWO	KR.1214833	XI KR 1						
15	FAMRI NURRANIDYAH	KR.1214808	XI KR 1	NEW DAYTONA/BMW MOTOR	Jl. Kaliurang Km 8 Yogyakarta				Supriyono, S.Pd
16	ALEXANDER GALIH P W	KR.1214807	XI KR 1						
17	AFRIAN KODESPONDA	KR.1214899	XI KR 1	PROTECT AUTO CARE	Jl Bantul No 84 Yogyakarta				Supriyono, S.Pd
18	ADI SURYA PANCA SAPUTRA	KR.1214888	XI KR 1						
19	AHMAD PRAYOGO	KR.1214804	XI KR 1	NASMOCC JANTI	Jl Ringroad Timur Yogyakarta 3 Yk				Subagyo, S.Pd
20	ARIF CAHYA PURNAMA	KR.1214819	XI KR 1	F.A MOBIL	Jl Demakan baru Tr III/792 Yogyakarta 3 Yk				Supriyono, S.Pd
21	ARIF OWI SAPUTRA	KR.1214817	XI KR 1						
22	BAGUS OWI SAPUTRO	KR.1214823	XI KR 1	INJOYAWAN AUTO SERVICE	Jl. Injoji Baru Km 4 Jotawang 3 Yk				Supriyono, S.Pd
23	BAGUS OWI YULI CAHYO	KR.1214803	XI KR 1	NYLEM EPEED	Bongoran,Sigaling Bantén Bt				Supriyono, S.Pd
24	AGUNG TRI S	KR.1214802	XI KR 1	YUDDH MOTOR	Jl.Veteran,Gang Gayam No 5 Yk				
25	AGAS ANJAR S	KR.1214821	XI KR 1						
26	AHMAD JALALLUDIN A	KR.1214803	XI KR 1	CV.SUMBER BARU GM JOGJA	Jl.Megelang Km 6 Blinduqi Masti Sleman				Supriyono, S.Pd
27	BENI Hidayat	KR.1214805	XI KR 1						
28	AJI PRADANA TIMUR	KR.1214824	XI KR 1	V-TRONIK	Jl. Bantul Km 9 No 203 Pendowoharjo Sewon Bantul				
29	ARIFAN THOR OKER	KR.1214805	XI KR 1						
30	ARJUN PRISTYANAN	KR.1214824	XI KR 1						
31	ANAS YUDA LAKSANA	KR.1214812	XI KR 1						
32	ANGGOT YUDDH PRATAMA	KR.1214811	XI KR 1	YESS MOTOR	Jl.Kaliurang Km 10 Ngaijan Sardonoharjo Ngaglik Sleman				Subagyo, S.Pd
33	BRANI ANJAN SETYAWAN	KR.1214828	XI KR 1						
34	BOWO PRABETYO	KR.1214827	XI KR 1	DIHI SERVICE	Ngringinan Palbapang Bantul				Supriyono, S.Pd

Dokumentasi 22 : Nota SMM

SMK Negeri 3 Yogyakarta

F/423/QMS/6
14-10-2010/Nota

NOTA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perihal : _____

Usulan : _____

Hasil Revisi : _____

Yogyakarta,
Menyetujui / Mengetahui,

Yogyakarta,
Yang Mengusulkan

2008

KOTAK SARAN
KOTAK SARAN

SMK Negeri 3 Yogyakarta

F/423/QMS/6
14-10-2010/Nota

NOTA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Perihal : _____

Usulan : _____

NOTA SMM ISO 9001 :2008
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA

Menyetujui / Mengetahui, Yang Mengusulkan

DIES NATALIS 60
ULISESA
& Jawa Tengah
MA KAUM MUDA
NDIDIKAN ABAD 21
Penghargaan

Dokumentasi 23 : Dokumentasi Sumbangan Alat

-Toolbox



- Mobil Praktek

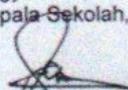


Dokumentasi 24 : Susunan Pengurus Komite Sekolah

F/62/TU/14
20 Agustus 2013

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 800/1372 tanggal 14 Oktober 2014
Tentang : REVISI SUSUNAN PENGURUS KOMITE SEKOLAH ANGGOTA TETAP
SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2013 - 2016

No.	Jabatan	Nama	Keterangan/Unsur
I.	Nara Sumber	1. Drs. Soeharto Poerwanto 2. Drs. Hadi Wasikun 3. Drs. H. Budi Parjiman, A.Ma	Praktisi Pendidikan Alumni Tokoh Masyarakat
II.	Pengurus Harian		
1.	Ketua	Drs. Suko Raharjo	Praktisi Pendidikan
2.	Wakil Ketua I	H. Yulianto, ST	DU/DI
3.	Wakil Ketua II	Supartana, S.PdI, M.Si	Praktisi Pendidikan
4.	Sekretaris	Kepala Sekolah (Drs. Aruji Siswanto)	Unsur Sekolah
5.	Wakil Sekretaris	Kepala Tata Usaha (Ismu Bandiyah,SE)	Unsur Sekolah
6.	Bendahara	Bendahara Sekolah (Sri Mulyani)	Unsur Sekolah
7.	Wakil Bendahara	Walijo	Orangtua
8.	Bidang Penggalan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. WKS 1 (Drs. Heru Widada) 2. Bambang Sulityo, S.Pd, M.Eng	Unsur Sekolah Orangtua
9.	Bidang Sarana Prasarana dan Usaha	1. WKS 2 (Betti Sri Purwani, M.Eng) 2. Dwi Bibit	Unsur Sekolah Orangtua
10.	Bidang Penggalan Sumber Daya Sekolah dan Pengelolaan Sumber Dana Sekolah	1. WKS 3 (Setyo Budi Sungkowo, S.Pd) 2. Hery Wiyono	Unsur Sekolah Orangtua
11.	Bidang Jaringan Kerja Sama dan Sistem Informasi	1. WKS 4 (Dodot Yuliantoro, S.Pd, MT) 2. Haryadi	Unsur Sekolah Orangtua

Yogyakarta, 14 Oktober 2014
Kepala Sekolah,

Drs. Aruji Siswanto
NIP. 19640507 199010 1 001

Dokumentasi 25 : indikator kinerja komite sekolah

PERAN KOMITE SEKOLAH	FUNGSI MANAJEMEN PENDIDIKAN	INDIKATOR KINERJA
Badan Pertimbangan (<i>Advidsory Agency</i>)	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat. b. Memberikan masukan untuk penyusunan RAPBS c. Menyelenggarakan RAPBS (sekolah, orang tua siswa, masyarakat) d. Memberikan pertimbangan perubahan RAPBS. e. Ikut mengesahkan RAPBS bersama kepala sekolah.
	2. Pelaksanaan program - kurikulum - PBM - Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan masukan terhadap proses pengelolaan sekolah. b. Memberikan masukan terhadap proses pembelajaran.
	3. pengelolaan sumberdaya - SDM - sarana dan prasarana - anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Identifikasi potensi sumberdaya pendidikan dalam masyarakat. b. Memberikan pertimbangan tentang tenaga kependidikan yang dapat diperbantukan di sekolah. c. Memberikan pertimbangan tentang sarana dan prasarana yang dapat diperbantukan di sekolah. d. Memberikan Pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan di sekolah.
Badan pendukung (<i>Supporting agency</i>)	1. Pengelolaan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di sekolah. b. Mobilisasi guru sukarelawan untuk menanggulangi kekurangan guru di sekolah. c. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan di sekolah.
	2. pengelolaan sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau kondisi sarana prasarana pendidikan yang ada. b. Mengkoordinasikan dukungan sarana prasarana di sekolah. c. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana prasarana sekolah.
	3. pengelolaan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah-sekolah. b. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di sekolah. c. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran pendidikan di sekolah.

Badan Pengontrol (<i>controlling agency</i>)	1. Mengontrol perencanaan pendidikan di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengontrol proses pengambilan keputusan di sekolah. b. Mengontrol kualitas kebijakan di sekolah. c. Mengontrol proses perencanaan pendidikan di sekolah. d. Pengawasan terhadap kualitas perencanaan sekolah. e. Pengawasan terhadap kualitas program sekolah.
	2. Memantau pelaksanaan program di sekolah	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau organisasi sekolah. b. Memantau penjadwalan program sekolah. c. Mengontrol alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah. d. Memantau sumber-sumber daya pelaksanaan program sekolah. e. Mengontrol partisipasi Stakeholders pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah.
	3. memantau output pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau hasil ujian akhir. b. Memantau angka partisipasi sekolah. c. Memantau angka mengulang d. Memantau angka bertahan
4. mediator	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi penghubung antara Komite Sekolah, dengan masyarakat, Komite Sekolah dengan sekolah dan Komite sekolah dengan Dewan pendidikan. b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan. c. Membuat usulan kebijakan dan program terhadap sekolah.
	2. Pelaksanaan Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat. b. Memfasilitasi berbagai masukan kebijakan program terhadap sekolah. c. Menampung pengaduan dan keluhan terhadap kebijakan dan program sekolah d. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap sekolah
	3. pengelolaan sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengidentifikasi kondisi sumberdaya di sekolah-sekolah b. Mengidentifikasi sumberdaya masyarakat c. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan sekolah d. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat

(sumber : Hasbullah 2007)

Dokumentasi 26 : kegiatan operasional Komite sekolah

No.	Peran KS	Fungsi KS	Kegiatan Operasional KS
1	Badan Pertimbangan (<i>advisory</i>)	Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) Kriteria kinerja satuan, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria Fasilitas Pendidikan, dan (6) hal-hal terkait pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan pendataan kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat 2. Menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah 3. Menyampaikan masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. 4. Memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan lokal 5. Memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM) 6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah
2	Badan Pendukung (<i>Supporting</i>)	Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan orangtua dan anggota masyarakat 2. Mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu 3. Menghimbau dan mengadakan pendekatan kepada orangtua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik 4. Memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak-anak 5. Memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebaran narkoba di sekolah 6. Memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
		Menggalang dana masyarakat dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah

		<p>rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno KS 3. Memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah 4. Membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi.
		<p>Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orangtua siswa. 2. Mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat. 3. Membantu sekolah dalam menciptakan hubungan dan kerjasama antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat.
3	Badan Pengontrol (<i>controlling</i>)	<p>Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru 2. Sering mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah, atau dengan dewan guru di sekolah 3. Meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa 4. Bekerjasama dengan sekolah dalam kegiatan penelusuran alumni
4	Badan Penghubung (<i>Mediator</i>)	<p>Melakukan kerjasama dengan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan DUDI 2. Mengadakan penjajagan tentang kemungkinan untuk dapat mengadakan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah
		<p>Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat 2. Menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah.

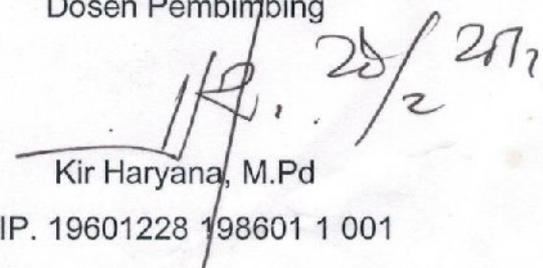


KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kismanto
No. Mahasiswa : 09504241009
Judul TAS : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Manajemen Berbasis Sekolah di SMK N 2 Yogyakarta Terhadap Peningkatan Mutu Sekolah.
Dosen Pembimbing : Kir Haryana, M.Pd
Bimbingan Ke- : 1
Hari, Tanggal : Kamis 21 Februari 2013

Materi Bimbingan	Catatan Dosen Pembimbing
Judul dan Bab 1	Memberikan kutipan yang relevan dengan judul berdasarkan penelitian sebelumnya sebagai penguat latar belakang dan identifikasi masalah. 

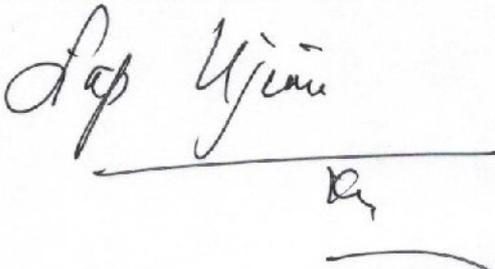
Dosen Pembimbing


Kir Haryana, M.Pd

NIP. 19601228 198601 1 001

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Kismanto
No. Mahasiswa : 09504241009
Judul TAS : Partisipasi Komite sekolah Dalam Implementasi
Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMK
N 3 Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Kir Haryana, M.Pd
Bimbingan Ke- : 14
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Mei 2016

Materi Bimbingan	Catatan Dosen Pembimbing
Bab 1-5	Menyusun Presentasi dari Bab I- Bab V 

Dosen Pembimbing



Kir Haryana, M.Pd

NIP. 19601228 198601 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK



Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 586168 psw. 276,289,292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734

Certificate No: QSC 00592

website : <http://ft.uny.ac.id> e-mail: ft@uny.ac.id ; teknik@uny.ac.id

Nomor : 1960/H34/PL/2015

07 Agustus 2015

Lamp. :

Hal : Ijin Penelitian

Yth.

- 1 . Gubernur DIY c.q. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
- 2 . Gubernur Provinsi DIY c.q. Ka. Bappeda Provinsi DIY
- 3 . Walikota Kota Yogyakarta c.q. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Yogyakarta
- 4 . Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga Provinsi DIY
- 5 . Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda , dan Olahraga Kota Yogyakarta
- 6 . Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Akhir Skripsi kami mohon dengan hormat bantuan Saudara memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat (Komite Sekolah)

Dalam Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMK N 3 Yogyakarta, bagi Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tersebut di bawah ini:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Lokasi
1	Kismanto	09504241009	Pend. Teknik Otomotif - S1	SMK Negeri 3 Yogyakarta

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu :

Nama : Kir Haryana, M.Pd.

NIP : 19601228 198601 1 001

Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan mulai Bulan Agustus 2015 s/d selesai.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerjasama yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I

Dr. Sunaryo Soenarto

NIP. 19580630 198601 1 001

Tembusan :
Ketua Jurusan



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814

(Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/V/85/6/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I** Nomor : **1428/H.34/PL/2015**
Tanggal : **4 JUNI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **KISMANTO** NIP/NIM : **09504241009**
Alamat : **FAK TEKNIK, S -1 PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**
Judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT (KOMITE SEKOLAH) DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH (MPMBS) DI SMK N 3 YOGYAKARTA**
Lokasi : **DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY**
Waktu : **4 JUNI 2015 s/d 4 SEPTEMBER 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **4 JUNI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA
3. DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY
4. WAKIL DEKAN I, UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682
Fax (0274) 555241
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2155
3756/34

- Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/85/6/2015 Tanggal : 4 Juni 2015
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : KISMANTO
No. Mhs/ NIM : 09504241009
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Teknik - UNY
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta
Penanggungjawab : Kir Haryana, M.Pd.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH DI SMK N 3 YOGYAKARTA
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 5 Juni 2015 s/d 5 September 2015
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

KISMANTO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 5-6-2015

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris



Drs. HARDONO
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai lapcran)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
4. Kepala SMK Negeri 3 Yogyakarta
5. Yth



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 3

Jalan W. Monginsidi No. 2 Yogyakarta 55233 Telp./Fax. (0274) 513503
Website: www.smkn3jogja.sch.id Email: humas@smkn3jogja.sch.id

F/62/TU/13
14 Nopember 2014



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID: 375201842

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 070 / 904

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. B. Sabri
NIP : 19630830 198703 1 003
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa

Nama : Kismanto
NIM : 09504241009
Konsentrasi : Pendidikan Teknik Otomotif
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
Fakultas : Teknik

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan judul " Partisipasi Komite Sekolah Dalam Implementasi Majemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMK N 3 Yogyakarta "

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 8 Juni 2016
Kepala Sekolah,

Drs. B. Sabri
NIP. 19630830 198703 1 003